



**PERANAN PERS TIMUR-TENGAH DALAM MEMPENGARUHI
KEBIJAKAN PEMERNTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA
TERHADAP UMAT ISLAM DI NUSANTARA**

**Yecki Bus
Idawati Djohar
Jhoni Eka Putra**

PUSLIT IAIN IB

Penelitian ini mendapat bantuan dana CAPA
IAIN Imam Syarif Padang

LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK

PERANAN PERS TIMUR-TENGAH DALAMMEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA TERHADAP UMAT ISLAM DI NUSANTARA

Oleh,

- 1. Ketua : Yecki Bus, M. Ag**
- 2. Anggota : Dra. Hj. Idawati Djohar
Jhoni Eka Putra**

**PUSLIT IAIN IB
2013**

Penelitian ini mendapat bantuan dana DIPA IAIN Imam Bonjol Padang
--

KATA PENGANTAR

Permulaan awal abad kedupuluh selalu dianggap periode terpenting dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia, terkait dengan cikal bakal nasionalisme dan proses persatuan bangsa. Periode tersebut tidak akan pernah luput dalam pengajaran sejarah nasional di sekolah-sekolah dan akan selalu dikenang atau menjadi bahan pembicaraan untuk penggugah semangat nasionalisme. Materi bahasan pada era ini biasanya diawali dengan kebijakan politik etis yang bermuara kepada lahirnya berbagai pergerakan berhaluan nasionalis dan agamis seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan berbagai gerakan sejenis. Fenomena ini menandai babak baru dalam perkembangan situasi orang nusantara untuk mengarah kepada kesadaran untuk bersatu.

Perubahan besar yang dialami oleh masyarakat nusantara yang semakin terpelajar dan dinamis selalu dikaitkan dengan “berkat” perubahan sikap pemerintah Hindia Belanda yang lebih baik humanis, atau dengan kata lain Bangsa Belanda sudah menjadi lebih manusiawi dan simpatik kepada rakyat nusantara. Hal ini ditandai dengan pemberian lebih luas pada kebebasan (berorganisasi, publikasi dan berpolitik) dan akses pendidikan. Sikap ini juga dipicu oleh semakin besarnya perasaan kemanusiaan publik Belanda belakangan ini terhadap kemiskinan, kesengasaraan dan keterbelakangan yang sudah menjadi pemandangan sehari-hari selama pemerintah kolonial. Keadaan miris tersebut memunculkan kritik dan tekanan publik di negeri Belanda sendiri agar pemerintah kolonial memperlakukan penduduk nusantara lebih baik. Pandangan seperti inilah yang selalu dikemukakan dan diajarkan dalam pembicaraan sejarah nasional Indonesia.

Namun, sebenarnya ada beberapa faktor lain yang sama sekali tidak ada disinggung-singgung sedikitpun dalam kasus ini.

Yaitu tekanan media massa dari Timur Tengah. Banyak orang yang tidak tahu bahwa pada tahun-tahun penghujung abad ke 19 dan permulaan abda ke 20, Belanda begitu direpotkan oleh berbagai serangan dan kritikan yang memojokkan citra mereka oleh media-media pers di Timur Tengah. Kerajaan Belanda yang berusaha tampil sebagai Negara yang “baik di mata publik Timur Tengah yang Muslim”, seolah terbongkar kedoknya sebagai Negara yang kejam terhadap Umat Islam. Semua itu terjadi di daerah jajahannya di nusantara dan dibeberkian secara vulgar oleh Koran-koraan di Timur Tengah.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pemerintah Belanda sangat terganggu oleh serangan pers Timur-Tengah tersebut dan berusaha membungkam atau membendungnya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan segera mengubah perilaku menjadi sebuah Negara yang lebih beradab dan simpatik kepada penduduk muslim di nusantara. Maka dari sana pulalah muncul dorongan untuk melakukan kebijakan politik etis (1901) yang terkenal itu. Namun pemaparan sejarah hampir tidak mengungkapkan peranan pers Timur Tengah lahirnya politik balas budi ala Belanda tersebut. Maka penelitian ini akan memperlihatkan adanya peranan kekuatan pers Islam di Timur Tengah dalam kebijakan Belanda di nusantara, sekaligus mendorong perlunya usaha baru dalam memperkaya sumber data sejarah nasional karena ternyata ada sumber atau data sejarah nasional yang luput dari pantauan publik sejarawan kita.

Padang. 28 Setember 2013

Yecki Bus

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.....1
- B. Rumusan Masalah.....4
- C. Pembatasan Masalah.....4
- D. Signifikansi Penelitian.....5
- E. Kajian Riset.....5
- F. Kerangka Teori.....6
- G. Metode Penelitian.....7
- H. Operasional Penelitian.....7

BAB II PERSEPSI PUBLIK TIMUR-TENGAH TERHADAP UMAT ISLAM NUSANTARA

- A. Persepsi Publik Timur-Tengah Terhadap Umat Islam Nusantara.....10
- B. Sejarah dan Dinamika Pers Timur-Tengah13

BAB III. DINAMIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA TERHADAP ISLAM DI NUSANTARA

- A. Pandangan Belanda Terhadap Islam Nusantara...29
- B. Kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Terhadap Islam Nusantara.....34

BAB IV PENGARUH MEDIA/PERS TIMUR-TENGAH TERHADAP KEBIJAKAN ISLAM PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA DI NUSANTARA

- A. Serangan Pers Timur Tengah45
- B. Reaksi Pemerintah Hindia Belanda dalam Menghadapi Serangan Pers Timur Tengah.....57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 95
- B. Saran,..... 96

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada dekade awal abad ke dua puluh terjadi perubahan sikap pemerintah Hindia Belanda dalam memperlakukan rakyat jajahannya di kawasan nusantara. Berbanding terbalik dengan kebijakan yang diterapkan selama ini, di mana penguasa kolonial melakukan eksploitasi sumber daya alam dan kerja paksa terhadap penduduk setempat yang hampir semuanya untuk kepentingan orang Belanda. Pada masa ini penguasa Belanda meluncurkan kebijakan politik “balas budi” yang terkenal dengan istilah politik etis, sebagai bentuk rasa terima kasih Belanda terhadap keuntungan yang mereka dapatkan selama ini dari rakyat pribumi. Kebijakan tersebut secara umum berbentuk perbaikan dan peningkatan taraf hidup di bidang pertanian, pendidikan dan kesejahteraan¹.

Adanya sikap pemerintah kolonial yang terkesan lebih baik dan mansiawi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya meuncul kritikan dan kecaman dari berbagai pihak terhadap cara-cara pemerintah Belanda dalam memperlakukan rakyat pribumi untuk mengeruk keuntungan. Adapun pihak-pihak yang terkenal dalam mempengaruhi sikap penguasa Belanda untuk berubah sikap ini oleh banyak buku sejarah umumnya seragam, yaitu Multatuli dengan novelnya *Max Havelaar* dan ada lagi nama lain seperti C. Th. Van Deventer yang tulisannya menyatakan hutang Belanda pada rakyat Hindia Belanda dan menyerukan untuk balas budi. Selain itu ada lagi faktor berupa

¹ M. C., Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Tim penerjemah Serambi, (Jakarta: Serambi, 2008) Hal. 327-328

berkembangnya ide humanisme di kalangan masyarakat Negeri Belanda².

Namun ada pula faktor lain yang sepertinya luput (atau memang tidak dihiraukan) dari perhatian banyak sejarawan, yaitu tekanan dari belahan dunia lain dari komunitas Muslim Timur Tengah. Perlu diketahui bahwa ide dan program politik etis ini muncul dan diberlakukan pada tahun-tahun awal abad ke 20. Masa ini merupakan saat-saat paling berkejolak di dunia Islam seiring dengan gencarnya aksi Pan Islam dan situasi genting menjelang Perang Dunia I. Masa ini juga sarat dengan aktivitas pergerakan politik Islam yang penuh dengan aksi propaganda, hasutan dan agitasi. Dengan makin majunya sistem komunikasi dan persuratkabaran maka berbagai pemberitaan dan propaganda semakin mudah tersebar dan diakses oleh banyak kalangan di Timur Tengah bahkan juga mencapai kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, berbagai informasi dari kawasan Asia Tenggara juga semakin mudah dan cepat sampai ke Timur Tengah.

Banyak para sejarawan spesialis Indonesia seperti tidak mengetahui (atau mungkin tidak mau tahu), bahwa pers di Timur Tengah pada akhir abad 19 dan awal abad 20, rupanya selalu menyorot keadaan dan perkembangan di nusantara yang saat itu tengah dijajah oleh Belanda. Pers Timur Tengah saat itu terkenal sangat kritis terutama terhadap pemberitaan seputar penderitaan umat Islam oleh Barat yang non Muslim. Ini tak lepas dari pengaruh ide pan Islam yang menyerukan solidaritas Islam sedunia melawan Barat. Maka berita perihal Perang Aceh, pemberontakan kaum tarekat dan protes social religious yang ditumpas dengan brutal oleh militer Belanda sampai beritanya ke meja redaksi sejumlah Koran di Timur Tengah

² Ibid dan Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), Jilid V Hal. 14-32

(seperti *al-Ma'lumat*, *al-Liwa'* dan *Sevret*). Media tersebut kemudian mengekspos berita tersebut dan ternyata mendapat reaksi publik.

Situasi demikian bagi Kerajaan Belanda rupanya sangat mengganggu bagi kepentingan dan reputasi mereka di Timur Tengah, terutama terkait dengan urusan diplomatik. Selama ini Belanda cukup dihormati di kalangan elit pemerintah Usmaniah yang berkuasa atas daerah penting di Timur Tengah seperti Arabia, Syam dan Anatolia. Belanda berhasil meyakinkan penguasa Usmaniah bahwa mereka bersahabat dengan Umat Islam dan mereka memperlakukan Umat Islam di Hindia jajahan Belanda dengan sangat baik. Dengan kata lain Belanda bukan musuh Islam dan layak menjadi partner yang baik bagi Pemerintah Usmaniah. Keadaan seperti ini sangat diperlukan oleh Belanda untuk banyak keperluan seperti izin pendirian kantor diplomat Belanda di Hijaz, kelancaran jalur transportasi Belanda-Nusantara yang melewati Suez, kelancaran kegiatan intelijen dan kepentingan komersial.

Namun status “dihormati” belakangan mulai terancam dengan maraknya pemberitaan media Timur-Tengah yang menyerang dan menelanjangi Belanda, di mana mereka menggambarkan Belanda sebenarnya penguasa yang kejam terhadap penduduk muslim, seperti dalam kasus tersebut di atas.

Adanya tekanan dari pers Timur Tengah ini memaksa Belanda untuk membela diri atau berusaha membungkam media “nakal” tersebut melalui jalur diplomatik. Ketidaknyamanan Kerajaan Belanda ini terdeteksi dalam sejumlah surat diplomatik dan catatan dari para penasihat pemerintah kolonial yang ditulis pada tahun-tahun akhir abad ke 19 dan awal abad 20. Yang paling terkenal adalah saran dari pejabat penasihat pemerintah colonial Snouck Hurgronje yang

banyak dipicu oleh pemberitaan provokatif koran Usmaniah (*al-Ma'lumat*) yang ia sebutkan sendiri dalam surat nasehatnya kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda³.

Kebetulan atau tidak, pada masa-masa inilah terjadi gejala perubahan sikap pemerintah Belanda terhadap umat Islam di Indonesia. Dalam catatan sejarah nasional selau ditegaskan bahwa permulaan abad 20 merupakan masa sangat penting dalam pergerakan nasionalisme dan juga Islamisme. Semuanya tidak lepas dari perubahan kebijakan dan sikap Belanda yang lebih baik dari sebelumnya di antaranya kebijakan politik etis⁴. Adanya perubahan ini patut dicurigai. Meskipun ada yang mengkaitkannya dengan pengaruh Max havelar atau ide van Deventer, namun kaitan dengan serangan pers Timur Tengah patut menjadi perhatian.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah persoalan adanya korelasi antara serangan pers dan reaksi publik Muslim Timur Tengah terhadap Kerajaan Belanda dengan kebijakan politik etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Nusantara pada permulaan abad kedua puluh.

3. Pertanyaan Penelitian

Apakah serangan pers Timur Tengah terhadap Kerajaan Belanda berperan besar dalam mendorong dilakukannya kebijakan politik etis di nusantara oleh penguasa kolonial Hindia Belanda?

³E, Gobee, dan Adrianse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Terj. Sukarsi, (Jakarta: INIS, 1994) Jilid. IX Hal.1849

⁴Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Terj. Z. Deliar Noer, judul asli, 'The Emergence of the Modern Indonesian Elite', (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984) Hal.50-67

4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini akan mengubah cara pandang orang terhadap fenomena politik etis yang sudah terlanjur ditulis di buku sejarah dan diajarkan di sekolah-sekolah hingga kini. Selain itu penelitian ini akan menekankan para “sejarawan spesialis Indonesia” agar lebih memperhatikan lagi sumber-sumber dari Timur Tengah yang berbahasa Arab itu, sekaligus menyadarkan kalangan akademi bidang sejarah supaya lebih memperhatikan kajian khusus terhadap kawasan ini. Karena pengabaian pada aspek yang sudah lama dipinggirkan ini berpotensi akan menghasilkan kelak asumsi dan kesimpulan sejarah yang pincang bahkan menyesatkan.

Penelitian ini juga penting sekali untuk mengingatkan para sejarawan bahwa adanya nuansa bias dalam menentukan kekuatan mana yang menggerakkan suatu fenomena sejarah khususnya dalam sejarah Indonesia. Dalam kasus ini penulis melihat adanya sikap pengkerdilan kekuatan Islam sebagai aspek penting penggerak peristiwa besar dalam sejarah. Kesan yang ditekankan oleh kebanyakan sejarawan adalah bahwa politik etis merupakan kesadaran yang berasal dari Bangsa Belanda sendiri.

5. Kajian Riset Sebelumnya

Penelitian ini berpola menelaah adanya hubungan peristiwa sejarah di suatu kawasan dengan peristiwa atau pergolakan yang terjadi di kawasan belahan dunia lain. Maka dalam hal ini persisnya adalah adanya korelasi peristiwa sejarah pada umat Islam di suatu kawasan dengan peristiwa atau pergolakan yang terjadi pada umat Islam di kawasan lainnya.

Berdasarkan tinjauan penulis, ada beberapa penelitian yang memiliki pola seperti ini. Di antaranya adalah *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*

yang ditulis oleh Azyumardi Azra. Tulisan ini meneliti perihal korelasi antara dinamika intelektual keislaman di Timur Tengah dan pengaruhnya terhadap karakter keislaman Umat Islam di nusantara pada abad 17 dan 18 M⁵. Maka penelitian Azra ini lebih menekankan aspek kependidikan dan sufisme serta waktunya pada abad yang lebih awal lagi. Sementara dalam riset ini, dominan aspek politisnya serta terjadi pada abad yang sudah lebih maju.

Ada lagi buku *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* yang ditulis oleh Deliar Noer. Tulisan ini juga membuktikan adanya hubungan antara pergolakan pemikiran Islam di Timur Tengah dengan pemikiran modernisme Islam di Nusantara yang sangat deras di empat dekade awal abad 20⁶. Namun penelitian Noer menjelaskan respon dari Umat Islam di Nusantara. Sementara dalam riset ini menyorot respon yang dilakukan oleh pihak penguasa kolonial.

6. Kerangka Teori

Riset ini menggunakan teori “membendung Arus” yang di kemukakan oleh Alwi Shihab yang melakukan riset tentang usaha Muhammadiyah membendung usaha kristenisasi Belanda di nusantara. Teori ini mengungkapkan bahwa adanya usaha gencar suatu keyakinan atau opini untuk melemahkan keyakinan atau opini lain akan memicu munculnya reksi-reaksi dan usaha untuk membendungnya. Namun dalam penelitian ini, yang terjadi adalah usaha Penguasa Hindia Belanda membendung arus serangan pers Timur Tengah yang memberitakan kejahatan pemerintahan kolonial Belanda di

⁵Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1999), Hal. 240-295

⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Nusantara*, (Jakarta: LP3ES, 1982) Hal. 317-319

nusantara, di mana pemberitaan ini membuat rusaknya citra Belanda di mata publik Timur Tengah. Serangan pers tersebut juga berpotensi memicu semangat anti Belanda di kalangan Umat Islam di Hindia Belanda.

7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode penelitian sejarah. Proses yang dilalui dalam penelitian sejarah menjalani lima tahap, yaitu:

- a. Penentuan topik pembahasan .
- b. Pengumpulan sumber-sumber (*heuristic*) yaitu kegiatan yang bersifat bibliografis, mencakup pengumpulan data-data yang dikaji.
- c. Kritik sejarah atau keabsahan sumber, yaitu kegiatan kritik dan penulisan sumber-sumber yang didapat, meliputi segi otensitas atau keaslian sumber (kritik ekstern) dan segi kredibilitasnya. Interpretasi, yaitu usaha penafsiran terhadap sumber tentang topik yang disorot baik berupa analisis (bersifat penguraian) dan sintesis (menyatukan).
- d. Penulisan, yaitu menuangkan pembahasan secara tertulis yang secara umum mempunyai tiga bagian yaitu; pengantar, hasil penelitian (kegiatan penelitian dan penyajian) dan kesimpulan berupa pengajuan generalisasi dari penyajian atau penguraian⁷.

8. Operasional Penelitian

Penelitian ini menyorot peristiwa yang berlangsung sekitar satu abad yang lalu. Maka rujukan primer yang digunakan secara *library research* atau bergantung pada sumber-sumber berupa naskah-naskah, dokumen, artikel atau buku-buku yang ditulis pada rentang waktu tersebut atau setidaknya yang

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1999) H. 85-105, Lihat juga, Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), h. 17-38

berdekatan pada era itu. Naskah tersebut biasanya dalam bentuk dokumen, manuskrip, otobiografi, memoir atau teks-teks lain.

Ada sejumlah referensi yang dikategorikan primer dalam tulisan ini di antaranya adalah karya-karya tulis dari tokoh-tokoh Akademis Belanda atau Eropa yang pernah berkiprah di Hindia Belanda atau pernah bertugas di pemerintahan kolonial, C. Snouck Hurgronje, L.W.C. van den Berg, G.J. Resink dan lain-lain. Snouck Hurgronje telah menulis banyak sekali tentang persoalan Islam di era Hindia Belanda, baik dalam bentuk artikel buku maupun laporan-laporan dan nasehat resmi kepada Pemerintah Hindia Belanda. Di antaranya adalah *Ambelijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje*, *Het Mekkaansche Feest*, dan *Verspreide Geschriften van C. Snouck Hurgronje*. Tulisan-tulisan Hurgronje tersebut banyak memuat persoalan Islam di Nusantara. Namun dalam tulisan itu di juga memaparkan sejumlah informasi perihal keberadaan pembnerritaan dari pers Timur Tengah yang menurutnya berbahaya.

Sumber primer lain juga penulis dapatkan dari sejumlah memoar, catatan perjalanan dan otobiografi. Sebagian sumber-sumber jenis ini belakangan sudah banyak diterbitkan dalam bentuk buku. Di antaranya adalah *Sumatra Tempo Doeloe* yang merupakan kumpulan catatan perjalanan orang-orang Eropa ke Nusantara di era Kolonial yang disunting oleh Anthony Reid⁸. Selain itu ada pula buku sejenis yaitu *Singapura Tempo Doeloe* yang disunting oleh Jhon Bastin⁹ dan *Orang Indonesia dan Orang Prancis* suntingan Bernard Dorleans.

⁸ Anthony Reid, *Sumatra Tempo Doeloe dari Marco Polo hingga Tan Malaka*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010)

⁹ Jhon Bastin, *Singapura Tempo Doeloe 1819-1942*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011)

Adapun sumber sekunder yang bisa dimanfaatkan cukup banyak, karena hampir semua buku sejarah nasional era pergerakan nasional bisa menjadi referensi¹⁰. Tetapi sumber terpenting jenis ini adalah karya Harry Poeze yang berjudul *Di Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. Buku ini bicara tentang keberadaan orang Indonesia di Belanda. Buku ini akan membantu penggalian informasi perihal persepsi masyarakat Negeri Belanda sendiri terhadap praktek kolonialisme di Hindia. Kemudian ada pula artikel Jan Schmidt yaitu *Pan Islamisme di Antara Porte*, Den Haag dan Buitenzorg, dan artikel Kees van Dick yang berjudul *Pan-Islamisme dan Persekongkolan Jerman India*¹¹. Kedua artikel itu sebenarnya membahas aksi pan Islamisme Timur Tengah dan dampaknya di nusantara, tetapi tulisan itu juga memuat banyak kutipan pemberitaan pers Timur Tengah tentang keadaan Hindia Belanda.

¹⁰ Di antaranya adalah M. C., Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Tim penerjemah Serambi, (Jakarta: Serambi, 2008), George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), Karel, Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), Adrian Vicker, *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Insan Madani, 2011),

¹¹ Kedua artikel tersebut dimuat dalam buku Nico J. G, Kaptein, *Kekacauan dan kerusuhan Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan belas dan Awal Abad Kedua puluh*, (Jakarta: INIS, 2003) Hal. 29 dan 69

BAB II

PERSEPSI PUBLIK TIMUR-TENGAH TERHADAP UMAT ISLAM NUSANTARA

A. Persepsi Publik Timur-Tengah Terhadap Umat Islam Nusantara

Sebagai tempat turunnya wahyu, tempat lahir dan perjuangan Nabi Muhammad SAW serta kawasan perkembangan awal Islam, menjadikan Timur-tengah selalu menjadi tempat yang paling diperhatikan, dipantau dan dibicarakan oleh umat Islam di dunia dibandingkan kawasan Islam manapun seperti Asia Tengah, Afrika Barat termasuk Asia Tenggara. Umat Islam di Asia Tenggara contohnya sangat antusias memperhatikan, mencari informasi dan membicarakan kawasan Timur Tengah sejak era kenabian bahkan hingga saat sekarang. Maka Muslim Asia Tenggara punya referensi melimpah terkait dengan kawasan eksplosif ini dan dari bermunculanlah berbagai persepsi, pandangan dan komentar publiknya. Keadaan demikian terasa jelas di kalangan umat Islam di Indonesia hingga kini.

Namun yang menjadi pertanyaan terkait dengan hal ini adalah bagaimana pula sebaliknya dengan publik di Timur-tengah. Apakah mereka juga menaruh perhatian terhadap kawasan Islam di luar Timur-tengah dan memiliki persepsi sendiri terhadap kawasan tersebut. Agak disayangkan apabila kajian tentang hal ini sangat sulit ditemukan. Bilapun ada, bahasanya sangat terbatas dan terlalu geografis¹². Minimnya studi tentang masalah ini memberi kesan seolah publik Timur-tengah kurang perhatian mereka terhadap terhadap Dunia Islam di luar Timur-tengah, khususnya di kepulauan nusantara yang walau posisinya jauh tapi penduduk muslimnya sangat besar.

Asumsi ini pada mulanya sempat menjadi dugaan peneliti selama beberapa waktu, sampai kemudian ketika peneliti

¹² G. R. Tibbetts, *A Study of the Arabic Texts Containing Material on South-East Asia*. (Leyden: E.J. Brill, 1979) Hal. 66-90

melakukan kajian mendalam perihal perang Aceh, ditemukanlah sejumlah informasi dan data yang menyebutkan besarnya perhatian publik Timur-tengah (tepatnya di era Usmaniyah abad ke-19 M) terhadap konflik Aceh-Belanda itu. Perhatian tersebut tercermin dari serangan gencar sejumlah surat kabar Timur-tengah kala itu terhadap pemerintah Usmaniyah agar memainkan pengaruhnya dalam menyelesaikan konflik itu. Dari temuan inilah mendorong pemikiran bahwa publik di Timur-tengah ternyata sangat antusias dengan keadaan Umat Islam di nusantara, namun tidak banyak orang yang tahu.

Perhatian publik Timur-tengah terhadap kawasan sebenarnya sudah muncul jauh pada beberapa abad sebelumnya. Salah satu sumber Timur-tengah yang diketahui pernah menulis tentang kawasan nusantara adalah berasal dari al-Ramahurmudzi asal Persia yang menulis buku berjudul *al-'Aja'ib al-Hind*¹³. Buku itu mengisahkan perihal pendatang dari Oman yang berkunjung ke istana Kerajaan Sriwijaya. Informasi lainnya adalah buku catatan perjalanan karangan Ibnu Bathuthah bernama *al-Rihlah*. Dalam buku tersebut Ibnu Bathuthah menceritakan pengalamannya singgah dan bermukim beberapa lama di negeri Aceh¹⁴. Pada abad ke-17 M, perhatian penguasa Usmaniyah terhadap wilayah nusantara khususnya Aceh terlihat ketika mereka mengirim sejumlah bantuan dan aktivitas diplomatik resmi dalam menghadapi gangguan Portugis di kawasan¹⁵.

Perhatian terhadap wilayah nusantara kemudian mencapai taraf heboh pada pertengahan paruh pertama abad ke-19 M. Saat itu penguasa Hindia Belanda yang menganggap Aceh sebagai ancaman, berencana menyerang kesultanan Aceh yang memang sudah lama rapuh ini. Menjelang rencana Belanda tersebut ternyata memicu krisis diplomatic yang cukup Belanda di Timur-Tengah

¹³ Azra, Azyumardi, Jaringan *Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1999) Hal.1-9

¹⁴ Ibnu Bathuthah, *Rihlah Ibnu Bathuthah*, Penerjemah, M. Muchson Anasy dan Khalifurrahman Fath (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2009) Hal.601-603

¹⁵ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Kejayaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006) Hal.169-170

yang tetap ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintah Usmaniyah. Karena para diplomat Kesultanan Aceh memiliki kemampuan dalam melakukan usaha diplomasi dengan penguasa Usmaniyah untuk menghadapi ancaman Belanda. Bahkan usaha diplomasi ini berhasil memamancing perhatian publik Usmaniyah khususnya dari kalangan jurnalis yang menerbitkan sejumlah artikel dan pemberitaan yang simpatik dan mendukung perjuangan Aceh melawan Belanda¹⁶.

Puncak antusiasme publik Timur-tengah terhdap nusantara mencapai puncaknya di tahun-tahun terakhir penghujung abad ke-19 dan 15 tahun pertama aba ke-20. Kebetulan kala itu, pemerintah Usmaniyah sedang gencar mengkampanyekan gerakan dan ide-ide Pan-Islamisme, yang intinya menyerukan solidaritas sesama umat muslim dalam menhadapi kolonialisme “bangsa-bangsa kafir”. Gerakan Pan-Islamisme sangat aktif dalam melakukan kampanye dan propaganda terutama melalui media massa berupa persuratkabaran, panflet dan selebaran. Maka pada masa ini pemberitaan terkait kawasan nusantara semakin banyak dan terkesan keras. Media yang menampilkan berita seputar nusantara juga lebih banyak baik berupa Koran harian, migguan maupun majalah-majalah.

Setelah runtuhnya kekhalifahan Usmaniyah pada 1924, maka berakhir pulalah aktiitas Pan-Islamisme. Meski demikian perhatian publik Timur-tengah terhadap Islam di nusantara masih besar. Beberapa tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Belanda berusaha mengagalkannya dengan melakukan agresi militer terhadap pemerintah Indonesia yang masih muda. Rupanya, publik Timur-tengah yang mengetahui aksi militer Belanda tersebut tidak tinggal diam. Mereka segera melakukan aksi-aksi penyerangan terhadap kapal-kapal militer Belanda yang hendak melewati Terusan Suez. Walaupun penyerangn itu berupa aksi

¹⁶ Paul van Veer, *Perang Aceh*, Penerjemah, Grafiti Pers, Judul asli 'De Atceh Oorlog,(Jakarta: Grafiti Pers, 1985)Hal. 24-29

pelemparan batu dan gangguan kecil-kecilan. Tapi itu dilakukan dengan spontanitas dan emosional¹⁷.

B. Sejarah dan Dinamika Pers di Tmur-tengah

1. Kelahiran dan Latar Belakang Terbentuknya Persuratkabaran di Timur-Tengah

Amatlah disayangkan bahwa informasi mengenai sejarah dan perkembangan awal dunia jurnalisme di Timur Tengah ternyata sangat minim. Literatur-literatur yang terkait dengan Timur Tengah modern hampir tidak ada yang khusus membahas sejarah dan dinamika pers di Timur Tengah. Adapun kajian umum dan politik memang menyinggung keberadaan pers, namun memberi informasi yang sangat terbatas. Sementara di sisi lain diketahui pemerintah Belanda direpotkan oleh serangan hebat pers Timur Tengah yang terasa keras dan memojokkan.

Sejarah pers di Timur Tengah dapat ditelusuri semenjak abad ke 19 M. Para kontributor yang mengisi rubrik di koran pada masa itu bukan hanya dari kalangan jurnalis saja, tetapi juga terdapat banyak dari kalangan penulis, filsuf dan politisi. Pola jurnalisme yang terbuka ini telah mendorong maraknya aneka diskursus seputar persoalan politik di Era Usmaniyah. Pada mulanya, surat kabar-surat kabar di Era Usmaniyah diterbitkan/dimiliki oleh sejumlah orang asing yang bermukim di Timur Tengah, yang bertujuan untuk mempropagandakan Dunia Barat kepada publik setempat. Surat kabar paling awal yang diketahui pertama sekali terbit terjadi pada bulan September 1795 Palais de France di Pera, Istanbul, yang merupakan kompleks kedutaan Prancis. Saat itu

¹⁷ Hassan, M. Zein, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)Hal. 223-236

yang menjadi dubes Prancis untuk Usmaniyah adalah Raymond de Verninac-Saint-Maur¹⁸.

Suratkabar terbitan ala kedutaan Prancis tersebut terbit berkala dua minggu sekali, dengan nama "*Bulletin de Nouvelles*" hingga pada Maret 1796. Terbitan setelah bulan tersebut namanya berubah menjadi *Gazette française de Constantinople* "*Bulletin de Nouvelles*" dari September 1796 hingga Mei 1797. Kemudian di bulan Mei hingga Juli 1797, namanya berubah lagi menjadi *Mercure Oriental*". Tujuan utama dari penerbitan itu adalah tidak lain untuk membawa informasi terkait perkembangan Prancis yang tengah dilanda revolusi besar. Karena itu, efeknya tidaklah seberapa terhadap populasi lokal¹⁹.

Selama pendudukan Prancis di Mesir pada 1800, sebuah suratkabar pertama dalam Bahasa Arab terbit dengan menggunakan nama *al-Tanbih*(Peringatan). Suratkabar tersebut direncanakan terbit dengan maksud untuk menyebarkan ide-ide Revolusi Prancis kepada rakyat Mesir. *al-Tanbih* didirikan oleh Jacques-François Menou, yang menunjuk Ismail al-Khasab sebagai editornya. Akan tetapi, agaknya penerbitan suratkabar tersebut diragukan terjadi, sebab Jacques-François Menou telah menyerah setelah Alexandria dikepung oleh militer Inggris pada 1801²⁰.

Sejarah persuratkabaran, yang murni dipelopori orang Timur-tengah sendiri, dimulai setelah tersingkirnya Prancis dari Mesir. Pada tahun 1811 Muhammad Ali yang mulanya komandan militer Usmaniyah berhasil berkuasa di Mesir²¹. Pada tahun 1828, ia memerintahkan penerbitan lokal berupa suratkabar bernama *Vekayi-i Misriye* yang merupakan bagian dari perubahan drastis yang diberlakukan oleh Muhammad Ali di kawasan tersebut. Edisi-edisi awal tulisan dalam suratkabar tersebut ditulis dalam dwibahasa Turki-Arab berdampingan perhalaman. Belakangan,

¹⁸ History of Middle Eastern newspapers, dalam; www.wikipedia.com

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), Hal. 34-38

Bahasa Arab sajalah yang digunakan pada Edisi-edisi selanjutnya, dengan penyebutan "*al-Waqa'i`a al-Masriya*"²². Surat kabar versi terakhir ini sempat ditangani oleh Jamaluddin al-Afghani yang dipercaya sebagai pemimpin redaksi. Namun Jamaluddin al-Afghani tidak bertahan lama memimpin surat kabar organ pemerintah ini. Kritik dan gagasan al-Afghani selalu dianggap merongrong kewibawaan pemerintah sehingga dia diberhentikan dari jabatan pemimpin²³.

Suratkabar pemerintah Usmaniyah pertama diterbitkan pada tahun 1831, yang dibentuk oleh Sultan Mahmud II. Suratkabar tersebut diberi nama "*Moniteur Ottoman*", yang barangkali mengambil nama sebuah Koran di Prancis yang bernama *Le Moniteur Universel*. "*Moniteur Ottoman*" terbit sekali dua minggu yang ditulis dalam bahasa Prancis dengan Alexandre Blacque sebagai editornya. Pengerjaannya didanai oleh istana. Beberapa bulan kemudian sebuah firman Sultan menitahkan bahwa suratkabar "*Moniteur Ottoman*" harus ditulis dengan Bahasa Turki dan namanya ditukar menjadi "*Takvim-i Vekayi*" (kalender kegiatan). "*Takvim-i Vekayi*" terbit tidak regular sampai pada tanggal 4 November 1922. Berbagai peraturan dan titah-titah sultan diterbitkan di situ, mirip seperti pemaparan kegiatan kelembagaan²⁴.

Adapun suratkabar non pemerintah pertama, *Ceride-i Havadis* (Daftar Peristiwa), terbit pada tahun 1840 oleh seorang Inggris yang bernama William Churchill. Suratkabar swasta yang pertama sekali diterbitkan oleh Jurnalis Turki sendiri adalah *Tercüman-ı Ahvâl* (Penafsir Kejadian), yang diterbitkan pada Oktober 1860 oleh İbrahim Şinasi dan Agah Efendi. Para pemilik suratkabar tersebut menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan bagian dari kemanusiaan. Pernyataan demikian merupakan pertanda langkah awal kebebasan pers yang terinspirasi

²² History of Middle Eastern newspapers, dalam; www.wikipedia.com

²³ Pijper, G.E., *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia (1900-1950)*, Terj. Tudjimah, Judul Asli, 'Studien Over De Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950, Jakarta: UI Press, 1985) Hal . 115-117

²⁴ History of Middle Eastern newspapers, dalam; www.wikipedia.com

oleh ide-ide pencerahan dari Negeri Prancis yang marak pada abad ke 18.

Sementara itu, terbit pula surat kabar non pemerintah yang dicetak dalam Bahasa Arab, dengan nama *Mir'at al-ahwal*, yang didirikan oleh seorang penyair, Rizqallah Hassun, pada tahun 1855. Namun, pada tahun berikutnya, surat kabar tersebut dibredel oleh pemerintah Usmaniyah, karena menyuarakan pemberitaan kritis terhadap kebijakan politik penguasa. Lalu pada tahun-tahun berikutnya, menjamurlah berbagai surat kabar di sejumlah provinsi. Maka pada tahun 1864, terbitlah aturan baru tentang penyelenggaraan pers yang terinspirasi oleh model hukum sejenis di Prancis. Peraturan tersebut diiringi dengan pembentukan semacam lembaga sensor Negara²⁵.

Majalah penting pertama dari jenis ini adalah *al-Jinan*, yang muncul atas nama Buthrus al-Bustani, tetapi ditulis terutama oleh anaknya, Salim. Majalah ini terbit selama enam belas tahun, dari 1870 hingga 1886, dan akhirnya berhenti terbit lantaran meningkatnya kesulitan-kesulitan untuk menulis secara bebas di bawah pemerintahan Abdul Hamid. Dengan alasan yang sama, banyak murid Bustani pindah dari Beirut ke Kairo, di mana pertumbuhan publik pembaca, kebebasan berekspresi yang relatif besar²⁶. Di antara majalah-majalah Libanon-Mesir ini yang paling terkenal adalah *al-Muqataf*, Didirikan pada 1876, dan *al-Hilal* yang pertama kali muncul pada 1892. *al-Muqataf* termasuk yang konsisten dan bertahan lama yaitu setengah abad. Majalah ini umumnya berisi topik-topik gado-gado, seperti berbagai artikel tentang sains, info-info seputar dunia medis, filsafat, politik lokal, pendidikan, kesusasteraan Arab, perihal perindustrian, agrikultur, ulasan berbagai penemuan ilmiah dan intisari dari artikel-artikel pers asing²⁷.

Sementara *al-Hilal*, yang didirikan oleh Jurji Zaidan (1861-1914), merupakan majalah yang isinya didominasi oleh topik-topik

²⁵ *Ibid*

²⁶ Albert Hourani, , *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, Terj. Suparno dkk, (Bandung: Mizan, 2004) Hal.393

²⁷ *Ibid*

yang terkait dengan etika, sosiologi, politik dunia, geografi, Sejarah, bahasa, sastra dan arkeologi Arab. Albert Hourani mencotahkan salah satu edisi majalah ini, yaitu edisi Februari 1913. Edisi ini berisi artikel-artikel tentang sejarah Libanon, peristiwa pengepungan Dimyat oleh Pasukan Salib, pemikiran Machiavelli dan Ibnu Khaldun, tentang pendidikan dan tatanan sosial, umur dan ketuaan, serta kegemukan dan bagaimana mengobatinya. Selain itu ada pula reportase tentang kunjungan sang editor ke Prancis, Inggris dan Swiss, dan sebuah cerita bersambung dari novel sejarah baru Zaidan mengenai Shalahuddin dan kaum Assassin²⁸.

Kedua majalah memang cenderung menghindari berita yang secara langsung mengandung politik lokal dan agama, dan hal-hal yang membangkitkan kecurigaan. Namun, di balik kedua majalah dan lain-lain yang sejenis, terdapat ide-ide positif tentang apa itu kebenaran, bagaimana seharusnya ia dicari, dan apa semestinya diketahui oleh publik pembaca Arab. Bahwa peradaban adalah baik dalam dirinya sendiri, dan untuk menciptakan serta melestarikannya, seharusnya ada criteria tindakan dan norma moral; bahwa sains adalah dasar dari peradaban dan sains Eropa mengandung nilai universal; bahwa hal itu dapat dan harus diterima oleh pikiran orang Arab melalui media berbahasa Arab; bahwa dari penemuan-penemuan sains dapat disimpulkan suatu sistem moralitas sosial yang merupakan rahasia dari kekuatan sosial; dan bahwa kekuatan sosial muncul dari semangat publik, atau patriotisme, kecintaan pada Negara dan saudara sebangsa yang seharusnya mengatasi semua ikatan sosial lainnya, bahkan ikatan agama. Melalui kerja majalah-majalah inilah sebagian besar gagasan semacam itu menjadi hal lumrah di masyarakat²⁹..

Pada akhirnya *al-Muqataf* berhenti terbit karena tugas ini sudah selesai, sedangkan *al-Hilal* tetap bertahan dengan cara menarik publik pembaca berbeda. Kerika gagasan-gagasan semacam ini pertama kali dikemukakan, penyampaiannya dikemas dalam semangat misionaris, dan tidak di semua tempat mereka

²⁸ *Ibid*, Hal. 394-395

²⁹ *Ibid*, Hal.394-395

diterima dengan senang hati. Tercatat, sebagai contoh, ketika nomor-nomor pertama *al-Muqataf* tiba di Baghdad pada 1876, kalangan konservatif dari semua kelompok mementangnya, baik itu dari Sunni, Syi'ah, bahkan yang Kristen dan Yahudi pun, karena majalah itu dinilai mengajarkan doktrin-doktrin baru dan berbahaya. Hanya sebagian dari generasi muda yang menyambut dengan gembira. Bahkan Nu'man al-Alusi, pemimpin suatu gerakan yang berhaluan reformis sekalipun tidak menyukainya. Dengan demikian butuh waktu yang lama untuk bisa menyebarkan ide-ide baru tersebut³⁰.

2. *Surat Kabar yang Berhaluan Islam*

Pada tahap awal persuratkabaran di Timur Tengah, masih didominasi oleh surat kabar pemerintahan dan swasta yang berisi topik-topik umum seperti sains, sejarah, sosial etika dan politik. Dengan kata lain persuratkabaran Timur-Tengah pada fase awal merupakan Koran atau majalah umum. Adapun surat kabar yang menfokuskan pada jenis topic tertentu belum muncul. Namun di penghujung abad ke-19, seiring dengan program Pan Islamisme Pemerintah Usmaniyah, mulailah bermunculan surat kabar-surat kabar khususnya yang berhaluan Politik Islam.

Sekitar sepuluh tahun terakhir di penghujung abad ke-19, mulailah muncul beberapa surat kabar yang menaruh perhatian terhadap kondisi realitas sosial-politik dunia Islam. Artinya surat kabar tersebut tidak lagi semata membahas topic normative keislaman seperti teologi, etika, hukum atau kilmuan Islam, tetapi juga membicarakan perihal adanya tragedy atau kelaliman yang menimpa umat Islam pada beberapa tempat dibelahan dunia lain. Pembicaraan seputar "derita Umat Islam" ini tidak jarang bernada emosional, provokatif, dan menyerang satu atau beberapa pihak dalam bentuk kecaman, tuduhan dan kritikan.

Berikut ini akan dipaparkan secara ringkas beberapa surat kabar yang "berhaluan keislaman" itu:

a. *Al-'Urwah al-Wutsqa*

³⁰ *Ibid*, Hal. 395

Surat kabar ini didirikan oleh seorang aktivis modernisme Islam Jamaluddin al-Afghani. Sebelumnya ia pernah dipercaya sebagai pemimpin redaksi *al-Waqai'ul Mishriyyah* (terbit di masa raja Muhammad Ali tahun 1828), surat kabar organ pemerintahan Mesir. Namun, al-Afghani tidak bertahan lama memimpin surat kabar ini. Kritik dan gagasan al-Afghani selalu dianggap merongrong kewibawaan pemerintah sehingga dia diberhentikan dari jabatan pemimpin redaksi dan diasingkan ke Heyderabad. Dari pengasingan di India (Heyderabad), pada 23 September 1883, al-Afghani pergi ke London (Inggris). Tetapi di Inggris pun al-Afghani tidak betah sehingga dia memutuskan pergi ke Paris (Perancis)³¹.

Di Paris, al-Afghani menemukan suasana yang memungkinkan dirinya melanjutkan perjuangan. Rencana perjuangan baru telah disiapkan setelah dia mengirim surat kepada Muhammad Abduh, muridnya yang setia di Mesir, untuk segera pergi ke Paris. Di kota Paris yang penduduknya mayoritas non Muslim inilah, al-Afghani menerbitkan majalah *al-'Urwatul Wustqa* (Tali yang Kokoh). Pemberian nama ini terinspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 256. Al-Afghani mengajak Muhammad Abduh duduk di jajaran redaksi. Dibantu oleh Mirza Muhammad Baqir, seorang editor bahasa yang handal, al-Afghani menerbitkan surat kabar ini sebagai majalah mingguan. Nomor perdana majalah mingguan *al-'Urwatul Wustqa* terbit pada 5 Jumadil Awwal 1301 H bertepatan dengan 12 Maret 1884 M. Mingguan *al-'Urwatul Wustqa* mengusung misi persatuan dan menanamkan ajaran Islam demi kesejahteraan seluruh manusia³². Selain tema keagamaan, pemikiran politik al-Afghani sangat kritis sehingga mendapat sorotan dari negara-negara Islam dan Eropa.

³¹ Muarif, 127 Tahun Pers Islam Dari Al-'Urwatul Wustqa Hingga Al-Mannar, *Suara Muhammadiyah*, Vol.. 04 /No 96, 16 - 28 Februari 2011, Hal. 48

³² Ali Rahnama(Ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Terj. Ilyas Hasan, Judul Asli, 'Pioneers of Islamic Revival, (Bandung: Mizan, 1995) Hal.38-39

Puncak pemikiran politik al-Afghani adalah *Pan-Islamisme*, yaitu gagasan yang menghendaki persatuan umat Islam di seluruh dunia dalam rangka mengimbangi kemajuan negara-negara Eropa. Majalah *al-'Urwatul Wustqa* beredar menggunakan jalur organisasi kaum terpelajar yang meliputi Mesir, Iran, Afghanistan, Turki, dan India. Surat kabar Islam modernis pertama ini juga dibaca oleh masyarakat di London.

Di ibukota Inggris ini, *al-'Urwatul Wustqa* begitu populer sehingga sebuah penerbit lokal terinspirasi untuk menerbitkan surat kabar sejenisnya. Al-Afghani sempat diajak oleh sebuah penerbit di London untuk menerbitkan majalah bulanan *Dliyaul Khaifain*. Karena terbit mengandalkan idealisme dan berperan sebagai organ perjuangan politik Islam, *al-'Urwatul Wustqa* tidak mampu bertahan setelah Jamaluddin al-Afghani meninggal dunia (5 Syawal 1314 H/9 Maret 1897 M)³³.

b. *Al-Manar*

Pasca meninggal Jamaluddin al-Afghani dengan *al-'Urwatul Wustqa*-nya, Muhammad Abduh datang dengan *al-Mannar*-nya. Sebenarnya, penggagas penerbitan *al-Mannar* adalah Rasyid Ridha, murid Muhammad Abduh. Berawal dari materi kuliah Muhammad Abduh di Universitas al-Azhar, Rasyid Ridha yang aktif mengikuti kuliah tersebut merasa perlu memublikasikan seluruh materi ceramah gurunya. Pada tahun 1315 H, Rasyid Ridha sebagai pemimpin redaksi dibantu Amir Syakib Arslan sebagai redaktur menerbitkan nomor perdana majalah *al-Mannar* (Mercuri Suar)³⁴.

Jika majalah *al-'Urwatul Wustqa* berorientasi politik, maka *al-Mannar* lebih mengedepankan ijtihad dan rasionalisasi ajaran Islam. Rubrik-rubrik *al-Mannar* juga lebih lengkap, meliputi: Tafsir Al-Qur'an, berita seputar pergerakan dalam dunia Islam, Tanya-jawab agama, biografi pemimpin-pemimpin Islam, pembahasan agama-agama lain, tasawuf,

³³ Muarif, *Op.cit*, Hal. 49

³⁴ Ridhwan Kafrawi(Ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994) Jilid III Hal. 153-154

akhlak dan persoalan ekonomi, sosial, serta politik menurut pandangan Islam. Khusus pada rubrik tafsir Al-Qur'an memuat materi kuliah Muhammad Abduh yang kemudian disunting oleh Rasyid Ridha menjadi 35 jilid kitab yang dikenal dengan *Tafsir Al-Mannar*. Rubrik tanya jawab agama diasuh langsung oleh Rasyid Ridha selaku pemimpin redaksi.

Peta distribusi majalah *al-Mannar* sangat luas, dari Eropa sampai Asia Tenggara. Di samping tersebar lewat para jamaah haji, jaringan distribusi majalah ini menggunakan organisasi Islam yang sehaluan dengan gerakan pembaruan di Mesir. Di Asia Tenggara, majalah *al-Mannar* tersebar di Semenanjung Malaya dan Hindia Timur. Pengaruh majalah *al-Mannar* di Semenanjung Malaya dapat dilacak pada awal abad 20 ketika Syaikh Thaher Jalaluddin al-Azhari menerbitkan majalah *al-Imam* di Singapura. Para pembaca *al-Imam* sering dikonotasikan sebagai "kaum al-Mannar" yang mengindikasikan begitu kuatnya pengaruh *al-Mannar* terhadap majalah ini. Di kawasan Hindia Timur, pada tahun 1911, Haji Abdullah Ahmad menerbitkan majalah *al-Munir* di Padang. Abdullah Ahmad adalah koresponden majalah *al-Imam*³⁵.

Sedangkan di tanah Jawa, pada tahun 1915, terbit majalah *Suara Muhammadiyah* yang digagas oleh Haji Fachroedin. Pengaruh *al-Mannar* memang tidak tampak dari segi nama majalah ini. Akan tetapi, desain rubrik dan isi majalah seluruhnya terpengaruh oleh model majalah *al-Mannar*. Majalah *Suara Muhammadiyah* lebih identik dengan *al-Mannar* ketimbang *al-'Urwatul Wutsqa*. *Suara Muhammadiyah* adalah organ resmi Persyarikatan Muhammadiyah yang secara ideologis sehaluan dengan gerakan pembaruan Islam di Mesir³⁶.

c. *Ma'lumat*

Suratkabar ini berbentuk majalah dan dalam penilaian para sejarawan Barat dianggap sebagai media semi

³⁵ Deliar, Noer, *Gerakan Modern Islam di Nusantara*, (Jakarta: LP3ES, 1982) Hal.39-42

³⁶ Muarif, *Op.cit*, Hal. 48-49

pemerintah Usmaniah. Majalah ini didirikan pada tahun 1893. Pada tahun 1895 media ini diketahui berada di bawah kepemimpinan Baba Tahir. Di samping berbentuk majalah, *Ma'lumat* juga diterbitkan dalam versi Koran harian, yang terus terbit hingga pada tahun 1903. Sayangnya tidak diketahui apa penyebab berhentinya penerbitan versi harian itu pada tahun tersebut. Begitu pula dari segi kebahasaan, Surat kabar *Ma'lumat* yang induknya berbahasa Turki, juga telah menerbitkan pula versi Bahasa Timur-tengah lainnya, yaitu *Ma'lumat* Bahasa Arab dan *Ma'lumat* Bahasa Persia³⁷.

Pada dasarnya penerbitan Surat kabar *Ma'lumat* diarahkan pada penulisan atau publikasi topik-topik kesusastraan. Dengan kata lain, media ini sebenarnya akan menjadi "majalah sastra" yang tentu berisi kutipan puisi, sya'ir, cerpen, prosa berikut ulasan-ulasan dunia sastra dan sejenisnya. Namun dalam prakteknya, Surat kabar *Ma'lumat*, sering juga memuat pemberitaan-pemberitaan atau artikel-artikel bernuansa politik dan sosial. Termasuk diantaranya seputar pergolakan politik dan penindasan kolonial Belanda terhadap penduduk muslim nusantara³⁸. Namun yang agak mengherankan adalah bahwa dalam pentas studi pergerakan Islam modern, keberadaan surat kabar (yang dicap radikal oleh Snouck Hurgronje) ini seolah tidak dikenal sama sekali. Namanya tenggelam oleh popularitas Surat kabar seperti *al-'Urwatul Wutsqa* dan *al-Mannar* yang gema dan pengaruhnya menyebar luas hingga ke Asia Tenggara.

Dalam sudut pandang sejarah pergerakan nasional Indonesia, Surat kabar *Ma'lumat* menurut peneliti, sebenarnya memiliki peranan dan pengaruh cukup besar, karena Surat kabar ini salah satu media pers yang paling keras membeberkan adanya penindasan dan ketidakadilan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Publikasi *Ma'lumat* tentang informasi seperti ini, ternyata berhasil membuat Negeri Belanda merasa malu dan tertekan, dan mereka berusaha berbagai cara untuk membungkamnya. Bahkan bagi

³⁷ Nico J. G. Kaptein, *Kekacauan dan kerusuhan Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan belas dan Awal Abad Kedua puluh*, (Jakarta: INIS, 2003), Hal. 131-134

³⁸ *Ibid*

seorang Snouck Hurgronje, sewaktu menjabat penasehat pemerintah kolonial, menganggapnya sebagai ancaman besar dan berkali-kali menyeru pihak diplomat Belanda untuk menentang surat kabar tersebut³⁹. Mengenai surat kabar *Ma'lumat* ini, snouck menyatakan bahwa dari sekian banyak media pers Timur-Tengah yang memberitakan keburukan Belanda, *Ma'lumat* –lah yang paling memusuhi Belanda dan berada di garis depan dalam menyerang kebijakan Belanda di nusantara⁴⁰. Sangat disayangkan apabila kajian sejarah nasional tidak memperhatikan peranan dari media tersebut, di samping memang informasi dan keberadaan dokumen media ini sangat minim.

d. *Sabāh*

Koran ini merupakan adalah satu surat kabar tertua di masa pemerintahan Usmaniah, karena didirikan pada tahun 1876 dan terus terbit hingga pada tahun 1916. Namun ada yang menyebutnya terbit hingga 1922. Surat kabar ini termasuk populer karena selama rentang waktu tersebut tirasnya diketahui mencapai 10.821, suatu jumlah yang cukup besar untuk ukuran zaman itu. Adapun materi dominan dalamannya adalah berupa berita-berita dan artikel-artikel yang pokok bahasannya berkisar seputar perpolitikan, kesusastaan dan filsafat⁴¹.

Surat kabar ini mungkin tidak dikenal sama sekali oleh publik intelektual dan aktivis nasional Indonesia. Namun dalam pandangan Pemerintahan Belanda, Koran ini seperti duri dalam daging, karena terlalu sering mengekspos pemberitaan perihal kekejaman dan ketidakadilan penguasa Hindia-Belanda terhadap Umat Islam di nusantara. Walau

³⁹ E.Gobee, dan Adrianse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Terj.Sukarsi, Judul asli 'Amblijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936' (Jakarta: INIS, 1994) Jilid. IX Hal. 1737-1885

⁴⁰ *Ibid*, Hal. 1743

⁴¹ Jan Schmidt, *Pan Islamisme di antara Porte, Den Haag dan Buitenzorg*, di dalam Nico J. G. Kaptein, *Kekacauan dan kerusuhan Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan belas dan Awal Abad Kedua puluh*, (Jakarta: INIS, 2003), Hal. 131

pihak Belanda selalu membantahnya dan menganggap semua berita Koran Sabah itu fitnah.

e. *Samarat Al-Funun*

Suratkabar ini, terbit dalam bentuk koran mingguan. Termasuk suratkabar yang cukup tua karena didirikan pertama kali pada tahun 1874. Koran ini belakangan, menjadi salah satu yang dipantau oleh Pemerintahan Belanda, karena nada pemberitannya makin lama makin sering memberitakan kejelekan perilaku penguasa Hindia-Belanda terhadap Umat Islam di nusantara. Salah satu laporan pihak diplomat Belanda perihal suratkabar ini adalah adanya nama Abdulqadir Efendi al-Kabani. Menurut Hummel, konsul Belanda yang melaporkannya, al-Kabani adalah sosok Muslim fanatik. Dan memang dalam kenyataannya, mingguan ini selalu mengekspos berita dan artikel seputar penderitaan umat Islam oleh orang kafir, kekejaman para penjajah Barat terhadap Umat Islam yang mereka jajah, termasuk kejahatan Belanda terhadap jajahannya di nusantara yang Muslim⁴². Hal terakhir ini, tentu tidak disukai Pemerintahan Belanda.

Namun, menurut pantauan pihak Belanda bahwa suratkabar ini mengalami penurunan kualitas dari tahun ke tahun. Tetapi keterangan itu tidak menjelaskan letak penurunan tersebut dan diduga penilaian demikian mengandung bias. Kemudian pada tahun 1908 nama Koran ini diganti menjadi *Ittihad al-Usmani*. Menurut pantauan pihak diplomat Belanda, mingguan ini terlihat begitu mencolok karena “*gaya pemberitaannya yang bombastis dan konservativismenya yang sok pintar*”⁴³. Penilaian yang negatif ini jelas terasa begitu sinis dan emosional karena penilaiannya dari perspektif Barat. Hal ini menunjukkan perasaan ketidaksukaan yang begitu mendalam dari Belanda lantaran nada pemberitaan mingguan tersebut yang sangat keras dan memojokkan.

f. *Suratkabar-suratkabar yang Kurang Dikenal*

⁴² E. Gobebe, dan Adrianse, *Op.cit*, Hal. 1774-1781

⁴³ Jan Schmidt, *Loc.cit*

Selain lima surat kabar di atas, jumlah surat kabar yang beredar di Timur-tengah antara pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke 20 ternyata sangat banyak. Meliputi surat kabar-surat kabar resmi pemerintah, swasta, organisasi atau bahkan perorangan, Baik yang terbit berkala, teratur dan terorganisasi maupun yang sporadis dan liar. Begitu pula yang berhaluan politik dan keagamaan. Namun, seperti sudah diungkapkan di awal, bahwa betapa minimnya informasi seputar keberadaan dan aktivitas media-media Timur-tengah pada masa ini. Barangkali hanya *al-'Urwatul Wustqa* dan *al-Mannar* saja yang memiliki informasi melimpah. Selebihnya, seperti *Ma'lumat*, *Sabāh* dan *Samarat Al-Funun* yang telah diulas di atas, sebenarnya sangat minim informasi. Terlebih lagi pada surat kabar-surat kabar seperti berikut ini; *Servet*, *al-Liwa'*, *al-Mu'ayyad*, '*Alam al-Islam*, *Misbāh asy-Syarq*, *Tercuman*, *Tercuma-i Haqiqat*, *ar-Ra'y al-'Amm*, *Aheng*, *Sirāt al- Mustaqim*, *Yeñi Gazete*, *al-Mufid*, *Beyanu i-hakk*, *Ikdam*, *Le Moniteur Oriental* yang berbahasa Prancis.

Al-Mu'ayyad umpamanya, merupakan surat kabar berhaluan Islam tradisional yang didirikan oleh Syekh Ali Yusuf pada tahun 1890⁴⁴. Hanya itu yang bisa didapat perihal informasi surat kabar tersebut. Bahkan melalui penelusuran via dunia maya sekalipun, hampir tidak ada cerita apapun yang terkait dengan pers. Tetapi yang jelas Snouck Hurgronje tahu bahwa Koran memiliki pelanggan di Hindia Belanda⁴⁵. Namun, sepertinya pemerintah kolonial Belanda memiliki data yang melimpah perihal Koran ini. Karena dari dokumen merekalah sejumlah pemberitaan dari Koran ini dapat diketahui. Di antaranya adalah pemberitaan *al-Mu'ayyad* tentang adanya penindasan Belanda terhadap pendidikan agama Islam dan pembacaan Quran dan artikel yang mengulas perihal kekasaran dan ketidakadilan pemerintahan kolonial Belanda yang kelewatan (terbitan 1899)⁴⁶, kebijakan Belanda yang membiarkan penduduk pribumi di Hindia-

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 135

⁴⁵ E. Gobe, dan Adrianse, *Op.cit*, Hal. 1741

⁴⁶ Hamid Algadri, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1988) Hal. 90

Belanda tetap bodoh (terbitan 1908), dan eksploitasi ekonomis yang menindas buruh pribumi Indonesia (terbitan 1907)⁴⁷.

Tercuman, sebuah surat kabar dalam bentuk mingguan yang pernah terbit cukup lama yaitu antara 1883-1917. Diplomat Belanda mengetahui kalau Koran tersebut dikelola oleh Ismail Bey Gasprinski yang juag sebagai editor. Sayangnya, hanya itu informasi yang bisa diketahui. Namun Koran ini menjadi sorotan oleh pemerintah Belanda karena ikut memuat pemberitaan tentang kekejaman Belanda di nusantara, di antaranya adalah adanya penindasan dan perbudakan terhadap kaum Muslimin Hindia-Belanda (terbitan 1909)⁴⁸.

Di samping *Tercuman* ada lagi surat kabar lain yang bernama seperti *Tercuman-i Haqiqat*, merupakan surat kabar yang sangat populer yang terbit di Istanbul. Didirikan pertama sekali oleh Ahmad Agaoglu pada tahun 1877. Koran ini sebenarnya berhaluan nasionalis. Jumlah terbitannya mencapai 14.867 edisi antara tahun 1877 hingga 1922. Meski nasionalis, tidak menghalangi tindakan mereka memberitakan topik yang tidak disukai Belanda seperti di atas. Salah satu pemberitaan Koran ini adalah bahwa mesjid di daerah Arab di Batavia telah dibangun kembali; pemugarannya didanai oleh masyarakat setempat, terutama oleh “warga Usmaniah” Sayyid ‘Abdullah b. Husain al-Aydarus yang menyumbang TL 5000. Akhirnya, *tugra* Kekaisaran telah dipasang pada dindingnya (terbitan 1906). Pemberitaan ini memberi kesan bahwa sulitnya melakukan program social keagamaan bagi orang Islam di nusantara yang dijajah Belanda yang Kristen.

Koran lain seperti *al-Liwa’* sebenarnya cukup terkenal di Timur Tengah. Surat kabar ini berhaluan nasionalis Arab yang menjadi sarana propaganda Mustafa al-Kamil⁴⁹. Menurut para pejabat diplomatic Belanda, Koran *al-Muayyad dan al-Liwa’* dituding sebagai surat kabar Mesir yang paling banyak mengecam kebijakan pemerintah kolonial Belanda di nusantara. Di antara contoh pemberitaan *al-Liwa’* adalah adanya penindasan terhadap pemberontakan yang adil

⁴⁷ *Ibid*, 150-151

⁴⁸ *Ibid*, 155

⁴⁹ *Ibid*, 150

(terbitan 1904)⁵⁰, kebijakan Belanda yang membiarkan penduduk pribumi di Hindia-Belanda tetap bodoh (terbitan 1904) adanya praktek pergundikan dengan perempuan pribumi⁵¹ dan Penindasan dan pemutarbalikan berita baik tentang ekspedisi militer kekhalifahan Usmaniah (terbitan 1904)⁵².

Nama lain dari surat kabar yang kurang dikenal adalah *Sirāt al- Mustaqim* yang menurut informan Belanda, diterbitkan oleh sekelompok cendekiawan Islam konservatif yang di kendalikan oleh penyair Mehmed Akif sekitar tahun 1870-1936. Surat kabar ini berbentuk bulanan dan, ini yang menjadi masalahnya, sering ikut mengekspos pemberitaan yang menjelekk-jelekkkan perilaku Belanda terhadap kaum Muslimin Hindia-Belanda, di antaranya tuduhan adanya penindasan dan perbudakan terhadap kaum Muslimin Hindia-Belanda (terbitan 1909).⁵³

Sebenarnya masih banyak lagi berbagai media pers Timur Tengah yang menaruh perhatian besar terhadap situasi di tanah air kala itu. Namun karena keterbatasan data dan informasi, hanya bisa dikemukakan beberapa saja dan dengan uraian seadanya. Namun semua itu menunjukkan betapa marak dan bergairahnya aktivitas pers di Timur Tengah saat itu, di mana sorotannya mencapai tempat sejauh Indonesia. Meskipun begitu, kegiatan pers tersebut juga mengalami sejumlah krisis, terutama akibat meletusnya Perang Dunia I yang memicu kelangkaan kertas dan teputusnya pendanaan. Hal ini menjadikan sejumlah surat kabar yang bergantung pada pendanaan Negara atau surat kabar kecil terpaksa berhenti terbit.

⁵⁰Barangkali artikel ini merujuk pada kejadian bentrok antara Kiai Hasan Mukmin dari Gedangan dengan pihak kepolisian Belanda, yang mengeluhkan kebijakan Penguasa Belanda dalam tanam paksa dan aturan memberatkan lainnya. Sartono Kartodirjo, *Ratu Adil*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992) Hal.74-75

⁵¹ Tuduhan ini bisa dilihat dalam buku; Reggie Baay, *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*, Terj,Siti Hertini Adiwoso, Judul asli,'De Njai; Het Concubinaat Nederland-Indie(Jakarta: Komunitas Bambu, 2010)

⁵² *Ibid*, 150-151

⁵³ *Ibid*, 154

Biasanya hal ini terjadi pada koran-koran ekstremis yang sangat terbatas peredarannya — misalnya, *‘Alam al-Islam* dicetak hanya 2000 kopi per nomor -, sangat tergantung pada dukungan keuangan, atau memang dicetak untuk diedarkan di antara tawanan perang, seperti koran Persia *Khawar* dan koran Hindu *Ukhuwwat*. Masyarakat Sejahtera, yang menerbitkan brosur yang disebutkan di atas, rupanya sangat kecil pengaruhnya dan terbitan berkala mereka, *Cihan-i Islam*, sulit didapatkan, juga di Istanbul. Semua terbitan makin menderita karena sulitnya mendapatkan kertas selama perang⁵⁴.

⁵⁴ *Ibid*, 161

BAB III
DINAMIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL
HINDIA BELANDA TERHADAP
ISLAM DI NUSANTARA

C. Pandangan Belanda Terhadap Islam Nusantara

Salah satu masalah mengganjal bagi kekuasaan kolonial Belanda di nusantara adalah status mereka sebagai penganut Kristen. agama yang memiliki sejarah permusuhan dan kecurigaan yang panjang dengan Islam. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya dikepulauan Nusantara ini adalah beragama Islam. Pada awalnya pemerintah Hindia Belanda belum berani mencampuri masalah Islam, dan belum mempunyai kebijakan mengenai hal itu. Tetapi sebenarnya Belanda sudah memiliki persepsi bawaan tentang Agama Islam dari kampung halaman mereka di Eropa. Belanda sudah lama mengenal Islam sejak abad pertengahan, sebab pada masa itu orang-orang Eropa yang Kristen selama berabad-abad merasakan berbagai pukulan keras akibat selalu konflik dengan dunia Islam, seperti adanya penaklukan Spanyol oleh Arab Muslim, Perang Salib, dan serangan militer Turki ke Eropa Timur⁵⁵. Hubungan sarat konflik ini menyisakan pandangan dan komentar khusus orang Eropa terhadap Islam, tak terkecuali Belanda⁵⁶.

Namun persepsi yang kemudian mendarah daging tentang Islam ini sudah tentu sangat negatif dan bias, karena dibina dari kenangan permusuhan dan kebencian. Dengan kata lain, Bangsa-bangsa Eropa memiliki persepsi yang sangat buruk dan antipati

⁵⁵ Bernard Lewis, *Muslim Menemukan Eropa*, Terj. Ahmad N. M Judul Asli, 'Muslim Discovery Europe, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1988)

⁵⁶ Karel, Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) Hal.52-62

terhadap Islam, termasuk Bangsa Belanda sendiri. Namun melihat kenyataan Islam di nusantara yang mereka kuasai adalah mayoritas, nampaknya memndorong Pemerintah Belanda mengambil sikap yang lebih lunak dalam memandang Islam. Hal ini juga memaksa Belanda mendesain kebijakan khusus terhadap penduduk muslim di nisantara.

Secara umum, meski agak melunak, persepsi Belanda terhadap Islam atau umat Islam di nusantara masih bersifat negatif, penuh curiga, dan merendahkan. Berbagai persepsi Belanda terhadap Islam nusantara dapat diketahui dari berbagai tulisan para cendikiawan Belanda, dokumen, atau pers Belanda. Namun banyak persepsi tersebut merupakan pandangana yng bersifat individual atau golongan yang belum tentu mewakili peperintah Belanda.

Adapun persepsi resmi dari pemerintah Belanda sendiri tentang Islam bisa diketahui dari sejumlah penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan orang pribumi di nusantara. Di antara mereka adalah K.F. Holle, C. Snouck Hurgronje dan Hazeu.

1. *K.F. Holle*(1829-1896)

Karel Frederik Holle tiba ke Hindia Belanda bersama kedua orang tuanya pada usia 14 tahun. Pada tahun 1846 ia mengawali karirnya sebagai pegawai kantor pemerintah hingga sepuluh tahun kemudian mengundurkan diri untuk bisa mengurus perkebunan teh di Garut. Holle memang berasal dari keluarga Hucht yang telah merintis usaha perkebunan di Priangan sejak tahun 1844. Holle menguasai dua lahan perkebunan di Limbangan bernama Waspada I seluas 148 bahu yang didirikan 3 Januari 1865 dan Waspada II seluas 50 bahu yang didirikan tanggal 29 April 1868⁵⁷.

Tanpa pengetahuan formal, Holle berhasil mengembangkan kemampuannya di bidang perkebunan dan

⁵⁷Karel Steenbrink, *Kawan dalam pertikaian kaum kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*. Penj. Suryan A. Jamrah. (Jakarta. Mizan. 1995), Hal. 106-107

bidang lainnya seperti linguistik dan budaya. Perkebunannya dijadikan labotarium untuk mempelajari berbagai segi pertanian di saat yang sama ia mengembangkan kemampuannya untuk menguasai bahasa Melayu, Sunda dan Jawa. Untuk menghargai jasa-jasanya, pemerintah kolonial pada tahun 1871 mengangkatnya sebagai Penasihat Honorer untuk Urusan Pribumi. Untuk menyebarkan ide-idenya, Holle bekerja sama dengan teman setianya, Raden Muhammad Moesa, kepala pengulu Garut.

K.F. Holle tentang Islam di Hindia Belanda umumnya negatif. Sebenarnya sosok Holle sendiri bersikap bersahabat dengan penduduk Muslim di Nusantara dan tidak memushi ajaran Islam. Namun ia melihat sejumlah aktivitas keagamaan Umat Islam berpotensi membahayakan bagi pemerintah Belanda. Di antaranya adalah aktivitas haji dan perkumpulan tarekat. Pandangan ini ia dasari pada sejumlah kejadian kerusuhan dan pemberontakan sosial yang diketahui banyak didalangi oleh para haji dan kaum tarekat. Sehingga ia mengusulkan agar adanya usaha pengawasan pelaksanaan Ibadah Haji dan tekanan pada aktivitas Tarekat⁵⁸.

Maka sejak saat itulah pandangan Holle ini sempat diterapkan oleh penguasa Belanda sampai akhirnya direvisi setelah naiknya Snouck Hurgronje sebagai penasehat urusan pribumi. Di mana menurut Snouck, cara-cara ala Holle tersebut tidak tepat.

2. C. Snouck Hurgronje (1889-1936)

Cristiaan Snouck Hurgronje, tidak lain adalah penasehat terkenal pemerintah kolonial Belanda terhadap pribumi dan Umat Islam. Di antara pandangan-pandangannya yang terpenting adalah.

- a. Pemahaman keagamaan Islam orang awam nusantara masih dangkal dan sinkretis⁵⁹.

⁵⁸ *Ibid*, 106-119

⁵⁹ Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, Terj, S.Gunawan, Judul Asli, 'De Islam in Nederlandsch-Indie', (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983), Hal. 38-42

Snouck Hurgronje, yang banyak melakukan kunjungan dan pengamatan terhadap perilaku Umat Islam nusantara (begitu juga yang ia temui di Mekkah), sering mendapati bahwa pengamalan beragama orang nusantara masih membawa-bawa paham-paham dan praktek religi pra-Islam. Namun Snouck Hurgronje tidaklah sendirian berpendapat seperti ini. Para ilmuwan Belanda lainnya juga berpandangan yang sama

- b. Meskipun menganut Islam kebanyakan penduduk nusantara lebih condong kepada tradisi adat lokal ketimbang praktek Islam dalam banyak urusan.

Hal ini didasarkan atas observasi Hurgronje bahwa sebagian besar rakyat lebih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi lokal dibandingkan oleh Islam dan bahwa kelompok bangsawan tampaknya memiliki wewenang dan pengaruh lebih besar dibandingkan para pemimpin santri. Karena itu, tambah Hurgronje, para bangsawan Indonesia yang terdidik, yang sebagian besar adalah kaum Muslim yang “sedang-sedang saja”.

- c. Wawasan penduduk nusantara tentang Islam umumnya seputar ibadah, doa-doa dan sufistik⁶⁰. Hasil pengamatan para ilmuwan Barat umumnya berpendapat demikian, bahwa penduduk Muslim di nusantara kebanyakan berpendidikan rendah dan tidak memahami Bahasa Arab. Wawasan mereka tentang amaliah Islam berputar sekitar rutinitas ibadah, paham-paham bernuansa mistis dan pembacaan doa-doa yang tidak mereka pahami.
- d. Apabila ide-ide politik Islam yang internasionalis, menyusup dalam pemikiran seorang penduduk muslim

⁶⁰ *Ibid*, Hal. 37-19

nusantara, selalu memicu sikap radikal dan anti penguasa kafir⁶¹.

Posisi Snouck Hurgronje sebagai penasehat urusan pribumi di Hindia Belanda, bebarengan dengan, maraknya aktivitas Pan-Islam dari Timur Tengah. Ia mendapati bahwa ide-ide Pan-Islam yang menyerukan persatuan Umat Islam sedunia melawan penjajahan bangsa Barat, memiliki bahaya yang sangat laten bagi stabilitas kekuasaan Belanda di nusantara⁶². Dari sini pandangan mendasar Snouck terhadap Islam di nusantara, yaitu penguasa Belanda tidak perlu menghambat kegiatan Umat Islam yang bersifat ritual dan ibadah murni, namun suatu aktivitas keagamaan sudah mengusung ide-ide politik Islam, maka pemerintah dengan tegas harus membasminya.

Pada sisi lain Snouck Hurgronje melihat adanya paradoks dalam pengamalan agama Umat Islam di nusantara pada aspek amaliah atau hukum. Meskipun mereka menyatakan sebagai Muslim, namun pada aspek-aspek tertentu di bidang Hukum mereka tidak mengamalkan ketentuan Islam tetapi lebih memilih ketentuan dari adat lokal. Seperti dalam pelaksanaan kewarisan atau kebijakan pelaku kriminal. Maka berdasarkan kenyataan ini, Snouck Hurgronje dan juga sejumlah besar ilmuwan Belanda lainnya menecetuskan pemikiran *receptie*, yaitu pandangan yang menganggap bahwa bahwa orang-orang di nusantara meskipun menganut Islam, namun dalam pemberlakuan ketentuan hukum Islam tetap berbasis kepada adat-istiadat lama⁶³. Dengan kata lain, aturan Hukum Islam baru bisa berlaku apabila tidak ditolak oleh

⁶¹ E, Gobe, dan Adrianse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepengawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Terj. Sukarsi, Judul asli 'Amblijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936' (Jakarta: INIS, 1994) Jilid. IX Hal. 1737-1740

⁶² *Ibid*

⁶³ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), Hal.9-12

kehendak adat. Kelak, dari pemikiran inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan yang merevisi aturan sebelumnya (*Regeelingsreglement*) di mana Hukum Islam diberi ruang lebih luas, menjadi lebih dipersempit. Kebijakan ini bernama *Indische Staatsregelings*, dan memicu banyak kecaman dari Umat Islam kala itu⁶⁴.

3. Godard Arend Hazeu (1870-1929)

G.A. Hazeu menggantikan posisi Snouck Hurgronje sebagai penasehat urusan pribumi pada tahun 1906 hingga tahun 1920. Sosok Hazeu ini sangat berbeda cara pandangya tentang Islam di nusantara. IA bukanlah pakar tentang Islam, namun sikapnya terhadap Islam di nusantara umumnya moderat dan simpatik. Bahkan dalam banyak hal, ia begitu membela kepentingan penduduk Muslim, sehingga banyak pihak Belanda lain tidak menyukai caranya yang dinilai terlalu pro pribumi.

Ada beberapa pemikirannya yang terkait dengan Umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah, penentangannya terhadap usaha pendidikan Agama Kristen dalam pengajaran sekolah, baginya ini sama saja dengan bermain api. Hazeu juga membela hak penduduk Muslim untuk berserikat. Maka keberadaan Sarekat Islam (1912) yang dianggap membahayakan oleh kebanyakan orang Belanda, justru dibela oleh Hazeu⁶⁵.

D. Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Islam Nusantara

Pada dasarnya Bangsa Belanda yang Kristen menghendaki penduduk jajahannya mengikuti haluan keyakinan Belanda tersebut. Dengan kata lain Belanda berharap penduduk di

⁶⁴*Ibid* 14-32

⁶⁵Karel Steenbrink, *Op.cit*, Hal. 126-133

nusantara beralih keyakinan religi mereka menjadi Kristen. Hal demikian tentu bias dimaklumi. Tetapi Belanda juga sadar bahwa usaha untuk menuju harapan tersebut justru akan menjadi bumerang atau mengancam kekuasaan mereka sendiri jika pandangan tersebut dipaksakan, karena jika tidak hat-hati akan memicu reaksi berupa perlawanan dan pemberontakan. Tampaknya dalam hal ini Belanda tidak mau mengambil resiko. Mereka memilih kebijakan yang paling aman dan mendukung kepada adanya stabilitas. Maka dalam menghadapi Islam di nusantara, secara umum kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Belanda sebagaimana dikutip dari buku Deliar Noer *Gerakan Modern Islam di Nusantara* adalah

1. *Netral Terhadap Agama*

Hubungan antara pemerintah kolonial dengan agama tidaklah bisa dilepaskan dari hubungan antar sesama umat beragama yakni antara umat Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik). Para penguasa Belanda yang beragama kristen dan para pribumi yang beragama Islam. Latar belakang ini bisa menjelaskan mengapa sering terjadi diskriminasi dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan agama, meskipun dinyatakan bahwa pemerintah Belanda bersikap netral terhadap agama.

Menurut artikel 119 R.R. (artikel 173 *Indische Staatsregeling*) Pemerintah mengakui kemerdekaan agama dan bersikap netral terhadapnya, kecuali bila praktek agama berlawanan dengan hukum yang berlaku, atau merusak ketenangan dan ketenteraman (*rust en orde*). Untuk mempertahankan ketenangan dan ketenteraman ini sebuah ketentuan lain dibuat yaitu bahwa para pendeta dan missionaris harus memperoleh izin khusus dari Gubernur Jenderal untuk dapat memasuki suatu wilayah tertentu di Indonesia. Pemerintah sampai pada keputusan ini antara lain untuk menghindarkan kemungkinan kerusuhan yang timbul pada kalangan Islam di Indonesia. Kata Menteri Jajahan Belanda Charles Ferdinand Pahud dalam tahun 1854:

Pemerintah harus mengatakan . . . [bahwa] negeri Belanda bukanlah negara Kristen. Raja, para pegawai pemerintah dan bangsa mungkin terdiri dari orang-orang Kristen, tetapi apabila kita berbicara tentang perlindungan pada umumnya dan terutama dalam hubungan ini perlindungan terhadap penduduk yang sebahagian besar tidak menganut agama Kristen, maka sikap tidak memihak dan sikap hati-hati haruslah ditekankan.

Menteri yang sama sebelumnya mengatakan:

[Di Indonesia] di mana orang Islam dengan segala unsur kefanatikan dan perlawanannya merupakan mayoritas, pemerintah harus berfikir bahwa ia bertindak secara preventif; dalam bagian-bagian [yaitu bagian-bagian Indonesia dengan mayoritas orang Islam] misionaris tidak diizinkan masuk untuk menyebarkan ajaran Injil....masuknya missionaris itu akan nyata dan tidak ragu-ragu lagi dianggap oleh penduduk pribumi sebagai bukti keinginan pemerintah Belanda mengkristenkan mereka dan pemerintah menurut keyakinannya tidak boleh mendorong tumbuhnya pemikiran yang tidak pada tempatnya itu⁶⁶.

Tentu saja ini bukan merupakan satu-satunya alasan untuk menerima artikel di atas tadi. Sebuah alasan lain tentang diterimanya artikel 119 R.R. itu ialah persaingan antara berbagai sekte agama Kristen sendiri (antara sekte-sekte Protestan dan antara Protestan dengan Katolik). Pertikaian antara sekte itu dan sikap yang tidak toleran di kalangan missionaris Kristen terhadap Sesamanya rnenyebabkan kesukaran di pihak pemerintah untuk memberikan sokongan begitu saja bagi suatu sekte tertentu. Terutama bila missionaris dari berbagai sekte Protestan ataupun dari Protestan dan Katolik berada dalam satu wilayah yang sama.

⁶⁶ Deliar, Noer, *Gerakan Modern Islam di Nusantara*, (Jakarta: LP3ES, 1982) Hal. 184-185

Jadi ketentuan dalam *Regeeringsreglement* tadi dimaksudkan untuk menghindarkan kegiatan “missi berganda” yaitu kehadiran missionaris dan sekte yang berlainan dan terutama missionaris Protestan dan missionaris Katolik di dalam wilayah yang sama⁶⁷.

Undang-undang Dasar Belanda ayat 119 tahun 1855 menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama. Pengertian netral dalam hal ini seharusnya tidak memihak dan tidak ikut campur tangan sama sekali, atau bisa juga membantu kesemuanya secara seimbang tanpa mencampurinya. Tetapi, pernyataan netral terhadap agama, ternyata berbeda antara teori dan praktek. Hal ini jelas terlihat pada berbagai diktum keputusan pemerintah yang tercantum dalam *Regeerings Almanak*, di sana tercatat sekitar seribu orang pegawai negeri yang bertugas sebagai penjaga gereja Kristen, namun tidak seorangpun petugas agama Islam yang tercatat sebagai pegawai negeri dalam buku resmi ini. Serta ketidakseimbangan pemberian dana oleh pemerintah⁶⁸. Pemerintah Hindia Belanda dalam kenyataannya memang tidak bersikap netral dalam masalah agama, agama apapun dan dalam bidang apapun demi terpeliharanya ketertiban keamanan dan demi kelestarian kekuasaannya di Indonesia. Itulah kebijakan umum Kerajaan Belanda terhadap negeri jajahannya di nusantara.

2. *Politik Asosiasi*

Selain kebijakan umum di atas, Pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan sejumlah kebijakan yang lebih spesifik, khususnya dalam mengendalikan Islam di Hindia Belanda. Menurut Alwi Shihab dalam bukunya *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristenn di Indonesia*, cara terbaik untuk melihat kebijakan pemerintah

⁶⁷*Ibid*

⁶⁸ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*, (Jakarta: LP3ES, 1985) Hal.15-38

Belanda mengenai Islam, di Indonesia, adalah dengan memaparkan karya-karya dan gagasan-gagasan Snouck Hurgronje. Dalam mengembangkan garis-garis besar kebijakan yang baru ini, pengaruh Hurgronje sangat besar. Ketika dia berada di Hindia Belanda, untuk periode waktu yang panjang, nasihat-nasihatnya turut membantu memecahkan berbagai masalah penting. Dimulai dengan penunjukannya sebagai penasihat, pemerintah kolonial Belanda menyetujui dikirimnya sejumlah besar pakar mengenai Islam dan lembaga sosial di Indonesia⁶⁹.

Kebijakan Hurgronje mengenai Islam dan kaum Muslim di Indonesia didasarkan atas pengalamannya, terutama kunjungannya yang terkenal ke Makkah. Dia menetap selama tujuh bulan di sana (Februari hingga Agustus 1885), dengan menyamar sebagai seorang Muslim bernama 'Abd Al.-Ghaffâr. Di Makkah, Hurgronje sebanyak mungkin bergabung dengan masyarakat Indonesia dan mempelajari banyak hal mengenai lembaga dan kegiatan keagamaan mereka. Hurgronje berkesimpulan bahwa sebagian besar kaum Muslim yang datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji bukanlah kaum Muslim yang fanatik, yang ingin memajukan Islam dengan segala cara, “ Banyak di antara mereka yang kembali (ke Indonesia) dalam keadaan sama bodohnya dengan ketika mereka berangkat (ke Makkah).”⁷⁴

Pemerintah kolonial Belanda, menurut Hurgronje, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan sebagian besar kiai (guru agama) lokal. Yang lebih penting diperhatikan, dibandingkan dengan mereka, adalah orang-orang Indonesia yang pergi ke Makkah untuk belajar dan menetap bertahun-tahun di sana, dan yang akhirnya menumbuhkan dalam diri mereka rasa kesatuan dan

⁶⁹Alwi Shihab, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristenn di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998) Hal.82-87

persatuan dengan seluruh kaum Muslim berdasarkan identitas keislaman yang sama-sama mereka hayati. Untuk alasan itu, Hurgronje berpendapat, adalah keputusan yang bijak mengizinkan sebagian besar kaum Muslim Indonesia melaksanakan ajaran agama mereka tanpa campur tangan pemerintah. Meskipun demikian, mereka yang mendakwahkan “perang suci” menentang pemerintah “kafir” harus dipandang dan ditanggapi dengan keras⁷⁰.

Penting dicatat bahwa pemerintah kolonial Belanda baru menerapkan kebijakan mengenai Islam yang jelas setelah kedatangan Snouck Hurgronje. Dalam banyak hal, pandangan Hurgronje adalah kebalikan dan kebijakan pemerintah Belanda yang diterapkan sebelumnya. Hurgronje mengkritik banyak kesalahan yang dilakukan oleh para penguasa kolonial Belanda dalam berhubungan dengan banyak masalah yang melibatkan kaum Muslim, baik yang disebabkan oleh kesalahan informasi maupun ketiadaan pengetahuan. Akibatnya, kebijakan Islam yang dikembangkan oleh Hurgronje menjadi bagian integral “Politik Etis⁷¹.”

Secara umum, kebijakan Islam yang disarankan Hurgronje didasarkan atas tiga prinsip utama. *pertama*, dalam semua masalah ritual keagamaan, atau aspek *‘ibadah* dari Islam, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Logika di balik kebijakan ini adalah membiarkan munculnya keyakinan dalam pikiran banyak orang bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak ikut campur dalam masalah keimanan mereka. ini merupakan wilayah yang peka bagi kaum Muslim karena hal itu menyentuh nilai-nilai keagamaan mereka yang paling dalam. Dengan berbuat demikian, pemerintah akan berhasil merebut hati banyak kaum Muslim, menjinakkan mereka dan sejalan dengan itu akan mengurangi, jika tidak menghilangkan sama sekali, pengaruh perlawanan “kaum

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid* dan Karel Steenbrink, *Op.cit*, Hal.120-125

Muslim fanatik” terhadap pemerintah kolonial. Hurgronje, menurut Muhammad Natsir, sarjana Muslim kenamaan, sering kali mengutip sebuah diktum yang diyakininya diterima oleh banyak kaum Muslim, “Penguasa yang adil, meskipun kafir, lebih baik dari pada penguasa Muslim yang despotis.” Berdasarkan diktum itu, Hurgronje menyatakan bahwa pemerintah Belanda yang “kafir” masih dapat memerintah Indonesia sejauh mereka dapat memberikan perlakuan yang adil dan sama-rasa sama-rata, bebas dari ancaman dan despotisme; dan ini merupakan kunci kebijakan yang ingin diterapkannya⁷².

Prinsip *kedua* adalah bahwa, sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam, atau aspek *mu'âmalât* dalam Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan-hubungan sosial lain, pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. Meskipun demikian, pemerintah harus berusaha menarik sebanyak mungkin perhatian orang-orang Indonesia terhadap berbagai keuntungan yang dapat diraih dan kebudayaan Barat. Hal itu dilakukan dengan harapan agar mereka bersedia menggantikan lembaga-lembaga sosial Islam di atas dengan lembaga-lembaga sosial Barat. Diharapkan bahwa perlahan-lahan, sembari berasosiasi dengan orang-orang Belanda, orang-orang Indonesia akan menyadari keterbelakangan lembaga-lembaga sosial islam milik mereka dan menuntut digantikannya lembaga-lembaga itu dengan lembaga-lembaga sosial model Barat. Dan akhirnya, hubungan yang lebih erat antara penguasa Belanda dan rakyat Hindia Belanda akan berkembang dengan sendirinya.

Prinsip yang *ketiga*, dan paling penting, adalah bahwa dalam masalah-masalah politik, pemerintah dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apa pun yang dilakukan oleh kaum Muslim yang dapat menyebarkan seruan-seruan Pan-Islamisme

⁷² *Ibid*, dan Snouck Hurgronje, *Loc.cit*

atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah harus melakukan kontrol ketat terhadap penyebaran gagasan apa pun yang dapat membangkitkan semangat kaum Muslim di Indonesia untuk menentang pemerintah kolonial.

Pemangkasan gagasan-gagasan seperti ini akan memencilkan pengaruh aspek-aspek Islam yang bersifat politis, yang menjadi ancaman terbesar terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Lagi-lagi, dalam hal ini Hurgronje menekankan pentingnya kebijakan asosiasi kaum Muslim dengan peradaban Barat. Dan agar asosiasi ini berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai, pendidikan model Barat harus dibuat terbuka bagi rakyat pribumi. Sebab, hanya dengan penetrasi pendidikan model Baratlah pengaruh Islam di Indonesia bisa disingkirkan atau sedikitnya dikurangi⁷³.

Visi Hurgronje mengenai Indonesia yang lebih baik, yakni yang berasosiasi dengan negara induk Belanda secara damai dan berjangka panjang, memperkuat visi mengenai perlunya meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang secara sosial dan kultural ditata menurut model peradaban Barat. Hurgronje tampak berkeyakinan bahwa peningkatan seperti ini pada akhirnya akan mempersempit jurang yang makin lebar antara masyarakat Indonesia yang “terbelakang” dan masyarakat Belanda yang “modern”. Agar kekuasaan Belanda dapat dipertahankan terus secara damai, setiap upaya harus diambil untuk menghilangkan jarak kultural ini.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, Hurgronje sangat menekankan disediakannya pendidikan Barat pertama-tama dan terutama untuk para bangsawan dan kaum aristokrat Indonesia.

⁷³ *Ibid* dan Karel Steenbrink, *Loc.cit*,

Baginya, dengan tingkat kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan pada umurnya rakyat pribumi, kedekatan mereka kepada pengaruh Barat, serta posisi mereka yang relatif “bersih” dan pengaruh Islam, para bangsawan dan aristokrat Indonesia adalah kelompok sosial yang paling cocok untuk pertama-tama ditarik masuk ke dalam orbit kebudayaan Barat dan dijadikan sebagai rekanan. Dalam skenario ini, secara perlahan namun pasti, dibayangkan bahwa masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang berakar kuat pada adat istiadat, akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh para pemimpin tradisional mereka, yakni kelompok aristokrat dan bangsawan⁷⁴.

Hal ini didasarkan atas observasi Hurgronje bahwa sebagian besar rakyat lebih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi lokal dibandingkan oleh Islam dan bahwa kelompok bangsawan tampaknya memiliki wewenang dan pengaruh lebih besar dibandingkan para pemimpin santri. Karena itu, tambah Hurgronje, para bangsawan Indonesia yang terdidik, yang sebagian besar adalah kaum Muslim yang “sedang-sedang saja”, akan menjauh dari Islam dan akan memainkan peran besar dalam mengantarkan Indonesia menuju dunia model Barat. Pandangan Hurgronje ini sangat berpengaruh dan menjadi salah satu alasan disediakannya berbagai fasilitas pendidikan dalam skala besar-besaran oleh pemerintah setelah tahun 1900⁷⁵.

3. *Pembentukan Het Kantoor voor Inlandsche zaken*

Untuk melakukan usaha pengawasan dan pengendalian haluan keislaman orang nusantara sesuai yang diharapkan Pemerintah Belanda, dilakukan sejumlah program dan pembentukan berbagai lembaga. Dalah satu lembaga resmi

⁷⁴ Karel Steenbrink, *Op.cit.*, 120-126

⁷⁵ *Ibid*, Snouck Hurgronje, *Loc.cit*

pemerintah yang terkait dengan Umat Islam adalah Het Kantoor voor Inlandsche zaken ini.

a. Organisasi Kantoor voor Inlandsche zaken

Meskipun secara fisik kantor ini baru lahir tahun 1918, namun instruksi yang menjadi dasar kelahirannya telah ada sejak tahun 1899. Kantor ini berfungsi sampai akhir masa kolonial Belanda tahun 1942. Sepanjang perjalanan sejarah, peranan kantor ini tampak mengalami pasang surut. Hal ini bukan semata-mata disebabkan karena perbedaan kualitas para penasehat yang mengepalai kantor tersebut, tetapi juga karena perbedaan kepribadian para Gubernur Jenderal yang memerintah Hindia Belanda, dan perbedaan situasi serta kondisi yang dihadapi pada waktu itu, yakni perbedaan situasi dan kondisi di Hindia Belanda maupun di negeri Belanda sendiri⁷⁶.

Tahun 1899 merupakan ambang fajar bagi kedatangan politik etis, suatu kebijaksanaan politik Belanda yang lebih memperhatikan “Kepentingan Indonesia” daripada masa-masa sebelumnya. Adanya penilaian bahwa *Kantoor voor Inlandsche Zaken* merupakan barometer bagi politik kolonial Belanda, agaknya didasarkan pada kenyataan peranannya menunaikan tugas kewajiban moral Belanda tersebut di tengah-tengah pendapat luas masyarakat Belanda yang umumnya menghendaki garis keras dalam menghadapi pribumi. Kantor yang memilih garis lunak dan berada dalam barisan etis ini, sering dituduh memberi hati kepada pribumi. Memang dalam setiap penyelesaian aneka kasus yang terjadi, begitu sering kantor ini berdiri di pihak pribumi dalam melawan sikap keras para pejabat pemerintah Hindia Belanda⁷⁷.

⁷⁶Harun Nasution, (Ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993) Jilid III Hal. 540-541

⁷⁷ Ibid, Aqib Suminto, *Op.cit*, 100-122

b. Status dan Tugas Kantoer voor Inlandsche zaken

Kantoer voor Inlandsche Zaken merupakan dari perluasan tugas seorang *adviseur* atau penasehat pemerintah Hindia Belanda. Dalam melaksanakan tugasnya seorang *adviseur* biasanya dibantu oleh pegawai ahli, di samping beberapa pegawai administrasi, seperti: pembantu Urusan Arab, Urusan Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia, Urusan Pengawasan dan Pembinaan Pemuda Pribumi, dan Juru Bicara Bahasa Arab; juga dibantu wakil *adviseur*. Ruang lingkup aktivitas kantor ini meliputi berbagai bidang, meskipun masalah Islam tetap merupakan tekanan utama. Meneliti tentang aneka bahasa, adat istiadat, antropologi, kecenderungan agama, politik dan kebudayaan penduduk pribumi dan Arab. Memberikan saran kepada Gubernur Jenderal tentang masalah tersebut, juga melaporkannya kepada pejabat pemerintah yang dipandang perlu.⁷⁸.

Dalam pengangkatan bupati baru, kantor ini memberikan pendapatnya kepada Gubernur Jenderal tentang calon bupati tersebut. Ia juga berwenang mengontrol pemakaian gelar atau memberikan pertimbangan dalam pemberian gelar para penduduk, baik gelar resmi maupun pribadi. Ia juga memegang peranan penting dalam pemilihan dan pengangkatan seorang penghulu atau penghulu kepala. Demikian pula tentang pengurusan masalah golongan Arab dan pengangkatan pimpinannya. Dalam masalah ibadah haji, kantor ini berusaha meyakinkan penduduk tentang undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Pendek kata aktivitas Kantoer voor Inlandsche Zaken meliputi seluruh masalah pribumi dan Arab khususnya masalah Islam⁷⁹.

⁷⁸ *Ibid*, dan Aqib Suminto, *Op.cit*, 99-114

⁷⁹ *Ibid*, Hal.155-170

BAB IV

PENGARUH MEDIA/PERS TIMUR-TENGAH TERHADAP KEBIJAKAN ISLAM PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA DI NUSANTARA

A. Serangan Pers Timur Tengah

Uraian pada bab-bab sebelumnya memperlihatkan bahwa kegiatan jurnalisme atau persuratkabaran di Timur Tengah sudah ada semenjak awal-awal abad ke-19 M. Dari segi materi, surat kabar saat itu berisi informasi dan artikel seputar pemerintahan, ilmu pengetahuan, etika dan budaya. Lambat laun, materi-materi yang dimuat semakin beragam dan lebih aktual dengan munculnya berbagai artikel keagamaan, politik dan berita-berita adanya kejadian atau peristiwa. Hal ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke 19 tersebut seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penerbitan surat kabar baru, imbas dari makin besarnya efek modernisme dan penguasaan skill jurnalisme dari para intelektual⁸⁰.

Khusus pemberitaan pers Timur Tengah yang terkait politik, sudah tentu didominasi oleh peristiwa-peristiwa perpolitikan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Banyak artikel-artikel pers Timur Tengah menyebut-nyebut sejumlah Negara Eropa atau non-Islam yang memiliki kontak politik dengan Dunia Islam umumnya dan Timur Tengah khususnya. Dalam hal ini Negara-negara Eropa yang sering disebut oleh banyak surat kabar di Timur Tengah bisaanya adalah Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, dan Austria. Semua negara tersebut memang sering menjadi pihak yang menimbulkan guncangan stabilitas kekuasaan pemerintahan Usmaniyah sepanjang abad ke-19. Selain itu, ada lagi negara-negara yang sebenarnya tidak besar tapi ikut terseret dalam gejolak politik

⁸⁰ Albert Hourani, , *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, Terj. Suparno dkk, Judul asli, 'Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939 (Bandung: Mizan, 2004) Hal.. 393-395

Usmaniah yang amburadul kala itu, seperti Yunani, Serbia, Bosnia, Albania dan Bulgaria⁸¹.

Negara-negara kelompok pertama di atas jelas merupakan kekuatan penting dalam kancah politik dunia kala itu, karena militernya kuat, memiliki kekuatan ekonomi dan punya koloni(jajahan) yang luas. Namun sebenarnya ada satu negara lain yang juga masuk dalam kategori superpower seperti di atas, yaitu Kerajaan Belanda. Belanda sejak awal tampaknya luput dari pantauan pers Timur-tengah, karena negeri ini kecil, jauh dan hampir tidak pernah ikut bagian dalam pertarungan perpolitikan Usmaniah versus Barat. Walaupun dari sisi lain kerajaan ini militernya kuat, kaya dan punya koloni yang sangat luas dan umumnya Muslim. Keadaan ini menjadikan Belanda dalam pandangan publik Timur-tengah tampil sebagai negara netral, bersahabat dan simpatik.

Tampaknya bagi Kerajaan Belanda, situasi ini lebih menguntungkan dan bijaksana. Karena keadaan demikian menjadikan Belanda mendapat perlakuan cukup simpatik dari pemerintah Usmaniah seperti kemudahan pendirian sejumlah konsulat di beberapa tempat di Arabia dan kelancaran dalam penyelesaian urusan diplomatik. Fasilitas ini sangat diperlukan oleh pemerintah Belanda khususnya untuk ketenangan koloni mereka di nusantara dalam melakukan aktivitas spionase danantisipasi keamanan jajahan mereka tersebut. Karena diketahui banyaknya muncul cikal bakal radikalisme Islam dan ide ekstrimisme dari Timur-tengah yang sering menular hingga ke jajahan Belanda yang berharga ini. Semua aktivitas tersebut akan menjadi macet bila mereka punya hubungan buruk dengan pemerintah Usmaniah atau dimusuhi publik Timur-tengah⁸². Sikap ini membuat tindakan penjajahan Belanda terhadap negeri kepulauan nusantara yang mayoritas Muslim pada mulanya seperti

⁸¹ George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Bandung: Sinar Algesindo, 1993, Hal.14-24

⁸² Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno, (Jakarta, INIS, 1997) hal. 66-70

tidak ada yang memperdulikannya, walau oleh saudara seiman di Timur Tengah sekalipun.

Namun situasi menyenangkan ini tidak pula berlangsung lama. Karena pada awal paruh kedua abad 19 tepatnya pada tahun 1873, meledaklah tragedi Perang Aceh yang belakangan amat mermusingkan penguasa kolonial Belanda selama puluhan tahun. Bukan itu saja, kehebohan perang ini rupanya berhasil mengusik perhatian komunitas pers Usmaniah dan Timur-tengah umumnya. Sehingga muncullah sejumlah artikel dari pers Usmaniah yang menyorot masalah ini. Tidak seperti tragedi di nusantara lainnya, seperti Perang Paderi, Diponegoro dan Banjar, Perang Aceh sukses meraih publisitas⁸³ lantaran adanya peranan beberapa tokoh Aceh yang melakukan aksi diplomasi internasional seperti Abdurrahman al-Zhahir. Dia berperan menjadi tokoh yang sempat menyeret sultan Usmaniah untuk terlibat dalam persoalan diplomatis Aceh versus Belanda ini.

Kemunculan *Aceh Affair* ini menjadi awal mula kesadaran publik Timur-tengah, perihal adanya fakta kejahatan berupa penjajahan, penindasan dan penzaliman terhadap kaum Muslim di belahan dunia lain yang, ternyata, dilakukan oleh negara yang mereka anggap bersahabat dan tidak banyak ulah selama ini yaitu Kerajaan Belanda. Akibatnya adalah, Belanda direpotkan oleh berbagai manuver diplomatis untuk menjelaskan duduk persoalannya atau berusaha membendung munculnya sikap antipati dari dari elit Usmaniah. Dalam usahanya ini diplomat Belanda bahkan menggandeng diplomat Rusia di Istanbul untuk menekan elit Usmaniah untuk tidak ikut campur dalam konflik tersebut. Kebetulan saat itu posisi kekhalifahan Usmaniah sedang terjepit akibat aksi ekspansionis militer Rusia yang juga sahabat karib Kerajaan Belanda⁸⁴.

Meski akhirnya Belanda berhasil memenangkan manuver diplomatik dalam masalah Aceh itu, namun tragedi Aceh terlanjur

⁸³ Henk Schulte Nordholt Dkk (Ed), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013) Hal. 314-332

⁸⁴ Paul van Veer, *Perang Aceh*, Penerjemah, Grafiti Pers, Judul asli, 'De Atceh Oorlog', (Jakarta: Grafiti Pers, 1985) Hal, 85

tersebar dan terpublikasi secara luas di publik Timur-tengah. Akibatnya lagi, kawasan nusantara pun mulai menjadi sasaran ekspos pemberitaan di persuratkabaran Timur-tengah yang umumnya cenderung merugikan citra dan nama baik Kerajaan Belanda yang susah payah dipelihara selama ini.

Pemberitaan pers Timur-tengah tentang Aceh sebenarnya bersifat lokal karena belum merembet kepada wilayah-wilayah nusantara lainnya. Selain itu, pada pertengahan abad 19 tersebut jumlah dan jaringan pers Timur-tengah masih terbatas. Meski begitu, situasi demikian terasa amat mengganggu bagi Pemerintah Belanda. Namun pada penghujung abad ke 19 ini, terjadilah perkembangan pesat jurnalisme dan penerbitan di Timur-tengah termasuk pers yang berhaluan keislaman yang anti Barat di mana pemberitaannya yang semakin provokatif menjadi mimpi buruk bagi ketenangan kolonialisme Belanda. Keadaan tersebut dipicu terutama oleh diluncurkannya propaganda dan gerakan Pan-Islamisme berskala internasional yang disponsori oleh Pemerintah Usmaniah⁸⁵ (yang semakin terdesak akibat berbagai kekalahan perang atau terus terancam oleh serbuan militer sejumlah Negara Eropa) melalui pemberitaan media-media pers yang sering bombastis, emosional dan agresif terhadap sejumlah kekuatan Eropa yang dinilai mengancam kekhalifahan Islam atau yang menindas Dunia Islam, tak terkecuali Kerajaan Belanda (yang relatif tidak mengancam kekhalifahan)⁸⁶.

Keberadaan media-media pers seperti itu ternyata juga menjadikan Belanda sebagai sasaran bulan-bulanan pemberitaan yang menyudutkan dan merusakkan citra Belanda di mata Pemerintah Usmaniah atau publik Timur-tengah. Aksi-aksi pers tersebut mulai terlihat pada sepuluh tahun terakhir abad ke 19. Maka jadilah pada masa ini masa paling menjengkelkan dan melelahkan bagi Pemerintah Belanda dalam usaha menangkis atau mengantisipasi kemungkinan dampak buruk akibat pemberitaan “kasar” tersebut bagi stabilitas koloni Muslim mereka. Dalam hal

⁸⁵Harun Nasution(Ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993) Jilid III, Hal. 880-881

⁸⁶ George Lenczowski, op.cit. Hal. 35-38

ini ada beberapa nama media pers berupa majalah dan Koran di Timur-tengah yang sering tampil sebagai pengkritik (penfitnah menurut Belanda) terhadap berbagai kebijakan dan perilaku Penguasa Belanda kepada penduduk Muslim di nusantara. Di antaranya adalah *Ma'lumat*, *Tsamarat al-Funiin*, *Sabāh*, *al-Mu'ayyad*, '*Alam al-Islam*, *al-Liwa*', *Servet*, *Hilal*, *Misbāh asy-Syarq*. Sesekali ada lagi nama lain yang ikut melakukan hal sama yaitu *Tercuman-i haqiqat*, *ar-Ra'y at-'Amm*, *Sirāt al- Mustaqim*, *Yeñi Gazete*, *Mufid*, *Beyanu i-hakk*, *Le Moniteur Oriental*, *Ikdam*, dan *Sabil ar-Rasyād*.

Menurut Jan Schmidt dalam tulisannya *Through the Legation Window, 1876-1926*, bahwa koran Usmaniah pertama yang secara sistematis mengecam kebijakan kolonial Belanda adalah mingguan Beirut *Tsamarat al-Funiin* (secara harfiah berarti intisari pengetahuan). Menurut konsul-jenderal Hummel, editornya seorang bernama 'Abdulqādir Efendi al-Kabani yang dikenal sebagai "Muslim yang fanatik". Pada 20 September 1897, koran itu melaporkan bahwa semua berita tentang perang Usmaniah-Yunani dilarang diberitakan di "Jawa" sehingga kemenangan tentara Islam tidak diketahui oleh kaum Muslimin Hindia-Belanda; kegiatan yang menyangkut pengumpulan uang untuk membantu perang Usmaniah, katanya, juga dilarang⁸⁷.

Tiga bulan kemudian, dari 15 Desember, berita ini diikuti dengan serangkaian artikel mengenai ketidakadilan yang dihadapi Muslim, terutama Arab Hindia-Belanda. Dalam terbitan no. 1163 (26 Februari 1898), Belanda dituduh oleh koresponden *Tsamarat al-Funiin* di Singapura (seorang bernama as-Sayyid Saifuddin al-Yamani) bertindak sebagai "tiran tiada taranya": dia menggambarkan pelecehan dan perlakuan tidak adil terhadap orang-orang Arab, padahal mereka adalah warga Usmaniah!, yang sering dengan sia-sia mencoba masuk negeri ini dari Singapura. Setelah mendapat izin untuk melanjutkan perjalanan, mereka mendapat tekanan dan para *wijkmeester* Arab lokal, padahal fakta

⁸⁷ Nico J. G. Kaptein, *Kekacauan dan kerusuhan Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan belas dan Awal Abad Kedua puluh*, (Jakarta: INIS, 2003), Hal. 141-159

sejarah menunjukkan bahwa orang Arab sudah tinggal di kepulauan ini selama tujuh abad, tetapi diusir dan sebagian besar wilayahnya karena kegiatan misionaris Kristen⁸⁸.

Koresponden ini juga menyebutkan bahwa orang-orang Cina Muslim juga dilarang melakukan kewajiban agamanya oleh *wijkmeester* Cina, dan bahkan ada yang dipenjara karena mencukur rambutnya. Tidak heran jika kaum Muslimin mencintai khalifahnyanya, satu-satunya yang bisa menjamin hak-hak Muslim! Dalam edisi berikutnya (no. 1165), digambarkan bagaimana orang-orang Arab mengadukan keadaan mereka kepada konsul Usmaniah. Pada bulan berikutnya, April 1898, edisi no. 1177 jurnal itu melaporkan bagaimana para peziarah diperas oleh syekh Arab yang mengurus perjalanan mereka, bagaimana berjubelnya tempat mereka di kapal⁸⁹, juga tentang pemerasan oleh kadi mereka seorang kadi pemeras berasal dari Bandung, dan mengenai penjualan karcis palsu oleh seorang pengusaha Belanda⁹⁰.

Meskipun diketahui bahwa duta besar Rusia dan Perancis telah mengajukan protes mengenai publikasi yang tidak bersahabat di Porte, duta Rusia, misalnya, telah menyita koran istanbul berbahasa Perancis, *Servet*. Pemerintah Belanda pada mulanya tidak mau mengambil langkah yang sama, juga karena informasi yang dimuat dalam artikel yang disebutkan di atas memang, sayangnya, sebagian ada benarnya. Duta Belanda, Van der Staal van Piershil, mendesak agar tulisan yang membahayakan ditindak, dengan alasan bahwa kalau di suatu negara ada sensor resmi, maka pemerintah negara itu bisa dimintai pertanggungjawaban untuk terbitan yang muncul di negara itu. Namun, menteri luar negeri tidak bisa menerima, alasannya penyensoran adalah pasif, tidak aktif. Penyensoran paling banyak membiarkan penerbitan suatu tulisan, tetapi tidak mendukungnya, Apalagi, Nederland tidak mengenal sensor dan mungkin khawatir kalau pemerintah Usmaniah akan menuntut agar terbitan Belanda yang mengecam kekhlifahan juga dikenai tindakan balasan⁹¹.

⁸⁸ *Ibid*,

⁸⁹ Dick Douwes dan Nico Kaptein, *Loc.cit*

⁹⁰ *Ibid*, Hal. 142

⁹¹ *Ibid*.

Lalu pada edisi 1216 tanggal 23 Januari 1899, *Tsamarat al-Funiin* membahas lagi perlakuan tidak adil terhadap penduduk Muslim dan melaporkan bahwa kedua konsul Kamil dan Emin Bey diperintahkan untuk memberi tahu sultan tentang hal adanya sikap Belanda ini. Selain itu koran ini juga tidak sungkan membeberkan info pribadi yang cukup mempermalukan Kerajaan Belanda. Seperti dalam edisi 1358 pada 2 Desember 1901, di mana *Tsamarat al-Funiin* memberitakan bahwa Ratu Wilhelmina mengalami keguguran karena dipukul suaminya (Pangeran Hendrik) setelah terjadi pertengkaran hebat antara suami-istri itu mengenai utang sang suami yang besar jumlahnya. Masalahnya adalah, ini terjadi di negara yang membanggakan diri sebagai bagian dari dunia Barat yang berperadaban tinggi. (Berita ini berasal dan Reuter yang juga diterbitkan di Negeri Belanda yang kemudian dikutip oleh sejumlah surat kabar di Lebanon, Syria dan Mesir)⁹².

Serangkaian serangan *Tsamarat al-Funiin* terhadap kolonialisme Belanda terus berlanjut meski selalu mendapat protes dan permintaan sensor pihak diplomat Belanda di Istanbul. Di antara pemberitaan yang diangkat oleh koran ini adalah pada edisi 1260, bulan Agustus 1899, yang menerbitkan artikel tentang ketidakadilan di Hindia-Belanda terhadap masyarakat etnis Arab oleh penguasa Belanda. Mereka mencontohkan mengenai kasus perlakuan tidak adil terhadap Syekh Sa'id Bagazi yang didenda f25,- karena bepergian tanpa izin dari Batavia ke Meester Cornelis (perjalanan yang hanya makan waktu setengah jam); dia juga dilarang turun di tempat tujuannya -dan peran dari seorang keturunan Hadhramaut yang bekerja sama dengan Pemerintah kolonial Belanda dan dicap pengkhianat yaitu Sayyid 'Usmān. Persoalan ini sebelumnya sempat diekspos *Ma'lumat*⁹³.

Berbagai pemberitaan *Tsamarat al-Funiin* yang merintis pemberitaan negatif terhadap Belanda di Timur-tengah di atas sudah cukup membuat Belanda meradang dan protes. Tetapi aksi

⁹² *Ibid*, Hal. 148-149

⁹³ *Ibid*, Hal. 144

Tsamarat al-Funūn ini rupanya bisa dikatakan pemanasan dan awal mula dari kemarahan Belanda yang sesungguhnya. Karena belakangan, muncul media pers lain yang terkenal sangat agresif dalam memojokkan Belanda di mata publik Timur-tengah dan parahnya lagi, surat kabar tersebut, tersebar dan populer hingga ke Singapura dan Hindia Belanda sendiri. Nama surat kabar tersebut adalah *Ma'lumat*. *Ma'lumat* dalam studi ini menjadi istimewa karena merupakan koran yang paling sering dibaca dan ditentang oleh salah seorang penasehat Pemerintah kolonial Belanda terkenal yaitu Snouck Hurgronje selama dan sesudah masa jabatannya (1889-1936). Itu berarti menjadi salah satu rujukan terpenting yang mengilhami jenis nasehat yang ia berikan kepada Pemerintah kolonial Belanda⁹⁴.

Di antara beberapa pemberitaan Koran *Ma'lumat* yang mengusik kemarahan Pemerintah Belanda adalah edisi tanggal 8 Desember 1898, yang menyiarkan berita bahwa pemerintah kolonial, antara lain, melarang dibukanya sekolah Muslim dan kegiatan pengajian Quran dan bahwa pemimpin pribumi hanya diangkat di provinsi tertentu untuk mengeksploitasi penduduk asli. Pada salah satu edisi 1898, dilaporkan bahwa *Ma'lumat* memuat berita perihal pejabat Belanda yang memaksa penduduk lokal untuk menjual anak perempuannya kepada orang-orang Belanda sebagai gundik. Kemudian pada Bulan Januari 1900, *Ma'lumat* mengecam lagi hukum yang tidak adil mengenai perpindahan dan menetapnya “orang timur asing”, mengutuk pemberian izin kepada orang Cina untuk membangun “rumah berhala” di daerah Arab di Batavia. Di samping itu edisi ini juga memberi ulasan seputar Perang Aceh⁹⁵. Perang ini terkenal akan kejadian aneka kekejaman militer Belanda terhadap penduduk Aceh.

Lalu pada edisi 22 Februari 1900, *Ma'lumat* melaporkan bahwa 35.000 Muslim Hindia-Belanda telah memohon kewarganegaraan Usmaniah, dan mendesak Belanda untuk

⁹⁴ *Ibid*, Hal. 142-143

⁹⁵ *Ibid*, Hal. 144-145, Perihal pergundikan orang Belanda dengan perempuan pribumi memang benar adanya, lihat, Reggie Baay, *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*, Terj, Siti Hertini Adiwoso, Judul asli, 'De Njai; Het Concubinaat Nederland-Indie (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010)

menghormati kebebasan beragama, mengizinkan perayaan ulang tahun perak ‘Abdulhamid, dan menghapus undang-undang “apartheid” untuk orang Arab. Berita ini juga diekspos oleh surat kabar lainnya yaitu *Servet*.

Selain Tsamarat al-Funin dan Ma’lumat terdapat juga surat kabar lain di Istanbul yang walaupun tidak segenar keduanya, tetapi tidak kalah tajam dalam mengkritisi keadaan penduduk Muslim di Hindia-Belanda. Di antaranya adalah *Servet*, *Sabah* dan *Tercuman-i haqiqat*. *Servet* umpamanya dalam edisi 17 Januari 1899, memuat artikel perihal dunia pendidikan penduduk Muslim yang sangat memprihatinkan di bawah Pemerintah kolonial Belanda. Penulis artikel ini mengajukan alasan bahwa sistem kolonial di Hindia-Belanda tidak memungkinkan kaum Muslimin ikut serta dalam kemajuan secara materi dan budaya. Publikasi ini tentu sangat memojokkan pihak Kerajaan Belanda yang mengklaim sebagai bangsa berperadaban dan terhormat tetapi tidak mengacuhkan pendidikan penduduk jajahan dan hanya mengurus kekayaan buminya⁹⁶.

Pada bulan Maret 1899, *Servet* kembali mengangkat topik seputar ketidakadilan yang dipraktekkan Pemerintah kolonial Belanda di nusantara. Kali ini masalah yang diangkat adalah tentang adanya diskriminasi Hukum antara pemukim golongan Eropa dengan penduduk pribumi. Lalu Pada 22 Februari 1900, *Servet* sebagaimana halnya *Ma’lumat* juga melaporkan adanya 35.000 Muslim Hindia-Belanda yang memohon kewarganegaraan Usmaniah, dan menenuntut Belanda untuk toleran dalam beragama, mengizinkan perayaan ulang tahun perak ‘Abdulhamid, dan menghapus undang-undang untuk orang Arab yang dicap rasis⁹⁷.

Surat kabar lain seperti *Sabāh*, edisi 10 Februari 1899, memaparkan adanya perlakuan buruk terhadap penduduk kepulauan nusantara oleh penguasa Belanda dan juga dipaparkan meletusnya pemberontakan yang terjadi pada awal abad itu.

⁹⁶ *Ibid*, Hal. 144

⁹⁷ *Ibid*, Hal. 145

Beberapa hari kemudian, koran itu, sambil memberitakan tentang undangan kepada pelajar Jawa untuk belajar di Istanbul, menyebut lagi tentang perlakuan pelecehan terhadap Muslim Hindia Belanda. Berita koran ini seolah menunjukkan sikap prihatin dan sindiran yang ditujukan kepada pihak Belanda atas ketidakpedulian yang mereka praktekkan di sana⁹⁸.

Tercuman-i Haqiqat, surat kabar Istanbul yang populer, tanggal 2 Agustus 1906 (no. 9094) memuat berita, antara lain, bahwa mesjid di daerah Arab di Batavia telah dibangun kembali; pemugarannya didanai oleh masyarakat setempat, terutama oleh “warga Usmaniah” Sayyid ‘Abdullāh bin Husain al-Aydarus yang menyumbang TL 5000. Akhirnya, *tugra* kekhalifahan telah dipasang pada dindingnya. Sekilas berita ini tidak ada yang istimewa. Tetapi adanya ungkapan “dibangun kembali” menunjukkan bahwa ada persoalan sebelumnya dalam usaha membangun mesjid itu. Persoalan dimaksud tentu mengarah kepada tekanan penguasa Belanda di sana. Begitu pula ungkapan “akhirnya” dalam pemasangan *tugra* kekhalifahan menunjukkan bahwa juga terjadi ganjalan dalam.⁹⁹

Beberapa yang kurang begitu dikenal juga ikut ambil bagian dalam publikasi opini kritis terhadap praktek penjajahan Belanda di nusantara. Di antaranya adalah *Beyanu i-Hakk*, sebuah Terbitan Istanbul yang dikenal moderat dalam beragama (diterbitkan oleh *Cem‘iyet-i ilmiyet-I iskamiye*, “Masyarakat Pembelajaran Islam”, antara tahun 1908 dan 1912 dan dipimpin oleh Mustafa Sabri) menerbitkan serangkaian tulisan tentang Hindia-Belanda pada bulan Maret 1909 (dalam edisi I dan 8 Maret). Temanya adalah *kecintaan orang “Jawa” terhadap khalifah; perbudakan penduduk oleh pemerintah Belanda yang bersifat represif; kurangnya sekolah (hal ini telah dilaporkan dua puluh tahun sebelumnya oleh Adil Efendi, seorang “insinyur Belanda” yang masuk Islam) dan larangan untuk memulai lagi*

⁹⁸ *Ibid*, Hal. 144

⁹⁹ *Ibid*, Hal. 149

sekolah-sekolah itu baru dikendurkan karena tekanan para haji yang kembali; larangan belajar bahasa Belanda; perlakuan buruk terhadap para pelajar yang kembali dari Istanbul; gangguan terhadap kaum Muslimin oleh 200 misionaris yang hanya berhasil mengalihimankan “pemuja api” setempat.¹⁰⁰

Selain itu, Koran berbahasa asing tidak ketinggalan berperilaku sama. Contohnya, koran Istanbul berbahasa Perancis, *Le Moniteur Oriental*. Pada edisi 8 Oktober 1898, Koran ini mengulas tentang krisis diplomatik Usmaniah-Belanda sesudah orang-orang Muslim Hindia-Belanda meminta kewarganegaraan Usmaniah. Semua media pers yang dikutip di atas merupakan surat kabar-surat kabar yang terbit di Istanbul dan sekitarnya, atau yang dekat dengan pusat pemerintahan Usmaniah. Namun komunitas pers di Istanbul atau Usmaniah tidak sendirian dalam kegiatan ini. Salah pers di satu kawasan terpenting dan dinamis di Timur-tengah yaitu Mesir, juga tidak kalah gencar dalam memberitakan nasib penduduk Muslim di nusantara atau menyerang Pemerintahan kolonial Belanda di sana. Di antara surat kabar Mesir tersebut adalah *al-Mu‘ayyad*, *al-Liwā’*, ‘*Alam al-Islam*, *Misbāh asy-Syarq*, *ar-Ra‘y at-‘Amm*, *Mufid*. Surat kabar *al-Mu‘ayyad* yang terbit di Kairo berkali-kali menerbitkan berita yang berisi praktek-praktek penindasan dan ketidakadilan Pemerintah kolonial Belanda terhadap Umat Islam di Nusantara. Di antaranya adalah *al-Mu‘ayyad*, edisi 12 Februari 1896 yang berisi kecaman terhadap sejumlah individu Muslim yang dituding berkolaborasi dengan Pemerintah Belanda dengan julukan pengkhianat. Contoh yang paling terkenal adalah Sayyid ‘Usmān dari keturunan Hadhramaut¹⁰¹.

Dalam edisi 5 September 1899 *al-Mu‘ayyad* mengekspos adanya penindasan terhadap pendidikan agama Islam dan pembacaan Quran. Sebelumnya pada bulan April koran ini

¹⁰⁰ *Ibid*, Hal. 153

¹⁰¹ *Ibid*, Hal. 150

memuat artikel perihal kekasaran dan ketidakadilan pemerintahan kolonial Belanda yang luar biasa¹⁰². Pada edisi Februari 1908 *al-Mu'ayyad* membeberkan adanya kebijakan Belanda yang membiarkan penduduk pribumi di Hindia-Belanda tetap bodoh. Pada edisi 5 September 1899 *al-Mu'ayyad* memaparkan praktek Standar “ganda” yang diberlakukan oleh Pemerintah kolonial Belanda yang resmi yang menjadikan orang Arab di Hindia-Belanda sebagai warga negara kelas tiga. Masalah ini kembali diangkat *al-Mu'ayyad* pada edisi 17 Agustus 1907 dan Februari 1908. Koran ini juga menyorot persoalan ekonomi yang timpang di Hindia. Di antaranya perihal adanya eksploitasi ekonomis yang menindas buruh pribumi yang dikemukakan *al-Mu'ayyad* edisi 17 Agustus 1907¹⁰³.

Koran Mesir lain seperti *al-Liwa'* juga tak kalah tajam dalam pemberitaan seputar nasib kaum Muslim di nusantara. Seperti pada edisi 21 Mei 1904. *al-Liwā'* melaporkan tentang perlakuan buruk polisi terhadap tujuh pelajar Asiret yang menolak memakai pakaian yang diwajibkan untuk orang Arab. Kambing hitamnya tentu saja Snouck Hurgronje. Koran ini, pada 21 September 1904, melanjutkan serangannya terhadap Snouck, menuduh dia dengan niat buruk memperkenalkan pikiran materialistis kepada kaum Muslimin, merencanakan mengusir semua orang Arab dan Jawa, dan melarang ibadah haji ke kota-kota suci Islam.

Al-Liwā' (seperti halnya *Servet* dan *al-Mu'ayyad*) juga tidak ketinggalan menyorot persoalan dunia pendidikan yang sangat menyedihkan di jajahan Belanda ini. Mereka menuding bahwa merupakan kebijakan Belanda yang membiarkan penduduk pribumi di Hindia-Belanda tetap bodoh. Pembahasan tentang topik ini dikemukakan dalam beberapa edisi *al-Liwā'*, yaitu edisi 21 Mei

¹⁰² Hamid Algadri, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1988) Hal. 90

¹⁰³ *Ibid*, Hal. 151

1904; 12 Maret 1906; 4 Mei 1912. *al-Liwā'* memuat pula adanya aksi penumpasan Pemerintahan kolonial Belanda terhadap gerakan pemberontakan penduduk lokal di suatu kota di nusantara. *al-Liwā'* menilai bahwa pemberontakan yang dikobarkan sejumlah orang tersebut memang sudah sepatutnya terjadi karena mereka begitu amarah atas ketidakadilan yang mereka derita oleh penguasa kolonial¹⁰⁴.

Dalam beberapa artikelnya *al-Liwā'* mengulas perihal konsul Usmaniah di nusantara. Di antaranya artikel yang mengkritik perhatian para konsul Usmaniah terhadap Umat Islam di nusantara yang dinilai lamban. surat kabar ini mengusulkan perlunya lebih banyak konsulat Usmaniah di Nusantara, seperti dalam edisi 4 Mei 1912. Terkadang *al-Liwā'* juga mengamati tentang opini orang-orang di koloni Belanda ini terhadap Kekhalifahan Usmaniah. Menurut surat kabar Mesir ini Belanda berusaha menghilangkan nama besar Kekhalifahan Usmaniah di mata Umat Islam nusantara. Di antaranya adalah dengan merakayasa pemberitaan tentang Kekhalifahan dengan merendahkan dan menyembunyikan prestasi-prestasi militernya dari pemberitaan (edisi 28 Mei 1906), atau terkadang menerbitkan berbagai artikel media dan materi pengajaran sekolah yang berusaha mengecilkan status dan peranan Kekhalifahan di mata penduduk Muslim nusantara (edisi 17 Agustus 1907)¹⁰⁵.

B. Reaksi Pemerintah Hindia Belanda Menghadapi Serangan Pers Timur Tengah

Dalam berbagai karya tulis, buku-buku dan penelitian tentang kebijakan pemerintahan di era kolonial Belanda, umumnya mengemukakan adanya perubahan drastis kebijakan penguasa Hindia-Belanda terhadap penduduk jajahan pada umumnya dan

¹⁰⁴ *Ibid*, Hal. 150-152, Tulisan *al-Liwa'* ini nampaknya merujuk pada kejadian bentrok antara Kiai Hasan Mukmin dari Gedangan dengan pihak kepolisian Belanda, yang mengeluhkan kebijakan Penguasa Belanda dalam tanam paksa dan aturan memberatkan lainnya. Sartono Kartodirjo, *Ratu Adil*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992) Hal.74-75

¹⁰⁵ *Ibid*, Hal. 151

penduduk muslim pada khususnya. Perubahan itu diketahui terjadi pada permulaan abad ke 20. Salah satu bentuk perubahan tersebut diwujudkan dengan diluncurkannya kebijakan Politik Etis atau politik balas budi. Perubahan kebijakan Belanda dengan Politik Etisnya ini menjadi pembahasan khusus dan panjang lebar dalam penulisan sejarah nasional. Dalam pembahasan selalu dikemukakan latar belakang munculnya ide atau dorongan untuk melakukan perubahan besar tersebut. Kemudian pembicaraan selanjutnya selalu memaparkan bentuk-bentuk program yang diberlakukan, praktek pelaksanaannya di lapangan, dampak yang ditimbulkan.

Dalam episode penting dalam sejarah nasional ini, peneliti menaruh perhatian khusus perihal faktor atau ide pendorong munculnya program perubahan kebijakannya ini. Pendapat yang populer terkait dengan faktor pendorong dari perubahan tersebut adalah merujuk kepada pemikiran seorang tokoh Belanda bernama van Deventer. Selain itu dipicu pula oleh tekanan publik. Kasus paling terkenal dalam hal ini adalah terbitnya karya sastra kritis yang ditulis oleh Douwes Dekker¹⁰⁶. Tapi tidak ada disinggung sedikitpun adanya pengaruh lain khususnya dari publik dunia Muslim sendiri.

Cara penyajian informasi sejarah seperti ini tentu sangat cacat karena adanya pengabaian aspek lain atau kekuatan sejarah lain yang seolah dinafikan perannya. Keadaan demikian menjadikan suatu penyampaian sebuah peristiwa sejarah kurang akurat, cenderung subjektif dan berpotensi menutupi akar persoalan sebenarnya yang merupakan bagian penting dalam mempelajari sejarah. Terlebih lagi dalam kasus perubahan sikap Belanda dan politik etis ini merupakan salah satu pembahasan terpenting dalam sejarah modern nasional serta dicantumkan dalam buku-buku pelajaran atau diajarkan kepada siswa-siswa sekolah¹⁰⁷.

Selain itu, kesan pengabaian ini terkadang memicu prasangka negatif yang terasa agak bisa dan sentiment. Seperti

¹⁰⁶ Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Tim penerjemah Serambi, (Jakarta: Serambi, 2008) Hal.

¹⁰⁷ Adrian Vickers, *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Arif MAftuhin, Judul Asli, 'A History of Modern Indonesia, (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), 24-26

dugaan adanya usaha dari kalangan yang berhaluan nasionalis atau sekularis untuk mengecilkan peranan Islam dalam kancah sejarah nasional melalui intervensi penyusunan buku-buku sejarah. (Tapi itu bukan pula berarti penelitian ini bermaksud usaha untuk menonjolkan peranan Islam dalam sejarah nasional yang tentu menjurus emosional dan apologis, keluar dari spirit/filosofi penelitian ilmiah).

Maka dalam bagian ini peneliti akan memaparkan dugaan adanya pengaruh pers Timur-tengah terhadap kebijakan penguasa Hindia Belanda di nusantara terutama pada permulaan abad ke 20 yang dikenal dimulainya era pergerakan nasionalisme. Untuk mengulas masalah ini peneliti memulai dengan memaparkan sejumlah pertanyaan, yaitu; apakah memang ada pengaruh tekanan media pers dari Timur-tengah terhadap penguasa Hindia Belanda dalam memperlakukan Umat Islam di nusantara? Apa bukti yang mengindikasikan hal tersebut? Kalau diketahui ada, apakah semuanya, atau beberapa saja di antaranya? Kalau diketahui sebagian dari kebijakan tersebut, aspek manakah kebijakan Belanda (yang berasal dari tekanan) tersebut yang paling dominan?

Untuk pertanyaan pertama, peneliti dapat menemukannya dari dokumen pemerintah kolonial Belanda yang telah dipublikasikan yaitu *Amblijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936* yang disusun oleh E. Gobebe dan C. Adrianse. Dari dokumen tersebut terdapat sejumlah nasehat atau rekomendasi dari pejabat urusan Islam dan pribumi yaitu Snouck Hurgronje. Dari sekian banyak nasehat-nasehat yang ia ajukan kepada pemerintah pemerintah kolonial Belanda, terdapat sejumlah indikasi bahwa pemerintah Hindia-Belanda merasa sangat terganggu oleh pemberitaan pers dari Turki dan Mesir yang memojokkan perilaku pemerintah Belanda terhadap penduduk muslim di nusantara.

Dalam menelusuri indikasi pengaruh pers Timur-tengah atas kebijakan Pemerintah kolonial Belanda, peneliti menemukannya dalam dua pola, yaitu berupa reaksi langsung dari petinggi Belanda dan Reaksi tidak langsung.

1. Reaksi Langsung

Pemerintah kolonial Belanda di nusantara menganggap pemberitaan dari pers Timur-tengah sudah kelewatan batas dengan topik-topik berita yang menghasud, provokatif dan fitnah. Maka dalam menghadapi serangan pers seperti ini Belanda melakukan sejumlah program dan kebijakan dalam rangka mengantisipasi, menangkis atau menyiasati kemungkinan yang berpotensi dapat mengancam dari pemberitaan pers tersebut terhadap penduduk nusantara yang Muslim. Berikut ini beberapa kegiatan yang buat dalam pola ini:

a. Pembantuan tim Khusus Pemantau dan Peyelidik surat kabar-surat kabar Timur-tengah

Pemerintah Belanda melatih calon pegawai untuk kedudukan wakil penerjemah, baik dalam bahasa Turki maupun Arab untuk kedutaan di Istanbul yang sudah harus mulai bekerja sekitar tahun 1907. Pada mulanya ditunjuklah sosok pakar hukum bernama Van Oordt yang sedang bertugas di Kairo. Meskipun dia sibuk sebagai ahli hukum, pekerjaan intelijennya, yang juga mencakup pers Usmaniah, harus berjalan dan dia harus mengirim laporan ke kedutaan di Istanbul, yang selanjutnya diteruskan ke Kementerian Luar Negeri di Den Haag. Van Oordt siap menerima penunjukan ini, dan minta gaji £20 per bulan ditambah £50 untuk biaya berlangganan majalah. Dia diangkat dengan Keputusan Diraja pada 7 Maret 1905, sebagai ahli hukum penasihat, "*raadgevend advocaat*" (supaya tidak menarik perhatian/dicurigai Pemerintah Usmaniyah), di konsulat jenderal di Kairo dengan gaji f3000 per tahun¹⁰⁸.

Van Oordt mulai kegiatannya sebagai pengamat "pers Pan-Islam" di Mesir, negara-negara Arab, terutama Hijaz, dan

¹⁰⁸ Nico J. G. Kaptein, *Loc.cit*

Kekhalifahan Usmaniyah, pada bulan Februari 1905. Untuk membantu pekerjaannya, dia berlangganan sejumlah besar koran dan majalah lokal. Dia juga berusaha agar harian *Sabah* dari Istanbul dikirim secara teratur kepadanya. Tetapi rupanya kedutaan Belanda di Istanbul menolak membantu dia mendapatkan Koran-koran Usmaniah¹⁰⁹. Adanya kebijakan unik ini ternyata berasal dari nasehat Pemerintah Belanda di Batavia Hindia-Belanda. Dalam sebuah surat rahsia kepada Gubernur Jendral, Snouck Hurgronje mendesak ...

Agar merekrut pejabat-pejabat yang cakap dalam tugasnya dan yang mengetahui studi ketimuran, hendaknya diminya nasehat kepada Fakultas Sastra Universitas Leiden, khususnya kepada guru besar Bahasa Arab. Andaikan supaya tujuan yang dimaksud lebih disukai, hendaknya diciptakan jabatan khusus di luar jabatan-jabatan yang ada, yang tidak hanya terbatas sebagai jabatan penasihat untuk urusan pers Muhammadiyah (orang Islam) saja. Tetapi, bagi pejabat yang baru diangkat itu, harus ditetapkan berbagai sarana penelitian terus menerus tentang kehidupan dan cita-cita Islam pada zaman kita dalam ukuran sepenuhnya, sebagaimana antara lain yang terungkap dalam pers Pan-Islam¹¹⁰.

Sebelumnya, dalam surat yang sama Snouck Hurgronje mengingatkan para petinggi Belanda agar jangan kalah dengan para diplomat atau konsul Inggris dan Jerman di Istanbul yang bukan seorang birokrat tetapi juga figur ilmuan di bidang ketimuran (orientalis). Caranya yaitu,

Dengan menganjurkan syarat bagi salah seorang atau lebih di kalangan wakil diplomatik atau konsuler kita di Turki, agar membekali tugas mereka dengan jalan studi ketimuran. Hal ini menjadikan para pejabat tersebut memiliki kemampuan

¹⁰⁹ *Ibid*, Hal. 132-133

¹¹⁰ E, Gobe, dan Adrianse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Terj. Sukarsi, Judul asli 'Amblijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936' (Jakarta: INIS, 1994) Jilid. IX Hal. 1785

dalam memantau dan melaporkan aktivitas gerakan Islam kepada pemerintah pusat, tetapi juga bisa juga memikul tugas-tugas lain¹¹¹.

Saran dari Snouck Hurgronje ini seolah diperkuat dengan adanya kejadian di Istanbul bahwa seorang bangsawan kesultanan Kutai, Pangeran Sosronegoro yang berkunjung ke ibukota Kekhalifahan Usmaniah dan pusat kegiatan Pan-Islam yang amat dibenci Pemerintah Belanda. Tetapi, karena para konsul atau diplomat Belanda di sana tidak pandai Bahasa Melayu atau Arab, maka tidak ada tindakan yang bisa mereka lakukan, maka

Dari laporan yang diberikan oleh saudara Sultan Kutai mengenai kunjungannya ke Konstantinople(Istanbul), tampak lagi dengan gambang betapa mutlak perlunya bagi kedutaan Belanda di sana memiliki tenaga-tenaga yang tahu dengan baik masalah agama Mohammadan pada umumnya dan agama Mohammadan di Hindia-Belanda pada khususnya¹¹².

Nasehat dan pembuktian Snouck Hurgronje ini memang dituruti oleh Pemerintah Belanda dengan penugasan Van Oordt tadi. Namun pada tahap awal program ini menemui banyak masalah. Dimulai laporan Van Oordt yang pertama tertanggal 12 Februari 1905, mengenai tulisan dalam sebuah jurnal berbahasa Perancis yang tidak dibaca banyak orang, *Arafate*, diterbitkan di Kairo, tidak diterima dengan baik. Begitu pula laporan yang kedua, mencakup periode Juni-Oktober 1905 (tugasnya resmi mulai 1 Juni), berisi terjemahan fragmen dari mingguan '*Alam al-Islam*, yang dia selesaikan pada 1 November, tetapi baru dikirim dari Pera(distrik dekat Istanbul) oleh Van Bylandt pada 14 November. Kedua laporan itu dikecam keras oleh Snouck Hurgronje (yang menerimanya melalui gubernur-jenderal. Menurut Snouck:

¹¹¹ *Ibid*, Hal. 1784

¹¹² *Ibid*, Hal. 1889

Isi yang lugas dalam laporan Mr. Van Oordt, kecil artinya. Sekalipun yang terpenting adalah oleh pers harian Mesir diterbitkan sebuah karangan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab dari sebuah majalah Eropa, dengan berbagai catatan kecil, yang disajikan kepada pembaca Mesir. Karangan tersebut sama sekali tidak mempunyai arti untuk penggambaran gerakan Pan-Islam dan juga dari setiap seginya yang dikemukakan dalam laporan itu, yaitu gerakan yang mandiri dari Sultan di Istanbul, tidak ada yang benar-benar keluar dari otak seorang penulis Eropa yang menulis dalam majalah bergengsi semacam Revue Internationale d'economie¹¹³.

Meskipun pemerintah mengharapkan laporan bulanan, seperti disarankan oleh Van Oordt sendiri, ternyata kewajiban ini sulit dipenuhi. Lapornya yang ketiga (terdiri atas dua terjemahan fragmen artikel koran) siap pada 13 April 1906. Tahun berikutnya dia mengalami kesulitan menyusun laporannya pada Januari 1907. Bagian pertama esainya mencakup masa Oktober 1905 sampai Oktober 1906, baru dikirimkan dari Istanbul pada 9 Februari 1907. Laporan ini mendapat kritik tajam lagi dari Snouck Hurgronje karena terlambat lima belas bulan dari apa yang digambarkan, dan ini pun sesudah berulang kali diminta. Yang lebih parah adalah bahwa tampaknya Van Oordt tidak memahami esensi Pan-Islamisme¹¹⁴.

Esai kedua yang lebih umum, tentang Jepang dan Islam, dikirim dari Pera pada bulan Juni 1907, bab kedua dan surveinya tahun 1905-1906, dikirim pada 17 Juni. Snouck Hurgronje mengecam sang pengawas yang dikatakan tidak mempunyai "rasa kritis". Persetujuan Van Oordt untuk menganggap khalifah di Istanbul sebagai kepala semua orang

¹¹³ *Ibid*, Hal. 1805

¹¹⁴ Nico J. G. Kaptein, Loc.cit

Muslim dalam arti agama, sangat tidak bisa diterima dan sangat berbahaya; dan yang lebih parah lagi, penguasaan bahasa Arabnya jelas kurang. Menurut Snouck;

Kekurangcakapan para wakil Belanda di negeri-negeri Mohammadan (orang Islam), menjadi beban bagi seorang pakar seperti Van Oordt untuk melakukan segala pengawasan seperlunya terhadap pers Pan-Islam yang berbahasa Arab maupun Turki. Karena pengawasan baru dimulai serba sedikit, maka berkaitan dengan hal-hal tersebut mudah dipahami, mengapa tidak seyogyanya peneliti ini disuruh berkelana di kawasan Islam yang tidak ada persnya. Bagi kita pengamatan atas wilayah itu tidak akan pernah menimbulkan keberatan¹¹⁵.

Pada tahap berikutnya, Van Oordt hanya mengirim terjemahan sebuah artikel dari ‘*Alam al-Islam*, pada 12 Maret 1908, itupun dalam keadaan terlambat. Keterlambatan ini, katanya, disebabkan catatan dan bukunya dikirim dari Belanda dengan kapal. Meskipun demikian, sejak akhir 1907 dan selanjutnya, petikan artikel dan survei pers (mencakup September-Januari 1907-08, dan sembilan laporan untuk bulan Februari dan Oktober 1908) dikirim lebih teratur. Tetapi isinya merupakan campuran segala macam fakta, opini tentang perkembangan politik internasional, dengan tambahan komentar dan nasihat. Snouck Hurgronje melihat sebagai laporan berisi data yang sudah diketahui dari pers internasional, yang kaitannya tidak jelas¹¹⁶.

Kurangnya kepahaman cendekia Van Oordt, kinerjanya yang tidak teratur dan kurangnya kerja sama dan koordinasi dalam dinas diplomatik, memudahkan untuk menyatakan bahwa Van Oordt gagal dalam tugasnya. Sementara itu, sesuai rencana semula, penerjemah kedua

¹¹⁵E. Gobe, dan Adrianse, *Op.cit*, Hal. 1806-1807

¹¹⁶ Nico J. G. Kaptein, *Op.cit*, Hal. 135

ditugaskan di kedutaan di Istanbul. Seorang pembantu penerjemah untuk bahasa Arab dan Turki, bernama A.M. Kock, yang mendapat pendidikan di Berlin, ditempatkan di kedutaan Belanda di Istanbul pada Oktober 1906. Tetapi dia sudah cuti dari “dinas sebagai pegawai negeri” setahun kemudian dan mungkin tidak pernah sampai di Istanbul. Selain itu rupanya dia tidak pernah melakukan pekerjaan intelijen). Untuk mengganti dia, kementerian luar negeri pada bulan Oktober 1907 mendekati C.A.H. Van Ophuijsen, yang telah belajar hukum dan bahasa-bahasa Semit di bawah De Goeje dan Snouck Hurgronje di Leiden (yang disebut belakang juga mengajari dia bahasa Turki dasar) dan waktu itu sedang sibuk menyelesaikan tesisnya mengenai hukum di Hindia-Belanda¹¹⁷.

Berbeda dengan Van Oordt, Van Ophuijsen bekerja secara teratur dan berkeahlian, membuat terjemahan dan artikel penting dan menulis laporan bulanan yang cerdas. Tetapi dia segera meragukan kariernya sebagai penerjemah dia mendambakan “karier Hindia-Belanda” yang lebih menguntungkan dan rupanya dia sibuk dengan pekerjaan kedutaan yang bersifat administrative dan kantor, tidak sesuai dengan level keilmuannya. Van Ophuijsen secara definitif pensiun pada November 1912. Mengenai kasus ini Snouck Hurgronje mengeluh, kenapa nasihatnya tidak diperhatikan? Kenapa para pakar ketimuran yang memahami bahasa Arab, Turki dan Melayu dan menguasai “kajian wilayah” menjadi terjerembab dalam pekerjaan administrasi rutin yang tidak ada hubungannya dengan fungsi mereka yang penting, dan kenapa mereka tidak diberi karier dengan hari depan yang lebih menjanjikan dan digaji dengan lebih baik? Pengganti Van Ophuijsen yang diajukan yaitu J.H. Kramers (1891-1951), yang telah belajar hukum dan bahasa timur di

¹¹⁷ *Ibid*, Hal. 137

bawah Snouck di Universitas Leiden. Dia menerima tugas in. Tetapi tidak pernah didapatkan pengganti Van Oordt di Kairo¹¹⁸. Laporan Kramer mendapat sambutan baik dari Snouck Hurgronje yang menganjurkan agar cendekiawan ini diberi semangat untuk melanjutkan kegiatannya¹¹⁹.

Kramer diangkat sebagai dosen untuk bahasa Turki dan Persia di Universitas Leiden pada tahun 1921 dan tampaknya terus menyajikan laporan pers dan koran yang dikirimkan kepadanya di Leiden. Tetapi jauh sebelum itu pelaporan dari Istanbul ke kementerian luar negeri dan ke gubernur jenderal telah terhenti lagi. Atas inisiatif gubernur-jenderal, sekali lagi diusahakan agar dilanjutkan setelah tampak bahwa anggota Sarekat Islam yang Indo-Belanda mencoba menjalin hubungan dengan Republik Turki, terutama dengan ulama yang berkumpul di Ankara pada 1922. Akibatnya, duta di Pera memerintahkan penerjemah sementara, Count de Hochepped, untuk menyelidiki dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan Pan-Islamisme. Ini menghasilkan dua laporan yang sangat dangkal, ditulis pada Februari dan April 1924.

Tetapi pada waktu itu jelas bahwa kekhalifahan, yang dihapus pada Maret 1924, telah menjadi sejarah Berakhirnya kekhalifahan boleh dibilang menghentikan pendokumentasian "Pan-Islam". Namun sebagai catatan disini, dapat diketahui bahwa Belanda sangat serius dan sangat mendalam untuk melakukan pemantauan aktivitas pers di Timur-tengah kala itu, sehingga sampai harus menyiapkan sosok pejabat yang berkualitas ilmuwan besar and dengan didanai secara khusus. Apa yang diperbuat oleh Pemerintah Belanda lebih seratus

¹¹⁸ Nico J. G. Kaptein dan Dick van der Meij, *Delapan Tokoh Belanda bagi Pengkajian Islam Indonesia*, Terj. Theresia Slamet, (Jakarta: INIS, 1995) Hal. 110

¹¹⁹ Nico J. G. Kaptein, *Kekacauan...*, *Op.cit.*, Hal. 139-140

tahun lalu itu rupanya masih ditiru dan menjadi model oleh berbagai Negara-negara Barat hingga kini.

b. Menjalinkan Kerjasama dengan Intelijen Negara Barat yang lain

Namun kegiatan spionase tersebut yang sebenarnya sudah canggih untuk ukuran saat itu, ternyata masih dirasa masih dianggap tertinggal oleh Snouck Hurgronje dibandingkan aktivitas sama yang dilakukan oleh Inggris, Prancis dan Jerman umpamanya. Tentang Kerajaan Jerman (yang tidak punya negeri jajahan berpenduduk muslim), Snouck memberi penilaian khusus dalam suratnya tanggal 8 Agustus 1902, Menurutnya;

Rasanya menyedihkan jika negeri kita yang memiliki nama besar dalam dunia kajian ketimuran (orientalisme) dan hingga kinipun tidak luntur, tetapi banyak orang tahu dari sumber terpercaya bahwa para konsul atau pejabat kedubes Belanda di Turki tidak mampu melakukan pengamatan dan menilai aktivitas pergerakan Islam di sana. Sangat berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Kerajaan Jerman dalam mendesain kerja intelijennya. Salah satunya adalah kondulo mereka di Damaskus bernama Dr. J.G. Wetzstein yang berusia lebih 80 tahun. Ia kemudian digantikan oleh ilmuwan lain bernama Prof.Dr.Hartman. Belakangan Hartman menjadi guru besar Bahasa Arab di Berlin. Di kawasan Timur-tengahlain seperti Beirut konsulnya seorang orientalis Dr. P. Schroder, di Saloniki bditunjuk Dr. J.H. Mordtmann. Adapun di Istanbul sendiri bertugas Dr. H. Gies yang merupakan pakar brilian di bidang bahasa dan Bangsa Turki dan Arab. Dia ditugaskan di sana sebagai penerjemah. Posisi dan kemampuannya itu menjadikan kita merasa perlu untuk meminta bantuannya untuk melakukan pekerjaan kita. Sementara di Kairo terdapat Dr. M. Freiher von Oppenheimer yang melakukan pergerakan Islam di sana. Tampaknya Pemerintah Belanda membutuhkan bantuannya¹²⁰.

¹²⁰ E,Gobee, dan Adrianse, *Op.cit*, Hal. 1783

Lama setelah pandangannya tersebut ia paparkan, tetap tidak mengubah pendiriannya tersebut. Ini tercermin dari bunyi suratnya tujuh tahun kemudian, pada tanggal 9 Februari 1909. Snouck Hurgronje menilai;

Ketika saya tegaskan bahwa negeri Jerman, meskipun sangat kecil kepentingannya di Dunia Islam, namun melalui wakil-wakilnya mampu juga memperhatikan segala bentuk kegiatan politik Islam. Maka (ketika muncul adanya pergolakan keislaman) terdengarlah segera berita tersebut dari Istanbul dan Iskandariah ke meja mereka. Bahwa kalau perlu kita minta bantuan Jerman¹²¹.

Tampaknya ungkapan Snouck Hurgronje di atas juga sebagai bentuk sindiran terhadap Pemerintah Belanda yang ia nilai kurang gesit dan lembek. Tapi yang jelas model intelijen seperti ini tetap masih dipraktekkan oleh intelijen Barat hingga kini yang tentu dengan sistem yang lebih canggih.

c. Lobi-lobi Diplomatis

Pemerintah Belanda tentu tidak bisa membarangus secara frontal atau langsung aktivitas media pers Timur-tengah. Namun mereka berusaha dengan segala cara untuk melakukannya, setidaknya terjadi penurunan tingkat provokasinya. Di antaranya adalah dengan melobi petinggi-petinggi Pemerintah Usmaniah yang punya pengaruh besar, melalui jalur-jalur diplomasi oleh kedutaan atau konsulat di Istanbul dan kota lainnya.

Pada saat gencarnya serangan pers Timur-tengah yang membeberkan kezaliman dan ketidakadilan Pemerintah kolonial Belanda di nusantara pada memuncak pada tahun-tahun akhir dari abad ke 19, Kerajaan Belanda melalui kedutaannya di Istanbul melayangkan surat protes sekaligus

¹²¹ *Ibid*, Hal. 1806

permintaan kepada Kekhalifahan Usmaniyah. Karena pemberitaan tersebut merusak citra Belanda di mata Pemerintah Usmaniyah dan publik Timur-tengah. Padahal selama ini Pemerintah Belanda mengklaim dicintai oleh penduduk Muslim di nusantara.

Kemudian melalui berbagai pendekatan, Belanda diketahui meminta pejabat Usmaniyah terkait untuk menghilangkan pemberitaan yang memojokkan dari sejumlah surat kabar seperti *al-Ma'lumat* (yang semi pemerintah), *Tsamarat al-Funnun* dan beberapa yang lainnya. Hal ini dapat diketahui dari surat rahasia Snouck Hurgronje tanggal 29 Januari 1900 kepada Gubernur Jenderal di Batavia agar mengontak kedubes Belanda di sana. Rupanya sejumlah surat kabar yang disebut di atas berhasil sampai secara rutin ke nusantara dan sampai ke meja kerjanya Snouck. Salah satu yang paling mengusiknya adalah Koran *al-Ma'lumat*. Setelah membaca isinya tentang berita 35.000 orang penduduk Muslim di nusantara memohon dinaturalisasi menjadi warga Kekhalifahan Usmaniyah, Snouck Hurgronje menilai bahwa:

Berita terakhir ini, menurut pemahaman saya, akan merupakan alasan yang tepat guna meminta kepada Pemerintah Usmaniyah, untuk mengumumkan bantahan terhadap pemberitaan tersebut. Karena berita isap jempol itu terbit di surat kabar al-Ma'lumat maka sudah sewajarnya pernyataan bantahan itu juga di terbitkan pula pada surat kabar tersebut¹²².

Sejauh ini, pihak Pemerintah Usmaniyah merespon positif protes pihak Belanda dan menjanjikan melakukan permintaan tersebut. Namun, setelah berjalan sekian bulan, dan sejumlah surat kabar dari Timur-tengah tetap melakukan pemberitaan dengan nada yang sama, maka pada surat Snouck Hurgronje tanggal 11 Januari 1902, ia kembali menyampaikan

¹²² *Ibid*, Hal. 1756

melalui Gubernur Jenderal di Batavia kepada kedubes Belanda di Istanbul bahwa:

Dengan hormat , saya mohon perhatian Yang Mulia bahwa eksmplar surat kabar Tsamarat al-Funnun telah sampai di tanga saya.....Baik bentuk dan isi pemberitaannya yang agaknya juga telah dimuat dalam surat kabar- surat kabar lain yang telah dikemukakan, menimbulkan alasan untuk mengingatkan Pemerintah Usmaniyah kepada janji-janji yang pernah mereka berikan dahulu. Sensor di Turki di bawah Pemerintahan Usmaniyah sangat ketat¹²³.

Artinya, dengan kontrol yang sangat besar terhadap media di sana, Penguasa Usmaniyah sebenarnya akan sangat mudah melakukan penyensoran termasuk menekan redaktur-redaktur surat kabar tersebut untuk tidak macam-macam. Hai ini bisa dipahami, karena para pekerja yang ada dalam surat kabar- surat kabar yang dikecam oleh Snouck Hurgronje tersebut sebenarnya kebanyakan orang dalam Pemerintah Usmaniyah juga. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya orang-orang Kekhalifahan Usmaniyah secara diam-diam dengan selubung jurnalisme bermaksud menekan Pemerintah Belanda untuk kepentingan program Pan-Islam. Hal yang juga sudah lama diduga oleh Snouck.

d. Pemblokiran Surat kabar- surat kabar tertentu dari Timur-tengah

Pemberitaan surat kabar- surat kabar Islamis dari Timur-tengah di tahun-tahun akhir abad ke-19 menurut Pemerintah kolonial Belanda dinilai semakin provokatif, kasar dan memusuhi. Tapi yang sangat dikhawatirkan Pemerintah Belanda adalah kemungkinan ide-idea dari pemberitaan tersebut sampai dan dapat mempengaruhi penduduk Muslim di nusantara untuk juga memusuhi dan memerangi penguasa mereka yang kafir. Banyak bukti-bukti di masa-masa sebelumnya adanya perilaku radikalisme pada masyarakat awam di nusantara setelah terpengaruh oleh tulisan-tulisan

¹²³ *Ibid*, Hal. 1781

yang bersifat menghasud atau millenaristik. Walau hanya dalam berupa selebaran saja sudah cukup merepotkan Pemerintah kolonial Belanda¹²⁴. Hal ini sebenarnya juga diketahui sejak dulu oleh Snouck Hurgronje. Apalagi kalau seruan menghasud itu sudah lebih canggih karena tampil dalam bentuk surat kabar atau majalah.

Bedasarkan pengalaman itulah, maka muncul ide untuk melakukan pemblokiran atau pengawasan terhadap paket-paket kiriman yang berasal dari kawasan Timur-tengah. Semua itu untuk mengantisipasi masuknya surat kabar- surat kabar yang memuat berita memusuhi Belanda dan akan mempengaruhi penduduk Muslim di nusantara untuk mmemberontak kepada Pemerintah Pemerintah kolonial. Meskipun surat kabar-surat kabar tersebut umumnya berbahasa Arab yang tidak dipahami oleh penduduk muslim pribumi, tetapi kalangan masyarakat etnis Arab (yang selama ini memesan surat kabar tersebut) kebanyakan memiliki kemampuan dalam Bahasa Arab. Dikabarkan bahwa secara terang-terangan beberapa orang Arab dengan bangga menenteng surat kabar semacam *al-Ma'lumat* yang anti Belanda itu dan selalu membawanya kemana-mana. Parahnya bagi Belanda adalah masyarakat etnis Arab sangat dekat dan dihormati oleh penduduk Muslim pribumi¹²⁵, maka sudah pasti orang-orang Arab ini berkesempatan menginformasikan ide-ide radikal Islam dari Timur Tengah yang penuh semangat dan anti Barat kepada penduduk lokal, hal yang paling ditakuti oleh Pemerintah kolonial Belanda.

¹²⁴ Karel Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) Hal. 254-268

¹²⁵ G.E. Pijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia (1900-1950)*, Terj. Tudjimah, Judul Asli, 'Studien Over De Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950', (Jakarta: UI Press, 1985) Hal. 115-117

Maka dengan melihat pertimbangan demikian tampaknya wajar kalau perlu ada usaha pemblokiran atau pengawasan tersebut. Tetapi respon pejabat utama penasehat Pemerintah kolonial Belanda, Snouck Hurgronje ditanggapi negative yang terlihat⁶ dari surat rahasianya kepada gubernur Jendral pada tanggal 22 Januari 1901. Menurutny:

Pada umumnya, saya tidak banyak mengharapkan keuntungan dari tindakan melawan masuk dan tersebarnya pers Pan-Islam. Yang menjadi persoalan terutama surat kabar- surat kabar berbahasa Arab yang terbit sekali atau beberapa kali seminggu, dan pamflet-pamflet berbahasa Arab atau Melayu tak bernama atau bernama samaran, yang dikirimkan ke berbagai alamat dari Malaya dan Singapura pada waktu-waktu yang tak tentu. Adapun isinya baru ketahuan setelah ide-ide Islamis tersebut sudah terlanjur tersebar luas ke publik. Jadi tindakan pelarangan tidak mungkin atau tidak banyak artinya.

Sering terjadi, beberapa orang bersama-sama berlangganan sebuah surat kabar itu. Andaikan dengan pengiriman cara bisaa dipersulit, mereka past akan memperolehnya juga melalui jalur lain, misalnya dengan pengiriman dalam amplop tertutup dan berperangko, ditujukan kepada alamat yang tidak mencurigakan, atau melalui Singapura dengan perantara orang yang bepergian. Surat kabar- surat kabar tersebut paling hanya akan menjadi agak terlambat sampainya ke alamat tujuan dan jarang atau tidak akan pernah ketahuan.

Sebenarnya masih bisa dilakukan cara pemblokiran tersebut asalkan pemberitaan- pemberitaan yang mnyerang Belanda pada pers Timur-tengah berhasil diminimlisir oleh Pemerintah Usmaniah (seperti yang pernah mereka janjikan) hingga terbatas pada satu atau dua surat kabar saja dan beredar terbatas hanya di kawasan Timur-tengah. Maka tindakan itu memang memungkinkan, tetapi tetap akan menimbulkan masalah lain lagi¹²⁶.

¹²⁶E. Gobe, dan Adrianse, *Op.cit*, Hal. 1778

Berdasarkan pernyataan Snouck Hurgronje di atas, maka ada beberapa hal yang dapat dicatat disini. Yaitu keberadaan pemikiran atau ide-ide bernuansa pembebasan, emansipasi dan kemajuan sebenarnya sudah dimulai jauh –jauh hari sebelumnya. Berbeda dengan pandangan yang umum dalam berbagai buku-buku sejarah nasional yang ada selama ini, di mana umumnya buku tersebut menjadikan efek politik etis dan kemunculan Budi Utomo sebagai pencetus pemikiran tersebut

Penjelasan Snouck Hurgronje perihal bagaimana proses sampainya informasi ide-ide Pan-Islam memberi pengetahuan baru bagi studi sejarah nasional. Bermula dari terbitnya surat-surat kabar di Istanbul, Beirut atau Kairo yang memberitakan semangat persatuan Islam dan kezaliman/ketidakadilan pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian cara pengiriman surat kabar- surat kabar tersbut dilakukan dengan cara pos atau menitipkannya pada sejumlah kapal-kapal yang melewati Suez di mana di nusantara nanti akan dijemput oleh orang yang sudah mengethui sebelumnya. Dari sini surat kabar diedarkan ke pada para pelnggannya yang kebanyakan pemukim keturunan Arab. Banyak di antara mereka ini sosok terpelajar sebagai guru atau ulama dan berhubungan baik dengan penduduk pribumi. Maka perhubungan baik inilah dimanfaatkan para pelanggan ini untuk menginformasikan kembali berita dari koran Timur Tengah itu kepada penduduk pribumi. Akibatnya semangat anti penjajah dan solidaritas Islam segera tersbar luas di nusantara tanpa bisa dibendung oleh Belanda

2. Reaksi Tak Langsung

Bentuk usaha lain Pemerintah kolonial Belanda dalam menangkis serangan pers dari Timur-tengah adalah usaha-usaha pembuktian untuk memperlihatkan kebaikan dan toleransi pemerintah di Hindia-Belanda sekaligus untuk

menunjukkan kebohongan pers Timur-tengah. Kebijakan pembuktian ini terutama ditujukan kepada Pemerintah Usmaniah khususnya dan publik Timur-tengah umumnya. Usaha-usaha seperti ini umumnya dalam bentuk peluncuran sejumlah kebijakan dan program perbaikan bagi penduduk pribumi oleh pemerintah di Hindia-Belanda.

Persoalannya sekarang adalah, Pemerintah kolonial Belanda tentu tidak memberitahukan secara eksplisit bahwa kebijakan-kebijakan tersebut terbit lantaran ditekan oleh pers Timur-tengah. Maka bagaimana untuk membuktikan bahwa ada sejumlah kebijakan Pemerintah di Hindia-Belanda merupakan reaksi terhadap tekanan pers Timur-tengah? Berikut ini peneliti akan memaparkan sejumlah kebijakan Pemerintah kolonial Belanda yang sebenarnya lahir dari bukan oleh kemauan sendiri tetapi dipicu oleh tekanan pers Islamis dari Timur-tengah. Paparan ini juga dilengkapi dengan data indikasi dan bukti-bukti adanya pengaruh tekanan tersebut.

a. Kebijakan Politik Etis atau Balas Budi

Mungkin pembahasan seputar kebijakan politik etis dan kaitannya dengan pers Timur-tengah akan menyita banyak ruangan pada bagian ini karena persepsi seputar kebijakan ini seolah sudah mapan, tak terbantahkan dan menjadi opini standar dalam kajian sejarah Nasional. Secara umum maksud dari politik etis adalah kebijakan Pemerintah kolonial Belanda yang mengubah haluan perlakuan mereka terhadap penduduk pribumi Hindia-Belanda kepada usaha peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan martabat mereka menjadi lebih baik. Semua itu terdorong oleh rasa hutang budi Kerajaan Belanda kepada penduduk pribumi yang telah menjadikan Belanda memiliki banyak kekayaan dan keuntungan. Belanda mengakui adanya tindakan eksploitasi penduduk dan pengerukan kekayaan bumi tapi tidak diimbangi

dengan perbaikan kesejahteraan dan pendidikan mereka selama berlangsungnya kolonialisme. Hal ini menjadikan Kerajaan Belanda merasa berhutang budi dan itu diwujudkan dalam bentuk politik hutang budi.

Pada pokoknya politik etis terbagi dalam dua bagian, yaitu segi ekonomi dan segi sosial budaya. Dalam segi ekonomi, Politik Etis tidak berbeda dengan politik liberal. Hal ini berarti bahwa modal swasta tetap diberi kesempatan luas untuk bergerak di daerah koloni dan pemerintah akan menjamin ketenteraman dengan pasukan-pasukan dan birokrasinya. Kedua segi itu tercakup dalam Trilogi Van Deventer yang meliputi bidang irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Segi sosial budaya dalam politik etis juga sering dinamakan *associatie politiek*. Maksudnya peningkatan sosial budaya penduduk sejajar dengan peningkatan sosial budaya orang Eropa. Segi kedua ini mengharuskan pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan sedapat-dapatnya meningkatkan nilai-nilai budaya daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya Barat. Untuk itu dikeluarkan pelbagai peraturan dan kebijaksanaan dalam bidang sosial budaya¹²⁷. Tindakan-tindakan ini sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20.

Berdasarkan gambaran umum mengenai hakikat Politik Etis, maka sekilas kebijakan tersebut menunjukkan adanya perubahan sikap Pemerintah kolonial Belanda menjadi lebih simpatik, manusiawi dan beradab. Walaupun

¹²⁷ Robert van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Terj. Zahara Deliar Noer, Judul Asli 'the Emergence of Modern Indonesian Elite'(Jakarta: Pustaka Jaya, Hal. 57-63

kenyataannya, kebijakan- kebijakan dalam pelaksanaan politik etis lebih banyak berupa janji daripada realisasinya, dan fakta-fakta penting tentang eksploitasi dan penaklukan sesungguhnya tidak berubah. Tetapi ini tidak mengurangi arti penting dari zaman kolonialisme era baru ini. Artinya, meski pelaksanaannya diklaim jauh dari target idealnya, tetapi adanya sikap baru ini bisa dikatakan sebagai hal yang luar biasa. Bahkan seperti diungkapkan oleh Ricklefs, lantaran begitu mendasarnya perubahan kebijakan kolonial tersebut sehingga orang tidak akan bisa memahami sejarah Indonesia di awal abad ke-20 tanpa mengacu pada kebijakan tersebut¹²⁸.

Namun yang menjadi persoalan utama peneliti dalam bagian ini adalah faktor-faktor pendorong tergeraknya Kerajaan Belanda mengubah kebijakan kolonial mereka yang cukup drastis ini. Persoalan ini memang begitu banyak dipaparkan oleh banyak ahli dan berbagi buku sejarah Indonesia modern. Namun sepertinya hampir semua sumber-sumber tersebut menyepakati adanya beberapa figure dan peristiwa yang mendorong kebijakan baru ini, yaitu sosok Mr. C. Th. van Deventer dengan *De Gids*-nya, *Douwes Dekker* dengan *Max Havelaarnya* atau *Partai Sosial Demokrat yang heroik mendorong usaha perbaikan melalui jalur parlemen Belanda*.

- 1) Mr. Theodoor Conradt van Deventer dalam majalah *De Gids* (Nomor 63, tahun 1899) yang berjudul *Een Eereschuld* atau "Utang Kehormatan". Artikel itu mencetuskan suatu perasaan *tanggung jawab di kalangan intelektual Belanda* yang merasa risau terhadap

¹²⁸ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Tim penerjemah Serambi, (Jakarta: Serambi, 2008) Hal.327

pertumbuhan kapitalisme modern dengan kecenderungannya untuk mengabaikan semua nilai kemanusiaan. Golongan intelektual itu merasa bertanggung jawab memperingatkan orang-orang sebangsanya akan bahaya-bahaya dehumanisasi di daerah jajahan yang ada hubungannya dengan sistem kapitalisme tersebut. Van Deventer hanya salah seorang di antara mereka yang mengungkapkan perasaan dan tanggung jawab itu sedemikian rupa sehingga diterima oleh pihak pemerintah Belanda dan dijadikan dasar program pemerintahan bagi daerah jajahan¹²⁹.

- 2) Ide-ide C. Th. van Deventer tersebut juga agaknya didukung sebelumnya oleh popularitas sebuah novel karangan *Douwes Dekker yang terbit pada tahun 1860 dengan judul. Max Havellar*. Si pengarang merupakan salah seorang countroleur yang dengan susah payah membela nasib rakyat Banten yang ditindas, baik oleh pemerintahan Belanda maupun oleh orang-orang pamong praja, yang menjadi alat pemerintah kolonial Belanda. Sepulangnya ke Negeri Belanda, Dekker menulis buku yang berjudul “*Max Havellar*”, dengan nama samaran dalam bahasa latin “*Multatuli*” yang memiliki arti “*saya sangat menderita*”. Yang mampu membuka mata orang-orang Belanda untuk mengetahui keburukan pemerintahan kolonial pada waktu itu¹³⁰. Orang-orang yang berpendapat seperti Dauwes Dekker yang kemudian diteruskan oleh orang-orang ahli politik Belanda yang dengan kemauan baik memperlihatkan dengan sungguh-sungguh hasratnya terhadap bangsa Indonesia yang meminta perbaikan hasil

¹²⁹ Marwati Joenod Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), Hal. 34-36

¹³⁰ M. C Ricklefs, *Op.cit*, Hal.328-329

dan kedudukannya sebagai bangsa orang-orang ini disebut sebagai orang yang memperjuangkan *aliran etika*.

- 3) Adanya pergolakan politik (dari kaum Etis dan kaum asosiasi yang terjadi pada masa itu di negeri Belanda). Pergolakan politik tampak dalam pertengahan abad ke-19, berupa perlawanan terhadap penerapan politik kolonial konservatif di Hindia-Belanda. Politik konservatif yang bertujuan menerapkan eksploitasi tanah jajahan bagi negara induk dan yang secara konsekuen diterapkan di Indonesia itu berupa sistem tanam paksa atau *cultuurstelsel*. Pada penghujung abad ke19, golongan yang berhaluan etis ini berhasil mendominasi kursi di Parlemen Belanda. Kemenangan politik dari golongan etis ini di Negeri Belanda menyebabkan Ratu Belanda pada tahun 1901 mencanangkan politik baru ini dalam pidato pembukaan sidang parlemen Belanda pada 1901¹³¹.

Itulah faktor-faktor pendorong munculnya ide Politik Etis dan usaha untuk merealisasikannya. Hampir semua buku sejarah yang membicarakan seputar Politik Etis tidak akan melewatkan peranan tiga faktor di atas, karena sudah dianggap tak terbantahkan. Namun yang jelas, kesan yang didapat dari penetapan ketiga faktor tersebut adalah bahwa keberadaan Politik Etis ini seolah murni berasal dari pihak Belanda semata. Tidak ada faktor luar yang berperan di sana. Hal ini seakan memperlihatkan karakter Bangsa Belanda yang beradab, humanis dan terhormat, yang mengaburkan karakter kolonialisme di balik itu semua.

Sangat disayangkan, hampir tidak ditemui kemungkinan faktor di luar dari yang juga ikut berperan

¹³¹ Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Sejarah Pergerakan Nasional*, Jakarta: Gramedia, 1993) Hal. 30-31

mendorong munculnya ide tersebut. Dari berbagi referensi yang ditelusuri, memang ada beberapa buku yang menemukan faktor lain. Di antaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Deliar Noer dalam bukunya *Gerakan Modern Islam di Nusantara*, bahwa sejumlah wilayah di luar Jawa sedang atau baru saja mengalami penaklukan oleh militer Belanda. Untuk menghindari suasana politik yang sensitif, diperlukan mengambil kebijakan baru yang bersifat menentramkan keadaan. Selain itu kebangkitan Jepang sebagai kekuatan baru di Asia diduga ikut memberi tekanan tidak langsung kepada Pemerintah di Hindia-Belanda agar memulai politik etis. Selain itu, adanya kekuatan-kekuatan asing lain yang punya kepentingan di Timur jauh. Tapi Deliar Noer tidak menyebutkan siapa “kekuatan asing lain” tersebut¹³². Barangkali yang dimaksud kekuatan asing itu adalah Kerajaan Jerman yang memiliki kekuatan militer dan sumber daya besar, tetapi hanya memiliki sedikit jatah tanah jajahan (karena Negara ini baru terbentuk pada pertengahan abad 19).

Namun dalam kajian ini, sebagaimana tercermin dari rumusan judulnya, peneliti akan mengajukan sebuah faktor lain dari sumber yang mungkin dianggap tidak disangka, atau tidak terpikirkan atau bahkan di luar *mainstream*. Faktor yang dimaksud itu tidak lain yaitu tekanan pers Timur-Tengah. Adanya pemaparan pandangan baru ini barangkali terkesan sensasional, gagah-gagahan dan sebagainya. Hal ini mungkin juga menimbulkan prasangka kalau peneliti mencoba memaksakan sesuatu yang berbeda, karena peneliti punya background Ilmu Keislaman atau karena ada alasan keimanan, maka ada usaha menaikkan nama Islam. Walau sekilas pengangkatan persolan ini

¹³² Deliar, Noer, *Gerakan Modern Islam di Nusantara*, (Jakarta: LP3ES, 1982) Hal.181

terlihat seperti usaha sensasi, tetapi sebagai seorang figur peneliti tentu amat menjauhi segala hal yang mencemari aspek objektivitas. Peneliti juga mengharapkan topik ini tidak bermaksud dan juga tidak terlihat untuk menargetkan apapun selain menemukan kebenaran, memperoleh informasi atau hal-hal yang baru dan bermanfaat bagi kajian kesejarahan secara umum.

Pembahasan seputar Sejarah Nasional Indonesia tidak akan lepas dari pembicaraan tentang Agama Islam dan Umat Islam, di mana keberadannya bukan sekedar aspek spiritualitas saja, tetapi juga memberi pengaruh besar dalam menggerakkan sejarah di Indonesia. Semua sejarawan tidak akan menolak bagaimana kedatangan Islam dari Timur-tengah memberi dampak baru terhadap dinamika sejarah nusantara. Terakhir, Agama Islam berperan menjadi kekuatan pemersatu yang menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi penjajah. Akan tetapi dalam beberapa pembahasannya, ada dugaan sikap penkaji sejarah yang seolah mengecilkan peranan kekuatan Islam di sana. Pernyataan ini mungkin terlihat sentiment, tendensius atau emosional. Namun terlepas dari itu semua, ini bisa ditunjukkan dalam kasus politik etis di atas.

Menurut analisis peneliti terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa serangan keras dari pers sangat mengganggu Pemerintah Kerajaan Belanda. Seperti ddisebut di awal tulisan ini, bahwa Kerajaan Belanda ingin dipandang sebagai mitra Kekhalifahan Usmaniah yang baik dan terhormat di mata publik Timur-tengah. Itu artinya, Kerajaan Belanda juga merupaka sahabat Umat Islam, karena Kekhalifahan Usmaniah adalah panutan Dunia Islam. Citra ini amat berharga bagi Pemerintah Belanda, karena hal demikian menjadikan berbagai kegiatan dan

kepentingan Pemerintah Belanda di Timur-tengah mendapat kemudahan atau perlindungan, Seperti diketahui, konsulat Belanda, giat memantau para haji atau aktivitas pergerakan Islam yang berbahaya yang sering dimulai dari Arabia.

Namun ternyata, kalangan jurnalisme di Timur-tengah pada pertengahan abad 19 sudah mulai tahu bahwa Belanda adalah sama saja dengan Negara Barat kolonial lainnya, memiliki catatan buruk dalam memperlakukan penduduk jajahannya, terlebih lagi mereka kebanyakan Muslim. Semua ini bermula dari meletusnya Perang Aceh pada tahun 1873 dan peristiwa yang mendahuluinya. Usaha diplomasi petinggi kesultanan Aceh di Istanbul berhasil mendapat sorotan media Usmaniah kala itu. Aceh yang Islam, berada pada posisi terancam oleh Belanda, mendapat simpatik oleh publik dan pers Timur-tengah. Sebaliknya Belanda yang Kristen otomatis dipandang sangat negatif, dan mulai diserang oleh kalangan pers¹³³. Pada masa itu, persurtakabaran di Timur-tengah masih dalam proses pertumbuhan.

Pada penghujung abad ke 19, dunia pers di Timur-tengah mengalami kemajuan pesat, di aman berbagai surtakabar dan majalah baik umum atau berhaluan tertentu bermunculan. Namun tentu dengan standar pada zaman tersebut, karena kuatnya praktek sensor atau pembredelan. Maka perhatian terhadap kejadian di kawasan Hindia-Belanda juga semakin marak oleh media-media tersebut. Pada saat yang bersamaan, muncullah pemikiran dan gerakan Pan-Islamisme di Timur-tengah yang bahkan disponsori oleh Kekhalifahan Usmaniah, di antaranya

¹³³ Paul van Veer, *Op.cit*, Hal, 85

berupa pembentukan sejumlah surtakabar yang akan menjadi sarana propaganda. Gerakan ini dengan penuh semangat memperjuangkan persatuan dan solidaritas Umat Islam di seluruh dunia untuk melawan tekanan/belenggu kolonialisme Barat dan usaha untuk kemajuan Islam global¹³⁴. Maka setiap kejadian yang menimpa Umat Islam akan selalu menjadi perhatian serius, termasuk kejadian-kejadian di kawasan nusantara, yang walau begitu jauh dari Timur-tengah, tetapi berita yang berasal dari sana selalu sampai dengan deras ke meja redaksi surtakabar-surtakabar di Istanbul, Beirut dan Kairo, bahkan Teheran.

Situasi seperti inilah yang harus dihadapi Pemerintah Hindia-Belanda. Mereka melihat bahwa pers Timur-tengah (terutama dari Istanbul, Beirut dan Kairo), memberitakan kejadian yang memojokkan dan memermalukan Kerajaan Belanda di mata publik Timur-tengah. Tidak itu saja, surtakabar-surtakabar tersebut (yang materi beritanya selalu dibumbui dengan hasutan atau kebencian) bahkan dengan rajin dikirim ke Hindia-Belanda¹³⁵. Kemudian isinya dengan cepat tersebar secara luas. Bagi Pemerintah Belanda, hal ini tidak bisa dibiarkan. Akan tetapi, Pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa dalam membendung arus berita yang menggerogoti ketenangan kekuasaan kolonial.

Maka tidak ada pilihan, selain berusaha memperbaiki citra dengan melakukan perubahan sistem atau kebijakan di negeri jajahan. Salah satu perubahan penting itu adalah dengan diluncurkannya kebijakan politik etis seperti dijelaskan di atas. Artinya di sini, kemunculan

¹³⁴ Ali Rahnema(Ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Terj. Ilyas Hasan, Judul Asli, 'Pioneers of Islamic Revival, (Bandung: Mizan, 1995) Hal.38-39

¹³⁵ E,Gobee, dan Adrianse, *Op.cit*, Hal. 1778

politik etis adalah respon terhadap serangan pers Timur-tengah. Masalahnya adalah, apa yang menjadi dasar peneliti kalau pers Timur-tengahlah yang menjadi pemicunya? sementara banyak pihak menekankan faktor-faktor dari negeri Belanda seperti dikemukakan terdahulu. Untuk menjelaskan hal ini, maka berikut peneliti paparkan alasan atau indikasinya.

1) *Ditinjau dari Aspek Waktu Peluncuran Kebijakan Politik Etis*

Politik Etis dideklarasikan pada tahun 1901. Kalau dilihat dari segi angka tahun, kesan yang muncul adalah bahwa ini tahun awal dari abad 20, sekaligus lahirnya awal kebijakan yang baru, sebuah ungkapan yang menggugah. Namun yang penting di sinilah adalah apa yang terjadi pada tahun-tahun yang mendahului lahirnya Politik Etis. Bila dikaitkan dengan ide “*hutang budi*”nya Van Deventer memang dekat rentang waktunya yaitu tahun 1899¹³⁶. Jadi logis apabila Politik Etis terkait dengan kemunculan pemikiran tersebut. Namun kalau dikaitkan dengan pesan novel Max Havelaar, itu cukup jauh yaitu tahun 1860, maka agak diragukan efek pengaruhnya. Adapun gerakan di jalur Parlemen Belanda yang memperjuangkan nasib pribumi sebenarnya juga sudah cukup lama, puncaknya terjadi pada tahun 1890 ketika orang-orang Belanda yang progresif menyampaikan usul kepada parlemen Belanda bahwa sudah waktunya Belanda memikirkan nasib bangsa itu Indonesia atau membalas budi baik bangsa Indonesia, karena Belanda sudah mengambil kekayaan dari bangsa Indonesia.

¹³⁶ Marwati Joened Poesponegoro, *Op.cit*, Hal. 34-36

Secara umum peneliti tidak menolak peranan ketiga faktor ini. Namun ada beberapa hal yang dikeragui dari kekuatan peranan mereka dalam memaksa Kerajaan Belanda mewujudkan kebijakan Politik Etis. Bisaanya sebuah kebijakan yang dicetuskan oleh Pemerintah selalu berasal dari tekanan kubu perwakilan rakyat atau parlemen. Adalah janggal hanya karena sebuah artikel di sebuah majalah segera bisa menjadi dasar sebuah kebijakan yang sebenarnya sangat penting dan radikal. Apalagi kalau menjadikan novel seperti *Max Havelaar* sebagai pertimbangannya¹³⁷. Dengan demikian, barangkali desakan dari pihak parlemenlah yang cukup masuk akal di antar ketiga faktor diatas. Namun yang jelas adanya rentang waktu yang panjang antara awal mula perjuangan politik ini (1890) dengan terbitnya kebijakan(1901), menunjukkan bahwa kekuatan tekanan parlemen sebenarnya tidaklah istimewa.

Berbeda halnya dengan faktor tekanan pers Timur-tengah yang sudah mulai beberapa tahun menjelang terbitnya kebijakan Politik Etis atau persisnya terdeteksi pada tahun 1897. Diawali dengan pemberitaan Koran *Tsamarat al-Funiin* pada September 1897. Surtakabar konsisten setiap tahun memberitakan kekejaman dan ketidakadilan Pemerintah kolonial Belanda terhadap penduduk Muslim di nusantara hingga tahun 1901 saat terbitnya kebijakan Politik Etis bahkan tahun-tahun sesudahnya. Itu baru satu surtakabar dan berita-berita yang sempat di catat (ada yang luput dari pantauan) oleh petugas Belanda. Belum lagi surtakabar yang lain yang tidak kalah kerasnya, seperti *Ma'lumat*,

¹³⁷ M. C Ricklefs, *Op.cit*, Hal.328-329

Sabah, Servet, al-Liwa', al-Muayyad dan masih banyak lagi¹³⁸.

Sebagaimana diperlihatkan pada awal-awal bab ini, puncak serangan Timur-tengah ini terjadi antara tahun 1898 hingga 1900, di mana berbagai pemberitaan yang memojokkan Belanda ini muncul terus menerus, keras dan provokatif. Selama itu pulalah Pemerintah Belanda dan konsulatnya berkali-kali mengajukan protes dan pembelaan. Di saat bersamaan, surat-surat rahasia pemerintah disibukkan dengan kekhawatiran ancaman pemberontakan akibat pengaruh pemberitaan anti Belanda yang lolos ke Hindia-Belanda melalui surtakabar yang bersal dari sana. Peneliti berpendapat, bahwa adanya tekanan pers Timur-tengah berperan besar dalam memaksa Kerajaan Belanda mencetuskan kebijakan radikalnya Politik Etis.

2) *Kebijakan Perbaikan Kesempatan Pendidikan bagi Penduduk Pribumi*

Salah satu program dari Politik Etis adalah meningkatkan taraf pendidikan bagi anak-anak kalangan pribumi, dengan memperbanyak sekolah di berbagai tingkat, dan membantu peluang bagi siswa terbaik meraih jenjang pendidikan lbih tinggi bahkan sampai dikirim ke Belanda dengan dana Pemerintah. Sehingga dari program ini mucullah para intelektual atau kalangan professional yang kelak nanti akan membantu memajukan saudaraa sebangsanya. Semua ini menunjukkan, bahwa Pemerintah kolonial Belanda punya perhatian besar terhadap pendidikan rakyat

¹³⁸ Nico J. G, Kaptein, *Op.cit*, Hal. 141-1520

jajahannya. Jadi tidak hanya mengeksploitasi tenaga mereka saja.

Namun kebijakan baru di bidang pendidikan ini sebenarnya reaksi terhadap kritikan dari pers Timur-tengah, yang menuding Pemerintah kolonial Belanda mempraktekkan kebijakan yang membuat penduduk pribumi Muslim akan selalu terbelakang dan miskin, seperti dimuat dalam surtakabar *Servet* edisi 17 Januari 1899, *bahwa sistem kolonial di Hindia-Belanda tidak memungkinkan kaum Muslimin ikut serta dalam kemajuan secara materi dan budaya*. Lalu pada bulan berikutnya, 10 Februari 1899, Koran ini memberitakan tentang undangan kepada pelajar Jawa untuk belajar di Istanbul. Mereka diundang oleh Pemerintah Usmaniah untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan di Istanbul¹³⁹. Disebutkan bahwa para siswa dari Hindia-Belanda ini merasa berterima kasih kepada Kekhalifahan Usmaniah yang membantu mereka untuk berkesempatan bisa belajar di sana.

Adanya pemberitaan ini secara tidak langsung seolah menyindir Penguasa Hindia-Belanda yang tidak memberi peluang kepada penduduk pribuminya yang Muslim. Sementara di pihak lain, penguasa Usmaniah justru lebih memberi perhatian (di antaranya dengan pemberian beasiswa belajar tersebut). Sikap ini juga seolah menegaskan bahwa warga Muslim di dunia termasuk di Hindia-Belanda, merupakan bagian dari rakyat yang harus dinaungi dan dilindungi oleh kekhalifahan Islam, sebuah opini Pan-Islam yang amat ditakuti oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Maka untuk

¹³⁹ *Ibid*, Hal. 144 dan E, Gobebe, dan Adrianse, *Op.cit*, Hal. 1742

menangkis seranga pers tersebut pihak Pemerintah kolonial Belanda segera memberlakukan program perbaikan seperti disebut diatas. Tetapi walau sudah dilakukan usaha perbaikan, serangan pers tentang masalah ini masih terus berlanjut.

3) Kebijakan Perbaikan Kesejahteraan

Program kesejahteraan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan Politik Etis. Bahkan bisa dikatakan sasaran pokok dari kebijakan baru ini. Namun program kesejahteraan ini sebenarnya juga dalam rangka menangkis kecaman pers Timur-tengah yang menganggap Pemerintah Hindia-Belanda sama sekali tidak mpedulikan kemiskinan yang parah pada penduduk Muslim di nusantara, mereka hanya mau mengeksploitasi tenaga para penduduk dan mengeruk kekayaan buminya.

Puncak dari kritikan itu adalah kabar adanya permintaan sebanyak 35.000 orang penduduk Hindia-Belanda kepada Pemerintah Usmaniah agar mereka diterima menjadi warga Negara Kekhalifahan Usmaniah yang diekspos pada 22 Februari 1900, oleh surtakabar *Servet* dan *Ma'lumat*¹⁴⁰. Pemberitaan ini seolah hantaman terhadap klaim Kerajaan Belanda bahwa penduduk pribumi nusantara merasa bahagia di bawah Pemerintah Belanda, tapi kenyataannya mereka sangat menderita sehingga nekad meminta naturalisasi. Berita koran ini juga sampai ke meja Snouck Hurgronje. Ia merasa terganggu dengan pemberitaan ini dan menyarankan kepada Gubernur Jenderal bahwa

¹⁴⁰ Ibid, Hal. 144-145

Berita terakhir ini, menurut pemahaman saya, akan merupakan alasan yang tepat guna meminta kepada Pemerintah Usmaniyah, untuk mengumumkan bantahan terhadap pemberitaan tersebut. Karena berita isap jempol itu terbit di surat kabar al-Ma'lumat maka sudah sewajarnya pernyataan bantahan itu juga di terbitkan pula pada surat kabar tersebut¹⁴¹.

Namun, selain mengajukan protes dan lobi diplomatik, Pemerintah Hindia-Belanda juga menggalakkan program perbaikan kesejahteraan penduduk pribumi melalui kebijakan Politik Etis ini. Diharapkan kampanye perbaikan ini dapat membungkam tuduhan pers Timur-tengah tersebut.

b. Ordonansi Guru 1905

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan agama diurus oleh dua departemen yaitu: Departemen van Onderwijst en Eeredinst untuk pengajaran agama di sekolah umum, dan Departemen voor Inlandsche Zaken untuk pengajaran agama di lembaga pendidikan Islam (pesantren dan madrasah). Dalam praktiknya, kedua lembaga tersebut tidak menangani masalah pendidikan dalam arti memfasilitasi, melainkan lebih merupakan sarana untuk mengontrol dan mengawasi lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Salah satu alat pengontrol yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda pada 1905 dan 1925 ialah kebijakan Ordonansi Guru. Melalui kebijakan ini, pemerintah mewajibkan para guru agama memiliki izin khusus untuk mengajar¹⁴².

¹⁴¹ E, Gobe, dan Adrianse, *Op.cit*, Hal. 1756

¹⁴² Nasution, Harun, (Ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993) Jilid III Hal.868-869

Banyak sikap mereka yang sangat merugikan lajunya perkembangan pendidikan agama di Indonesia, misalnya

- (1).Setiap sekolah atau Madrasah harus memiliki izin dari bupati/pejabat pemerintahan belanda
- (2). Harus ada penjelasan dari sifat pendidikan yang sedang dijalankan secara terperinci
- (3).Para guru harus membuat daftar murid dalam bentuk tertentu dan mengirimkannya secara periodik kepada daerah yang bersangkutan¹⁴³.

Menurut peraturan baru ini, izin Bupati tidak lagi diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan Islam. Guru agama cukup memberitahukan pada pejabat yang bersangkutan tentang maksud mengajar. Disamping itu, guru juga disuruh mengisi formulir yang telah disediakan oleh pejabat pemerintahan Belanda yang isinya berupa persoalan berupa murid dan kurikulum. Akibatnya, tidak sedikit guru-guru agama yang tidak bisa mengajar karena tidak lulus dari lembaga perizinan yang sebenarnya lebih bersifat politis¹⁴⁴. Seleksi yang dilakukan melalui Ordonansi Guru ini menunjukkan adanya kekhawatiran pemerintah terhadap guru-guru yang dianggap berbahaya yang dapat menimbulkan kesadaran kritis rakyat, karena bisa menimbulkan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Namun sebenarnya faktor pers Timur-tengah juga berperan besar mendorong munculnya kebijakan ini. Maraknya surtakabar-surtakabar dari Timur-tengah(terutama dari Istanbul, Beirut dan Kairo) yang berisi kecaman dan hasutan kepada Pemerintah Hindia-Belanda, sudah diketahui oleh intelijen Belanda seperti tercermin dalam berbagai pernyataan Snouck Hurgronje di atas. Intelijen Belanda mengetahui bahwa pemikiran-

¹⁴³ Alwi Shihab, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristenn di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998) Hal. 147-150

¹⁴⁴ *Ibid*

pemikiran anti Belanda dari Timur-tengah bisaanya berasal dari orang-orang etnis Arab yang bermukim di beberapa tempat di Hindia Belanda. Karena mereka.

Bisaanya orang etnis Arab juga bekerja sebagai guru atau ulama yang memberi pengetahuan agama kepada penduduk pribumi, tidak terkecuali, ide-ide radikal dari surat kabar tersebut. Penduduk muslim pribumi sangat menghormati dan mempercayai keilmuan dari orang-orang Arab tersebut sehingga banyak yang berguru kepada mereka¹⁴⁵. Kelak, mantan murid-murid tersebut berhasil menjadi guru pula dan diterima di sejumlah sekolah. Pemerintah Belanda tampaknya mewaspadaai guru-guru agama tersebut karena berpotensi mengajarkan pemikiran anti Belanda kepada siswa-siswanya sebagaimana mereka terima dari guru atau ulama etnis Arab tadi. Maka berdasarkan proses demikian, peneliti berpendapat kebijakan ordonansi guru 1905 ini tidak lepas dari tekanan pers dari Timur-tengah yang merupakan tersangka utama sebagai sumber pemikiran garis keras dan memusuhi Belanda

c. *Pembentukan Lembaga Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*

Kantoor voor Inlandsche zaken yang berwenang memberikan nasehat kepada pemerintah dalam masalah pribumi ini pada dasarnya telah berdiri sejak tahun 1899. *Kantoor voor Inlandsche zaken* merupakan “lembaga istimewa yang sangat penting pada masa penjajahan Belanda. *Kantoor voor Inlandsche zaken* merupakan dari perluasan tugas seorang *adviseur* atau penasehat pemerintah Hindia Belanda. Dalam melaksanakan tugasnya seorang *adviseur* bisaanya dibantu oleh pegawai ahli, di samping beberapa pegawai administrasi, seperti: pembantu Urusan Arab, Urusan Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia,

¹⁴⁵ Van Den Berg, L.W.C., *Orang Arab di Nusantara*, Terj. Rahayu Hidayat, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010) 181-184

Urusan Pengawasan dan Pembinaan Pemuda Pribumi, dan Juru Bicara Bahasa Arab; juga dibantu wakil adviseur¹⁴⁶.

Tugas adviseur sendiri disamping tugas utama memberi nasehat kepada pemerintah Hindia Belanda juga mempunyai tugas lain di antaranya:

- 1) Harus mengadakan penelitian tentang pergerakan agama, politik dan kebudayaan dalam masyarakat pribumi,
- 2) Berkewajiban mencari informasi tentang pergerakan di kalangan Arab dan aliran kerohanian dalam Islam,
- 3) Memperhatikan masalah pergi haji ke Mekkah¹⁴⁷, yang justeru harus memperoleh prioritas utama.
- 4) Mempelajari ilmu bahasa dan etnografi, bila dipandang perlu bagi keberhasilan tugasnya.
- 5) Selanjutnya pada instruktur kelima dan keenam pada tahun 1934 dan 1939,

Di samping itu, *Kantoor voor Inlandsche zaken* juga mempunyai hubungan dengan perwakilan Belanda di luar negeri, yakni konsulat di Jeddah, konsulat di Turki, Atase di Kairo, atase di Kalkuta, dan Atase di Singapura. Adapun aktivitas *Kantoor voor Inlandsche zaken* antara lain:

- 1) Memberikan saran kepada pemerintah kolonial tentang masalah-masalah pribumi, bahkanada yang menilainya sebagai “inti administrasi
- 2) Memberikan pendapat kepada Gubernur Jenderal mengenai pengangkatan bupati baru

¹⁴⁶ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*, (Jakarta: LP3ES, 1985) Hal. 2-7

¹⁴⁷ Nasution, Harun , *Op.cit*, Jilid III Hal.540-541

- 3) Mengontrol pemakaian gelar atau memberikan pertimbangan dalam pemberian gelar para penduduk, baik gelar resmi maupun pribadi,
- 4) Mempertimbangkan pengangkatan Penghulu Kepala
- 5) Meneliti perkumpulan dan organisasi pribumi,
- 6) Menganalisa aneka berita dalam surat kabar, majalah dan publikasi lainnya,
- 7) Mengurus masalah ibadah haji ke makkah,
- 8) Mengurus masalah golongan arab dan pengangkatan pimpinannya
- 9) Mengawasi masalah pendidikan agama, kas mesjid dan peredaran buku¹⁴⁸.

Pendek kata aktivitas *Kantoor voor Inlandsche zaken* meliputi seluruh masalah pribumi dan Arab, khususnya masalah Islam . Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah adanya tugas lembaga ini yang harus mengadakan penelitian tentang pergerakan agama, politik dan kebudayaan dalam masyarakat pribumi dan menganalisa aneka berita dalam surat kabar, majalah dan publikasi lainnya. Adanya pekerjaan jenis kedua ini merupakan pengaruh dari usaha Pemerintah Belanda membendung masuknya arus informasi dari pers Timur-tengah melalui surtakabar- surtakabar yang dikirim dari sana. Namun usaha ini dikritik oleh Snouck Hurgronje. Menurutnya;

Pada umumnya, saya tidak banyak mengharapkan keuntungan dari tindakan melawan masuk dan tersebarnya pers Pan-Islam. Yang menjadi persoalan terutama suratkabar- suratkabar berbahasa Arab yang terbit sekali atau beberapa kali seminggu, dan pamphlet-pamflet berbahasa Arab atau Melayu tak bernama atau bernama samara, yang dikirimkan ke berbagai alamat dari Malaya dan Singapura pada waktu-waktu yang tak tentu. Adapun

¹⁴⁸ *Ibid*

*isinya baru ketahuan setelah ide-ide Islamis tersebut sudah terlanjur tersebar luas ke publik. Jadi tindakan pelarangan tidak mungkin atau tidak banyak artinya*¹⁴⁹.

Bahkan pada bagian lain dari nasehatnya kepada gubernur Jendral di Batavia, Snouck menyatakan bahwa penolakannya terhadap pelarangan masuknya surat kabar-surat kabar dari Timur Tengah sudah berkali-kali ia tegaskan. Sebab barang itu akan sampai juga kepada pemesannya, walau agak sedikit terlambat. Kalau dipaksakan juga usaha pemblokiran tersebut sehingga terasa heboh, itu malah akan menjadi iklan gratis bagi surat kabar tersebut¹⁵⁰. Dari pernyataan Snouck Hurgronje seperti ini, menunjukkan bahwa sudah ada usaha-usaha beberapa kali dari Pemerintah Hindia Belanda untuk menghalangi lolosnya surat kabar Timur-Tengah dan Snouck merasakan dampaknya dan ia menilainya cara itu keliru besar.

Demikianlah berbagai fakta dan data peneliti paparkan perihal besarnya peranan pers Timur Tengah dalam mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di awal abad 20. Walaupun peneliti masih melihat sejumlah kebijakan-kebijakan Belanda lainnya yang kemungkinan juga muncul karena adanya faktor pers tersebut. Namun di sini peneliti terbentur pada persoalan data yang masih dangkal dan waktu yang tidak mencukupi. Kesulitan lain yang amat mengganjal dalam bahasan ini adalah, studi-studi terkait dengan persuratkabaran Timur Tengah awal hingga era Perang Dunia I ternyata sangat minim. Bahkan sekedar informasi ringkas untuk sebuah surat kabar yang cukup besar pun sangat sulit didapat meski

¹⁴⁹ E.Gobee, dan Adrianse, *Op.cit*, Hal. 1778

¹⁵⁰ *Ibid*, Hal. 1887

dari sumber paling sekunder sekali pun dari dunia maya. Sehingga dalam melakukan kajian ini tim peneliti mengalami krisis data dan krisis informasi.

Dari pembahasan yang panjang lebar perihal persoalan media massa ini seharusnya memberi para pengkaji sejarah nasional petunjuk, bahwa ada banyak sekali orang di luar negeri di masa lalu yang menaruh perhatian besar terhadap keadaan dan nasib orang Indonesia selama di bawah kekuasaan kolonial Belanda, terlepas apaun motif yang mendorongnya. Hal demikian menunjukkan besarnya rasa solidaritas yang ditunjukkan oleh orang luar tersebut. Sayangnya, peneliti melihat tidak ada sama sekali walau sekilas informasi fenomena ini dalam berbagai buku sejarah bisa ataupun buku-buku sejarah sekolahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan berbagai informasi yang mendukungnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Sejumlah besar kebijakan Pemerintah kolonial Belanda di nusantara muncul karena adanya tekanan faktor tekanan dan desakan dari pemberitaan kritis pers Timur Tengah seputar praktek kolonialisme Belanda terhadap penduduknya yang Muslim
2. Perubahan kebijakan tersebut tercermin dari ditetapkannya Politik Etis yang terkenal itu pada tahun 1901 dengan berbagai program perbaikan di dalamnya, adanya program ordonansi guru, pembentukan lembaga *Kantoor voor Inlandsche zaken*, sampai pembentukan tim khusus pemantau, pengontrol dan pembungkam pers anti Belanda di konsulat Belanda yang ada di Timur-Tengah (terutama Istanbul, Kairo dan Beirut).
3. Indikasi tekanan pers Timur-Tengah yang mempengaruhi kebijakan Belanda di nusantara dapat diketahui dari sejumlah dokumen surat-surat rahasia penasehat pemerintah kolonial di Batavia kepada Gubernur Jenderal yang mengungkapkan kekhawatiran besar atas pemberitaan kritis bernuansa anti Belanda dari surat kabar Timur Tengah, yang celakanya ternyata sampai juga di tangan penduduk Muslim Hindia-Belanda dan menjadi populer.
4. Ketakutan Pemerintah kolonial Belanda terhadap pers Timur-Tengah terutama sifat pemberitaannya yang kritis, menghasud, provokatif dan (terutama) mendorong penduduk Muslim Hindia-Belanda untuk melawan atau

memberontak terhadap penguasa Belanda mereka yang kafir dan zalim. Bila hasutan ini meluas berpotensi memberi ancaman dan menyulitkan Pemerintah kolonial dalam memelihara stabilitas dan keamanan

5. Pers Timur-Tengah merupakan salah satu pemain penting yang mendorong munculnya era pergerakan nasional pada paruh pertama abad ke 20. Peranan ini juga cikal-bakal lahirnya ide/gerakan nasionalisme dan Islam radikal

A. Saran

Setelah melakukan proses riset berupa pengumpulan data, pengolahan dan penyajiannya, maka tim ppeneliti melihat bahwa kajian-kajian tentang pers dan massmedia yang seharusnya populer, ternyata sangat langka pada bagian pers Islamnya. Bahkan peneliti hampir tidak menemukan data atau informasi perihal persuratkabaran Timur Tengah ini meski dalam bentuk informasi ringkas dan melalui sumber paling sekunderpun dunia maya. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena menimbang besarnya peranan mereka dalam sejarah Indonesia modern. Selain itu peneliti melihat adanya kesan mengecilkan peranan pers-pers Islamis tersebut khususnya oleh para pengkaji sejarah Indonesia dari Barat di mana kalangan sejarawan nasional juga menjadikan mereka sebagai rujukan.

Maka melalui penelitian ini, tim peneliti menyarankan agar dilakukan usaha lebih serius dan mendalam tentang media-media pers yang ada di Timur Tengah sejak masa kelahirannya di abad 19 hingga pada permulaan abad 20. Selain itu perlu dilakukan usaha-usaha pencarian dan dokumentasi surat kabar-surat kabar Timur-Tengah, terutama yang memuat pemberitaan seputar Indonesia. Hal ini berguna sebagai sumber penulisan sejarah baru yang bisa memberi pemahaman baru bagi kajian sejarah nasional atau Islam di Indonesia. Dan, akhirnya, perlu dilakukan pengkajian ulang studi historiografi Indonesia, sebab dalam studi tersebut, terasa adanya sumber sejarah lain yang luput atau terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, (Ed), *Sejarah dan Masyarakat Lintasan Historis Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 1987
- Adam, Cindy, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Terj. Syamsu Hadi, Jakarta: Media Pressindo, 2007
- Ahmed, Akbar S., *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, Terj. Nunding Ram dan Ramli Yakub, Jakarta: Erlangga, 1990
- , *Posmodernisme Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, Bandung: Mizan, 1993
- Algadri, Hamid, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1988
- Ali, Haidar, M. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pebdekatan Fikih dalam Polttik*, Jakarta: Gramedia, 1994
- Anwar, Rosihan, *Musim Berganti Sekilas Sejarah Indonesia 1925-1950*, Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1985
- , *Musim Berganti Masa 1973-1986*, Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986
- , *Menulis dalam Air Sebuah Otobiografi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983
- Assad, Muhammad, *Islam di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992

- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1999,
- Amstrong, Karen, *Perang Suci*, Jakarta: Serambi, 2003
- Assamurai, Qasim, *Bukti Kebohongan Orientalis*, Terj. Syuhudi Ismail, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996
- Ansari, Tamim, *Dari Puncak Bagdad Sejarah Dunia Versi Islam*, Jakarta: Zaman, 2010
- Al Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosuwiryo*, Jakarta: Darul Falah, 1999
- Baay, Reggie, *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*, Terj. Siti Hertini Adiwoso, Judul asli, 'De Njai; Het Concubinaat Nederland-Indie (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010
- Beg, Moazzam, *Neraka Guantanamo*, Terj. Tim Penerjemah Mizan, Bandung, Mizan, 2006
- Busyairi, Badruzzaman, *Catatan Perjuangan H.M. Yunan Nasution*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985
- Bus, Yecki, *Negara Kaum Assassin*, (Padang: Hayfa Press, 2012)
- Dengel, Holk H., *Darul Islam dan Kartosuwiryo*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Dobbine, Christine, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam dan Gerakan Paderi Minangkabau 1784-1847*, Terj. Lilian D. Tedjasudhana, Jakarta: Komunitas Bambu, 2008

- Douwes, Dick dan Nico Kaptein, *Indonesia dan Haji*, Terj. Soedarso Soekarno, Jakarta, INIS, 1997
- Esposito, John L, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Terj. Eva YN, dkk, Judul asli, 'The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Bandung: Mizan, 2001
- Fromm, Erich, *Akar Kekerasan, Analisis sosio-psikologis atas Watak Manusia*, Terj. Imam Muttaqin, Judul Asli, *The Anatomy of Human Destructiveness*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancan Dunia*, Bandung: Sinar Algesindo, 1993
- Gobee, E, dan C. Adrianse, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Terj. Sukarsi, Judul asli 'Amblijke Adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936' Jakarta: INIS, 1994
- al-Ghazali, Muhammad, *Islam yang Diterlantarkan*, Terj. Bandung: Karisma, 1984
- Hamka, *Ayahku*, Jakarta: Umindia, 1984
- , *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Hassan, M. Zein, *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Hourani, Albert, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, Terj. Suparno dkk, Judul asli, 'Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939, Bandung: Mizan, 2004
- Hatta, Muhammad, *Memoir*, Jakarta: Yayasan Hatta, 2003

- Hurgronje, C. Snouck, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jakarta: INIS, 1996
- , *Islam di Hindia Belanda*, Terj. S.Gunawan, Judul Asli, 'De Islam in Nederlandsch-Indie', Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983
- Hobsbawm, Erick, *Bandit Sosial*, Terj. Muh. Zaki Husein, Jakarta: Teplok Press, 2001
- Jackson, Karl D., *Kewibawaan Tradisional Islam dan Pemberontakan kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1990
- Kafrawi, Ridhwan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1994
- Kaptein, Nico J. G, *Kekacauan dan kerusuhan Tiga Tulisan tentang Pan-Islamisme di Hindia Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan belas dan Awal Abad Kedua puluh*, Jakarta: INIS, 2003
- Kartodirjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984
- , *Ratu Adil*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992
- , *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, Jakarta: Gramedia
- Korver, Ape, *Ratu Adil*, Jakarta: Pustaka Grafiti Pers, 1985
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1999

- Larson, George D., *Masa Menjelang Revolusi, Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990
- Lewis, Bernard, *Muslim Menemukan Eropa*, Terj. Ahmad N. Muiz, Judul Asli, 'Muslim Discovery of Europe, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1988
- Nasution, Harun, (Ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993
- , Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- Natsir, Muhammad, *Capita Selecta*, Jakarta, Tp, 1954
- , *Islam dan Kristen di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988
- Niel, Robert van, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Terj. Z. Deliar Noer, judul asli, 'The Emergence of the Modern Indonesian Elite, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984)
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Nusantara*, Jakarta: LP3ES, 1982
- Pijper, G.E., *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia (1900-1950)*, Terj. Tadjimah, Judul Asli, 'Studien Over De Geschiedenis van de Islam in Indonesia 1900-1950, Jakarta: UI Press, 1985
- Pringgodigdo, A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1994
- Quthb, Muhammad, *Perluakah Menulis Ulang Sejarah Islam?*, Terj. Jakarta: Gema Insani Pers, 1993

- Raharjo, Imam Toto K. dan Herdianto WK, *Bung Karno dan Wacana Islam*, Jakarta: Grasindo, 2001
- Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Tim penerjemah Serambi, Jakarta: Serambi, 2008
- Roem, Mohamad, *Bunga Rampai dari Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristenn di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998
- Samudra, Imam, *Aku Melawan Teroris*, Jakarta: Jazeera, 2004
- Steenbrink, Karel, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- , *Kawan dalam pertikaian kaum kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*.
Penj. Suryan A. Jamrah, Jakarta: Mizan. 1995
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Tanzil, Hazil (Ed), *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi(Ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005
- Van Den Berg, L.W.C., *Orang Arab di Nusantara*, Terj. Rahayu Hidayat, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010

- Van Dick, Cornelis, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1983
- Williams, Michael C., *Arit dan Bulan Sabit*, Terj. Chandra Utama, Yogyakarta: Syarikat, 2003
- Yatim, Badri, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci Hijaz (Mekah dan MAdinah) 1800-1925*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Ziadeh, Nicola A., *Tariqat Sanusiyyah Penggerak Pembaharuan Islam*, Jakarta: Srigunting, 2001
- Zurcher, Erjk J., *Sejarah Turki Modern*, Jakarta: Gramedia, 2003